

SOSIO KONSEPSIA

Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

Vol. 7 No. 03 Mei - Agustus 2018

ISSN 2089 - 0338
E-ISSN 2502-7921

Akreditasi
Kemenristekdikti Nomor
21/E/KPT/2018

- KOMPLEMENTARITAS PROGRAM BANTUAN SOSIAL DAN KEBUTUHAN DASAR KELUARGA MISKIN KABUPATEN BARITO KUALA

Muhtar

- KINERJA PENDAMPING SOSIAL PADA PROGRAM PENANGANAN KEMISKINAN DAN KELOMPOK RENTAN DI KOTA TARAKAN

Suradi dan B. Mujiyadi

- PENGETAHUAN MANAJEMEN BENCANA DAN KEARIFAN SOSIAL DI KABUPATEN MALANG

Oman Sukmana

- RASA SALING PERCAYA ANTARA PEMULUNG DAN PENGEPUL DI KABUPATEN BEKASI: PERSPEKTIF KAPITAL SOSIAL

Mutiara Irfarinda dan Robert MZ Lawang

- BADAN USAHA MILIK DESA DAN PEMBANGUNAN SOSIAL DI KABUPATEN BOJONEGORO

Versanudin Hekmatyar dan Fentiny Nugroho

- IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN SOSIAL NON TUNAI DI BERBAGAI KOTA DI INDONESIA

Risnandar dan Aditya Wisnu Broto

- KEBERFUNGSIAN SOSIAL LANJUT USIA DI PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA MINAULA DI KOTA KENDARI

Syamsuddin, Kanya Eka Santi, dan La Alimuddin

SOSIO KONSEPSIA

Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

Vol. 7 No. 03 Mei - Agustus 2018

ISSN 2089 - 0338
E-ISSN 2502-7921

Akreditasi
Kemenristekdikti Nomor
21/E/KPT/2018

Sebuah Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial menyajikan karangan ilmiah dalam bentuk hasil penelitian lapangan bidang kesejahteraan sosial. Terbit setahun tiga kali periode April, Agustus, dan Desember.

SOSIO KONSEPSIA: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial mulai terbit Vol 1 No. 1 September - Desember 2011, merupakan kelanjutan dari “Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial” yang terbit pertama kali Vol 1 No. 1 Januari 1995 sampai dengan Vol 16 No. 2 Mei - Agustus 2011. Terhitung mulai edisi Vol 5 No.2 Januari - April 2016 Jurnal Ilmiah "SOSIO KONSEPSIA" menggunakan *Open Journal System (OJS)*. Penulis yang akan mengajukan naskahnya untuk dimuat di Sosio Konsepsia melakukan pengiriman naskah melalui *Open Journal System (OJS)*: <http://ejournal.kemsos.go.id/index.php/sosiokonsepsia>

Penyunting Ahli / Mitra Bestari

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Prof. Adi Fahrudin, Ph.D. | <i>Praktek dan Pendidikan Pekerjaan Sosial, Psikososial, dan Disaster Management (Universitas Muhammadiyah Jakarta)</i> |
| 2. Prof. Irwanto, Ph.D. | <i>Psikologi, Perkembangan Anak dan Studi Keluarga, HIV/AIDS, Disabilitas (Universitas Atmajaya Jakarta)</i> |
| 3. Bagus Aryo, Ph.D | <i>Kesejahteraan Sosial, Kebijakan Sosial dan Pembangunan, Microfinance (Universtas Indonesia)</i> |
| 4. Dr. Chazali Situmorang | <i>Jaminan Kesejahteraan Sosial (Universitas Nasional Jakarta)</i> |
| 5. DR. Bambang Rudito | <i>Antropologi, Interkultural, Corporate Social Responsibility (Institut Teknologi Bandung)</i> |
| 6. DR. Santoso Tri Raharjo | <i>Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Sosiologi (Universitas Pajajaran, Bandung)</i> |
| 7. Makmur Sunusi Ph.D | <i>Pekerjaan Sosial (Universitas Muhammadiyah, Jakarta)</i> |

Penanggung Jawab

Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI

Editor Bagian

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. Drs. Suradi, M.Si | 6. Drs. Muhtar, M.Si |
| 2. Drs. Setyo Sumarno, M.Si | 7. Badrun Susantyo, Ph.D |
| 3. Dra. Indah Huruswati, M.Si | 8. DR. Hari Harjanto Setiawan |
| 4. Sugiyanto, S.Pd, M.Si | 9. Habibullah, S.Sos, M.Kesos |
| 5. Drs. B. Mujiyadi, M.SW | |

Manager Jurnal/Proffreader

Irmayani, SH, M.Si

Diterbitkan oleh **Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial**



Alamat

Jl. Dewi Sartika No.200 Cawang III Jakarta Timur 13630 Telp. (021) 8017146, Fax (021) 8017126

Email : sosiokonsepsia@gmail.com Website: puslit.kemsos.go.id

Ejournal: <http://ejournal.kemsos.go.id/index.php/sosiokonsepsia>

Percetakan: CV. Multi Inovasi Mandiri (isi diluar tanggungjawab percetakan)
Villa Inti Persada Blok A.12/6 Pamulang Kota, Tangerang Selatan. Email: inovasiku_99@yahoo.com

SOSIO KONSEPSIA

ISSN 2089-0338
E-ISSN 2502-7921

Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
Volume 7, No. 03, Mei - Agustus 2018

Akreditasi
Kemenristekdikti Nomor:
21/E/KPT/2018

DAFTAR ISI

HALAMAN

■ PENGANTAR REDAKSI	iii
■ Komplementaritas Program Bantuan Sosial dan Kebutuhan Dasar Keluarga Miskin Kabupaten Barito Kuala	119 - 129
Muhtar	
■ Kinerja Pendamping Sosial pada Program Penanganan Kemiskinan dan Kelompok Rentan di Kota Tarakan	130 - 145
Suradi dan B Mujiyadi	
■ Pengetahuan Manajemen Bencana dan Kearifan Sosial di Kabupaten Malang	146 - 160
Oman Sukmana	
■ Rasa Saling Percaya Antara Pemulung dan Pengepul di Kabupaten Bekasi: Perspektif Kapital Sosial	161 - 174
Mutiara Irfarinda dan Robert MZ Lawang	
■ Badan Usaha Milik Desa dan Pembangunan Sosial di Kabupaten Bojonegoro	175 - 188
Versanudin Hekmatyar dan Fentiny Nugroho	
■ Implementasi Program Bantuan Sosial Non Tunai di Berbagai Kota di Indonesia	189 - 204
Risnandar dan Aditya Wisnu Broto	
■ Keberfungsian Sosial Lanjut Usia di Panti Sosial Tresna Werdha Minaula di Kota Kendari	205 - 220
Syamsuddin, Kanya Eka Santi, dan La Alimuddin	

PENGANTAR REDAKSI

SOSIO KONSEPSIA Vol 7 No 03, 2018 ini menyajikan hasil-hasil penelitian yang aktual dan menarik untuk menjadi bahan pustaka, terkait dengan kemiskinan dan kebencana alam.

Keluarga miskin dihadapkan dengan keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Berkaitan dengan itu, komplementaritas program bantuan sosial diharapkan mampu menjadi solusi atas keterbatasan tersebut. Penelitian Muhtar membahas penerima manfaat yang termasuk keluarga miskin, menerima berbagai program pemerintah sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

Masih dalam kerangka penanganan kemiskinan, Kementerian Sosial menyelenggarakan program e-Warong, yang dimaksudkan agar keluarga miskin dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, khususnya pangan. Penelitian Risnandar dan Aditya Wisnu Broto menemukan masih ada kesenjangan antara harapan dengan kondisi lapangan. Disarankan diperlukan pendampingan agar program berkelanjutan.

Peran pendamping pada program penanganan kemiskinan sangat menentukan keberlanjutan program. Suradi dan B.Mujiyadi membahas dalam penelitiannya, bahwa pendamping sosial telah melaksanakan tugas dan peranannya. Meskipun demikian, kinerjanya masih pada kategori *moderate*, dan oleh karena itu diperlukan optimalisasi.

Penanganan kemiskinan dan pembangunan sosial pada umumnya, menjadi tanggung jawab semua pihak, termasuk pemerintah desa. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), dalam kaitan ini dapat digunakan sebagai instrumen dalam pembangunan sosial. Versabudin Hekmatyar dan Fentiny Nugroho membahas dalam penelitiannya, bahwa apabila BUM-Desa dapat dikelola dengan baik, dengan komitmen yang kuat maka akan menjadi solusi dalam mengatasi kemiskinan di desa.

Hubungan sosial yang didasari saling percaya antara pemulung dan pengepul, merupakan potret mengatasi kemiskinan yang dikembangkan masyarakat kelas bawah. Mutiara Irfarinda dan Robert MZ. Lawang membahas dalam penelitiannya, bahwa jaringan yang terbangun berlandaskan saling percaya antara pemulung dan pengepul, akan saling menguntungkan secara ekonomi bagi keduanya.

Berbagai wilayah di Indonesia merupakan wilayah rawan bencana alam, dan salah satunya adalah bencana alam gunung api. Masyarakat di lereng Gunung Kelud memiliki pengetahuan kebencanaan dan kearifan lokal. Oman Sukmana membahas dalam penelitiannya, bahwa pengetahuan kebencanaan dan kearifan lokal menjadikan masyarakat memiliki kepekaan terhadap perubahan yang terjadi sebagai tanda terjadinya bencana alam.

Lanjut usia (lansia) di panti sosial masih memiliki potensi untuk menampilkan keberfungsian sosialnya. Syamsuddin, Kanya Eka Santi dan La Alimudin membahas dalam penelitiannya, bahwa

lansia memiliki pengetahuan dan pengalaman hidup syarat dengan nilai-nilai sosial, budaya dan moral, yang semua itu bermanfaat bagi generasi muda.

Selamat membaca.

Redaksi

SOSIO KONSEPSIA

Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh digandakan tanpa izin dan biaya.

Muhtar (Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial)

KOMPLEMENTARITAS PROGRAM BANTUAN SOSIAL DAN KEBUTUHAN DASAR KELUARGA MISKIN KABUPATEN BARITO KUALA

COMPLEMENTARY SOCIAL ASSISTANCE PROGRAMS AND BASIC NEEDS OF POOR FAMILIES IN BARITO KUALA DISTRICT

SOSIO KONSEPSIA Vol.7, No.03, Agustus 2018, hal: 119-129.

Abstrak

Kajian ini bertujuan mendeskripsikan pemenuhan kebutuhan dasar keluarga miskin melalui komplementaritas program bantuan sosial. Kajian dilakukan di Desa Mekarsari dan Desa Tenggiran Baru Kecamatan Mekarsari, sebagai wilayah kecamatan paling banyak penduduk miskin di Kabupaten Barito Kuala. Jenis kajian, deskriptif dengan pendekatan kombinasi (*mixed methode*). Pengumpulan data dilakukan dengan teknik kuesioner, terhadap 50 orang responden keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan, diskusi kelompok terarah dengan pemangku kepentingan daerah, studi dokumen, dan observasi. Hasil kajian menunjukkan, 74 persen responden menyatakan menerima komplementaritas program bantuan sosial, yaitu Program Keluarga Harapan, Beras Sejahtera, Program Indonesia Sehat, dan Program Indonesia Pintar. Sementara, 22 persen responden, menerima tiga program —Rastra, PKH, dan KIS—, dan empat persen responden lainnya menerima dua program —Rastra dan PKH—. Responden merasakan efek positif dari komplementaritas program bantuan sosial tersebut. Sungguhpun demikian, angka kemiskinan di Kabupaten Barito Kuala masih relatif tinggi, karena masih banyak dijumpai keluarga dalam kategori miskin belum dapat mengakses program bantuan sosial, karena *exclusion error* sebagai akibat data yang tidak valid. Disamping itu, keluarga dalam kategori miskin tersebut juga belum dapat mengakses kebutuhan dasar lainnya, seperti air bersih, sanitasi, dan bantuan rumah layak huni. Untuk itu disarankan, validasi data mendesak untuk dilakukan, dan urgennya penyediaan kebutuhan dasar air bersih, sanitasi, dan rumah layak huni secara lebih masif, dengan menambah kuota penerima program sesuai kebutuhan berdasarkan data keluarga miskin tervalidasi.

Kata Kunci: *kebutuhan dasar; keluarga miskin; komplementaritas bantuan sosial.*

COMPLEMENTARY SOCIAL ASSISTANCE PROGRAMS AND BASIC NEEDS OF POOR FAMILIES IN BARITO KUALA DISTRICT

SOSIO KONSEPSIA Vol.7, No.03, August 2018, page: 119-129.

Abstract

Describing the fulfillment of the basic needs of poor families through the complementarity of social assistance programs is the aim of this study. The study has conducted in Mekarsari Village and Tenggiran Baru Village, Mekarsari Sub-district, as the poorest sub-district in Barito Kuala District, which by many beneficiaries of the Hope Family Program. Type of descriptive study with mixed methods approach. Data collection was done by technique: questionnaire —50 respondents Family Beneficiaries of Hope Family Program; focus

group discussion with local poverty reduction stakeholders; document studies; and observation. The results of the study shows that 74 percent of respondents said they received the complementary social assistance program —Hope Family Program, Prosperous Rice, Healthy Indonesia Program and Smart Indonesia Program. While 22 percent of respondents received three social assistance programs, and four percent of respondents received two social assistance programs. Respondents said that they felt the positive effects of the complementarity of social assistance. Even though the poverty rate in Barito Kuala District is still relatively high, it is possible that many families in the poor and vulnerable category have not/could not access the social assistance program, due to exclusion error, as a result of the data of poor families who have not/invalid. In addition, respondents stated that other basic needs, such as water supply, sanitation, and habitable housing assistance, have not been able to access. It is therefore advisable that data validation, so that whay social assistance programs, such as clean water, sanitation, and habitable housing should be more equitable.

Keywords: basic needs; poor family; complementary of social assistance

Suradi dan B Mujiyadi (Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial)

KINERJA PENDAMPING SOSIAL PADA PROGRAM PENANGANAN KEMISKINAN DAN KELOMPOK RENTAN DI KOTA TARAKAN

SOSIO KONSEPSIA Vol.7, No.03, Agustus 2018, hal: 130-145.

Abstrak

Pendamping sosial memiliki posisi penting dan menentukan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan karena itu kinerja pendamping sosial merupakan unsur yang fundamental. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendeskripsikan kinerja pendamping sosial pada program penanganan kemiskinan dan kelompok rentan di Kota Tarakan. Data dikumpulkan dari pendamping sosial, unsur Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Kelompok Penerima Manfaat; dengan teknik wawancara dan diskusi kelompok terarah, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa pendamping sosial telah melaksanakan tugas dan peranannya, dan sudah mengembangkan jejaring kerja dengan berbagai pihak. Meskipun demikian, kinerja pendamping sosial masih pada kategori *moderate*, sehingga masih memerlukan upaya optimalisasi.

Kata kunci: pendampingan sosial, kinerja pendamping sosial, kemiskinan, kelompok rentan

SOCIAL FACILITATOR PERFORMANCE ON PROGRAM OF POVERTY ALLEVIATION AND VULNERABLE PEOPLE IN TARAKAN CITY

SOSIO KONSEPSIA Vol.7, No.03, August 2018, page: 130-145.

Abstract

Social facilitator has had an important and determine position in the implementation of social development. This study has aimed to describe social facilitator performance on facilitating social development program, epecially on poverty alleviation and vulnerable people in Tarakan Municipal area. Data has been collected through interviewing varies figures such as social facilitators, social staffs of Social Municipality, Social Care Institution, and crosschecked through interview for beneficiaries. Beyond those interviews, data has also collected through focus group discussion and documentary study. The result of study shows that social facilitators have already done by varies roles and activities and has developed a network to overcome the problems faced. However, the social faciliator performance is still in the moderate category, so the facilitator could be optimized of their performance by varies training activities for capacity building and facilitated by adequate tools on accessing their works.

Keywords: social facilitating, social facilitator performance, poverty, vulnerable people

Oman Sukmana (Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang)

PENGETAHUAN MANAJEMEN BENCANA DAN KEARIFAN SOSIAL DI KABUPATEN MALANG

SOSIO KONSEPSIA Vol.7, No.03, Agustus 2018, hal: 146-160.

Abstrak

Wilayah Indonesia merupakan kawasan rawan bencana, baik bencana alam, bencana non-alam, maupun bencana sosial. Proses manajemen bencana dilakukan melalui empat fase, yakni fase: mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan fase pemulihan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan konstruksi masyarakat tentang pengetahuan dan nilai kearifan sosial masyarakat lokal dalam proses manajemen bencana Gunung Kelud. Penelitian menggunakan pendekatan dan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan teknik analisa data menggunakan teknik deskriptif-kualitatif. Lokasi penelitian di Desa Pandansari, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, yang merupakan wilayah utama terkena dampak bencana Gunung Kelud. Subjek penelitian ditentukan secara *purposive sampling*, yang meliputi Aparat Desa Pandansari, tokoh masyarakat Desa Pandansari, dan Ketua Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB). Hasil penelitian dapat dinyatakan bahwa masyarakat memiliki pengetahuan tentang tanda-tanda alam akan terjadinya erupsi Gunung Kelud yaitu: (1) Terjadi migrasi binatang seperti monyet, ular, burung, dan sebagainya yang turun ke wilayah permukiman masyarakat, (2) Debit sumber air, seperti sumur, mata air, dan sungai kecil berkurang dan mengering, (3) Muncul awan panas dan gerah, (4) Muncul gempa-gempa kecil disertai kilat dan bunyi gelegar kecil, (5) Tumbuhan dan tanaman layu dan berubah warna, dan (6) Tokoh Tetua masyarakat bermimpi didatangi “Lembu Suro”. Sedangkan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat terhadap Gunung Kelud tercermin dalam bentuk “Ritual Sesaji Gunung Kelud” dan “Budaya Gotong Royong”.

Kata kunci: konstruksi, pengetahuan dan kearifan sosial, manajemen bencana.

DISASTER MANAGEMENT KNOWLEDGE AND SOCIAL WISDOM IN THE MALANG REGION

SOSIO KONSEPSIA Vol.7, No.03, August 2018, page: 146-160.

Abstract

Indonesia is a disaster prone area, both natural disasters, man-made disasters, and social disasters. The disaster management process is carried out through four phases, namely: mitigation, preparedness, emergency response, and recovery phases. This study aims to illustrate the community's construction of the knowledge and value of social wisdom of local communities in the Kelud Mountain disaster management process. Research approach and type using of qualitative. Data collection techniques are done through interviews, observation, and documentation, while data analysis techniques using descriptive-qualitative techniques. Research location in Pandansari Village, Ngantang District, Malang Regency, which as the main area affected by Kelud Mountain disaster. The subjects were determined by purposive sampling, which included Pandansari Village Officer, Pandansari Village Leader, and Chairman of Disaster Risk Reduction Forum. The results can be stated that in the phase of disaster mitigation, the community has knowledge of the natural signs of Kelud Mountain eruption that is: (1) The migration of animals such as monkeys, snakes, birds, and so forth that descend into the settlement area of society, (2) The discharge of water sources, such as wells, springs, and small rivers is reduced and dries up, (3) Appears hot and sultry clouds, (4) There are small earthquakes accompanied by lightning, (5) Plants withered and discolored, and (6) Chairman of Indigenous people dreamed of being visited by “Lembu Suro”. While the value of social wisdom of society to Kelud Mountain is reflected in the form of “Sesaji Gunung Kelud” rituals and “Gotong Royong” traditions.

Keywords: construction, knowledge and local wisdom, disaster management.

Mutiara Irfarinda dan Robert MZ Lawang (Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP UI)

**RASA SALING PERCAYA ANTARA PEMULUNG DAN PENGEPUL DI KABUPATEN BEKASI:
PERSPEKTIF KAPITAL SOSIAL**

SOSIO KONSEPSIA Vol.7, No.03, Agustus 2018, hal: 161-174.

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang timbulnya proses kepercayaan antara pemulung dan pengepul. Kepercayaan yang berkembang tersebut diketahui dapat membentuk kapital sosial di dalam hubungan kerja antara pemulung dan pengepul. Elemen kapital sosial selain kepercayaan juga ditemukan dalam penelitian ini, diantaranya unsur jaringan dan norma yang digunakan untuk memperlancar aktivitas jual beli antara pemulung dan pengepul. Fokus penelitian ini adalah unsur percaya antara pemulung dan pengepul dan kontribusinya unsur percaya tersebut pada kelancaran aktivitas jual beli antara pemulung dan pengepul. Rasa saling percaya antara keduanya juga dianggap penting dalam rangka meningkatkan kapital sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hubungan kerja antara pemulung dan pengepul ini besar dipengaruhi oleh rasa saling percaya. Hubungan kerja kedua aktor ini dapat langgeng selain karena mendapat mutual benefit, keduanya juga sudah memiliki rasa saling percaya. Rasa percaya yang terjadi di antara kedua aktor semakin kuat, maka dapat meningkatkan unsur jaringan dan melonggarkan unsur norma, sehingga kapital sosial dapat dikatakan meningkat.

Kata Kunci: kapital sosial, saling percaya, pemulung.

**MUTUAL TRUST BETWEEN SCAVANGERS AND COLLECTORS IN BEKASI REGION: SOCIAL
CAPITAL PERSPECTIVE**

SOSIO KONSEPSIA Vol.7, No.03, August 2018, page: 161-174.

Abstract

The objective of this study is describing the emergence of a trust process between scavengers and collectors. Trust that is growing form capital social in the working relationship between scavengers and collectors. Elements of social capital other than trust are also found in this study, including the elements of networks and norms used to facilitate buying and selling activities between scavengers and collectors. The focus of this study is the element of trust between scavengers and collectors and the contribution of these elements of trust in the smoothness of buying and selling activities between scavengers and collectors. The mutual trust between the two is also considered important in order to improve social capital. The results showed that in the working relationship between scavengers and collectors is greatly influenced by mutual trust. The working relationship of these two actors can be lasting apart from having mutual benefit, they also have mutual trust. The trust between the two actors is getting stronger, it can increase the elements of the network and loosen the elements of the norm, so that social capital would improve significantly.

Keywords: social capital, mutual trust, scavengers.

Versanudin Hekmatyar dan Fentiny Nugroho (Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP UI)

**BADAN USAHA MILIK DESA DAN PEMBANGUNAN SOSIAL DI KABUPATEN
BOJONEGORO**

SOSIO KONSEPSIA Vol.7, No.03, Agustus 2018, hal: 175-188.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Badan Usaha Milik (BUM) Desa sebagai instrumen pembangunan sosial dengan mengambil studi kasus di Desa Kedungprimpen. Data dikumpulkan dengan pendekatan kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukan. Pertama, BUMDesa sebagai unit usaha ekonomi desa bersifat kolektif antara pemerintah desa dan masyarakat desa, dimana

usaha ekonomi yang dilakukan mengandung unsur bisnis ekonomi dan bisnis sosial. Kedua, BUMDes memiliki peran penting didalam pengelolaan irigasi, dan bertanggungjawab penuh untuk melakukan pendistribusian air kesetiap lahan pertanian penduduk Desa Kedungprimpen didalam proses produksi pertanian. Ketiga, BUMDesa memiliki tanggungjawab didalam pembagian hasil usaha pengelolaan irigasi kepada lapisan terbawah di Desa Kedungprimpen. Terakhir, BUMDesa di Desa Kedungprimpen memiliki potensi yang dapat dikelola berupa tanah kas desa. Pengelolaan tanah kas desa oleh BUMDesa dapat digunakan sebagai strategi peningkatan kualitas ekonomi dan mengurangi adanya ketimpangan penduduk Desa Kedungprimpen. Hal ini dapat dilakukan dengan adanya komitmen kuat antara seluruh stakeholder untuk mendistribusikan tanah kas desa kepada golongan lapisan terbawah penduduk di Desa Kedungprimpen dengan biaya sewa terjangkau. Sebagai rekomendasi, upaya tersebut perlu dikembangkan dengan meningkatkan status kelembagaan, sumberdaya manusia, sarana prasarana, dan otoritas dari BUMDesa.

Kata Kunci: BUMDesa, Peran BUMDesa, Pembangunan Sosial.

VILLAGE OWNED ENTERPRISES AND SOCIAL DEVELOPMENT IN BOJONEGORO REGION

SOSIO KONSEPSIA Vol.7, No.03, August 2018, page: 175-188.

Abstract

The objective of this study is describing the role of BUMDesa as a social development instrument with a case study in Kedungprimpen Village. Qualitative approach was used to collect the data and descriptively presented. The results are as follows. First, BUMDesa as a village economic business unit use collective method between village government and village community, the economic effort that has been done itself contains economic and social business element. Second, BUMDesa has important role in managing the irrigation, and has fully responsible for distributing water to every farmland of Kedungprimpen villagers in the agricultural production process. Third, BUMDesa has responsibility to distribute the business result of irrigation management to the lowest layer in Kedungprimpen Village. Finally, BUMDDesa in Kedungprimpen Village has potential that can be managed, which is the form of village treasury lands. Village cash management by BUMDesa can be used as a strategy to improve quality of the economy and reducing the disparity of the people of Kedungprimpen Village. This can be done with a strong commitment among all stakeholders to distribute the village treasury lands to the lowest layer of people in Kedungprimpen Village with low rents. As a recommendation, these efforts need to be developed, by improving the status of institutional, human resources, infrastructure, and the authority of BUMDesa.

Keywords: BUMDesa, Role of BUMDesa, Social Development.

Risnandar dan Aditya Wisnu Broto (Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial RI)

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN SOSIAL NON TUNAI DI INDONESIA

SOSIO KONSEPSIA Vol.7, No.03, Agustus 2018, hal: 189-204.

Abstrak

Studi lapangan ini bertujuan untuk menggali informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui e-Warong. Adapun yang melatarbelakangi studi ini adalah keingintahuan terhadap tingkat kepuasan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program BPNT yang disalurkan melalui e-Warong, menentukan kesenjangan antara harapan KPM dengan kinerja Program BPNT untuk setiap atribut kepuasan, serta kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan e-Warong. Penentuan responden dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi menggunakan *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, artinya dalam studi ini setiap subjek yang diambil dari populasi dipilih berdasarkan pertimbangan potensi persoalan kemiskinan serta keterwakilan wilayah penyaluran BPNT. Jumlah sampel dalam studi ini dipilih sebanyak 57 responden yang meliputi penerima

manfaat, pengelola e-Warong dan Dinas Sosial di 7 Provinsi dan 12 Kota. Hasil analisis menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan yang terjadi antara kinerja yang dihasilkan dengan harapan yang seharusnya diperoleh penerima manfaat, seperti: 1) ketersediaan bahan pangan di e-Warong ($X_3 = -0.37$), 2) antrian pencairan bantuan pangan di e-Warong ($X_{17} = -0.32$), 3) proses transaksi di e-Warong yang perlu diperhatikan kembali ($X_{27} = -0.30$), 4) proses penyetokan, sarana dan prasarana e-Warong ($X_4 = -0.24$), serta 5) proses pendampingan pelaksanaan e-Warong yang perlu dilakukan secara kontinu ($X_{28} = -0.16$). Kesimpulan dari kegiatan ini bahwa secara umum program penyaluran BPNT melalui e-Warong sudah cukup progresif, efektif dan efisien serta sangat potensial dalam memberdayakan keluarga penerima manfaat secara berkelanjutan, namun masih ada hal-hal yang harus diperbaiki seperti: pemantapan proses bisnis secara komprehensif, pendampingan program secara intensif berkelanjutan, dan pembangunan jejaring kerja.

Kata Kunci: bantuan pangan non tunai, elektronik warung gotong royong (e-warong), analisis kinerja.

IMPLEMENTATION OF NON-CASH SOCIAL ASSISTANCE PROGRAM IN INDONESIA

SOSIO KONSEPSIA Vol.7, No.03, August 2018, page: 189-204.

Abstract

This study aims is to explore all the information related to the implementation of the distribution of Non-Cash Food Assistance Program through e-Warong. Point of interest in this study is to know the satisfaction level of Beneficiary Family in Non-Cash Food Assistance Program which is channeled through e-Warong, to determine the gap between beneficiary families' expectation and the performance of Non-Cash Food Program for each satisfaction attribute, and also the problem's solution which is in the process of implementing e-Warong. Determination of respondents in monitoring and evaluation activity using purposive sampling, that is sample determination technique with certain consideration, meaning in this study every subject taken from population is chosen based on consideration of potency of poverty problem and representation of area of distribution of BPNT. The number of samples in this study was selected as many as 57 respondents covering beneficiaries, managers of e-Warong and Social Services in 7 Provinces and 12 Cities. The analysis results indicates that there is still a deficiency between the program performance and the expected benefits for beneficiaries, such as: 1) foodstocks in e-Warong ($X_3 = -0.37$), 2) food aid disbursement queue in e-Warong ($X_{17} = -0.32$), 3) transaction processing in e-Warong requiring memory ($X_{27} = -0.30$), 4) e-Warong's stocking process, facilities and infrastructure ($X_4 = -0.24$), and 5) e-Warong assistancy which needs to be done continuously ($X_{28} = -0.16$). Adjustment of this study in general that the program of Non-Cash Food Submission through e-Warong is quite progressive, effective and efficient and very potential in empowering families of beneficiaries on a sustainable basis, but there are still things to choose from: intensified business process comprehensively, intensive program assistance, and networking development.

Keywords: non-cash food assistance program, e-warong, importance performance analysis.

Syamsuddin (Panti Sosial Tresna Werdha Minaula Kendari)

Kanya Eka Santi (Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI)

La Alimuddin (Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fisipol, Universitas Cendrawasih Jayapura)

KEBERFUNGSIAN SOSIAL LANJUT USIA DI PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA MINAULA DI KOTA KENDARI

SOSIO KONSEPSIA Vol.7, No.03, Agustus 2018, hal: 205-220.

Abstrak

Populasi lansia di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini adalah hasil dari pembangunan bidang kesehatan. Sayangnya, Sebagian lansia dengan kondisi miskin dan terlantar mengalami hambatan dalam melaksanakan keberfungsian sosialnya. Intervensi psikososial oleh pekerja

sosial pada lanjut usia (lansia) yang mendapatkan rehabilitasi sosial di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Minaula Kendari diharapkan dapat mengembangkan keberfungsian sosial para lansia. Kajian ini bertujuan untuk mendokumentasikan implementasi perspektif kekuatan dalam upaya meningkatkan keberfungsian sosial lansia di PSTW Minaula Kendari. Kajian deksriptif kualitatif ini melibatkan 11 orang informan lansia penerima manfaat PSTW Minaula kendari serta dua pekerja sosial dan satu pembimbing keterampilan. Data dikumpulkan menggunakan metode wawancara mendalam, pengamatan berpartisipasi dan studi dokumentasi. Data dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa dengan menerapkan perspektif kekuatan kepada lansia, terdapat beberapa bentuk keberfungsian sosial pada lansia di PSTW Minaula yakni keberfungsian dalam aspek pelestarian budaya, transfer pengetahuan (pendidik), spiritual dan keberfungsian dalam aspek transfer nilai-nilai moral kehidupan kepada generasi muda. Peran-peran yang dijalankan oleh lansia ini memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dalam rangka mencerdaskan generasi muda bukan saja secara intelektual tapi juga sosial sebagai satu tujuan berbangsa dan bernegara. Para lansia juga telah berkontribusi untuk melestarikan nilai-nilai luhur dalam satu masyarakat khususnya masyarakat Kendari.

Kata Kunci: *keberfungsian sosial, lansia, pekerja sosial.*

SOCIAL FUNCTIONING OF OLDER PEOPLE AT PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA MINAULA IN KENDARI CITY

SOSIO KONSEPSIA Vol.7, No.03, August 2018, page: 205-220.

Abstract

The Indonesian's older people population continues to growth every year. This rising is a direct result of success in health.. Unfortunately, some poor and neglected older persons have difficulty to do their social functioning. Psychosocial intervention provided by social worker for older people as beneficiaries of Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) or Retirement home "Minaula" Kendari is expected to enable improvements their social functioning. This study aims to documenting the enhancement of older people's social functioning. This descriptive qualitative study involved 11 informants as beneficiaries of PSTW Minaula Kendari, two informants as social workers, and one informant as vocational guidance. Data was collected using in-depth interview, participant observation, and study of documentation. Then, data was analyzed using qualitative analysis. The findings show, by implementing of strength perspective, there are several social functioning achievements by older people in PSTW Minaula Kendari regarding maintenance of culture, transfer of knowledge, spiritual role, and transferring of moral values to youth. The roles performed by the elderly have contributed positively to society in order to educate the young generation not only intellectually but also socially as one of the goals of nation and state. The elderly have also contributed to preserve the noble values of society, especially the people of Kendari.

Keywords: *older people, social functioning, social worker.*

KOMPLEMENTARITAS PROGRAM BANTUAN SOSIAL DAN KEBUTUHAN DASAR KELUARGA MISKIN KABUPATEN BARITO KUALA

COMPLEMENTARY SOCIAL ASSISTANCE PROGRAMS AND BASIC NEEDS OF POOR FAMILIES IN BARITO KUALA DISTRICT

Muhtar

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
Jl. Dewi Sartika No. 200 Cawang Jakarta Timur, Republik Indonesia
Email: much.ngano17@gmail.com

Diterima: 9 April 2018; Direvisi: 3 Agustus 2018; Disetujui: 8 Agustus 2018

Abstrak

Kajian ini bertujuan mendeskripsikan pemenuhan kebutuhan dasar keluarga miskin melalui komplementaritas program bantuan sosial. Kajian dilakukan di Desa Mekarsari dan Desa Tenggiran Baru Kecamatan Mekarsari, sebagai wilayah kecamatan paling banyak penduduk miskin di Kabupaten Barito Kuala. Jenis kajian, deskriptif dengan pendekatan kombinasi (*mixed methode*). Pengumpulan data dilakukan dengan teknik kuesioner, terhadap 50 orang responden keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan, diskusi kelompok terarah dengan pemangku kepentingan daerah, studi dokumen, dan observasi. Hasil kajian menunjukkan, 74 persen responden menyatakan menerima komplementaritas program bantuan sosial, yaitu Program Keluarga Harapan, Beras Sejahtera, Program Indonesia Sehat, dan Program Indonesia Pintar. Sementara, 22 persen responden, menerima tiga program —Rastra, PKH, dan KIS—, dan empat persen responden lainnya menerima dua program —Rastra dan PKH—. Responden merasakan efek positif dari komplementaritas program bantuan sosial tersebut. Sungguhpun demikian, angka kemiskinan di Kabupaten Barito Kuala masih relatif tinggi, karena masih banyak dijumpai keluarga dalam kategori miskin belum dapat mengakses program bantuan sosial, karena *exclusion error* sebagai akibat data yang tidak valid. Disamping itu, keluarga dalam kategori miskin tersebut juga belum dapat mengakses kebutuhan dasar lainnya, seperti air bersih, sanitasi, dan bantuan rumah layak huni. Untuk itu disarankan, validasi data mendesak untuk dilakukan, dan urgennya penyediaan kebutuhan dasar air bersih, sanitasi, dan rumah layak huni secara lebih masif, dengan menambah kuota penerima program sesuai kebutuhan berdasarkan data keluarga miskin tervalidasi.

Kata Kunci: kebutuhan dasar; keluarga miskin; komplementaritas bantuan sosial.

Abstract

Describing the fulfillment of the basic needs of poor families through the complementarity of social assistance programs is the aim of this study. The study has conducted in Mekarsari Village and Tenggiran Baru Village, Mekarsari Sub-district, as the poorest sub-district in Barito Kuala District, which by many beneficiaries of the Hope Family Program. Type of descriptive study with mixed methods approach. Data collection was done by technique: questionnaire —50 respondents Family Beneficiaries of Hope Family Program; focus group discussion with local poverty reduction stakeholders; document studies; and observation. The results of the study shows that 74 percent of respondents said they received the complementary social assistance program —Hope Family Program, Prosperous Rice, Healthy Indonesia Program and Smart Indonesia Program. While 22 percent of respondents received three social assistance programs, and four percent of respondents received two social assistance programs. Respondents said that they felt the positive effects of the complementarity of social assistance. Even though the poverty rate in Barito Kuala District is still relatively high, it is possible that many families in the poor and vulnerable category have not/could not access the social assistance program, due to exclusion error, as a result of the data of poor families who have not/invalid. In addition, respondents stated that other basic needs, such as water supply, sanitation, and habitable housing assistance, have not been able to access. It is therefore advisable that data validation,

so that whay social assistance programs, such as clean water, sanitation, and habitable housing should be more equitable.

Keywords: *basic needs; poor family; complementary of social assistance*

PENDAHULUAN

Menihilkan kemiskinan ekstrem merupakan salah satu prioritas dari 17 poin tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), dimana Indonesia merupakan salahsatu dari 193 negara penandatangan SDGs Bulan September 2015 di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York Amerika Serikat (<http://presidenri.go.id/pengentasan-kemiskinan/komitmenterdap-tujuan-pembangunan-berkelanjutan.html>).

Sejalan dengan dinamika penanggulangan kemiskinan pada *arasy* global tersebut, pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla (2014-2019) menjadikan penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas nasional. Jumlah penduduk miskin Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2017, berjumlah 27,77 juta orang (10,64 persen). Data tersebut akumulasi dari data penduduk miskin seluruh daerah di Indonesia, salah satunya adalah dari Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Barito Kuala menurut Kepala Dinas Sosial setempat, lebih tinggi dari data kemiskinan nasional, sekitar 40 persen atau 105.585 jiwa/32.348 KK (<https://www.rayapos.com/dinsos-wargamiskin-batola-berjumlah-105-585-jiwa/>) dari total penduduk Kabupaten Barito Kuala, yang berjumlah 298.282 jiwa, laki-laki: 149.619 jiwa, perempuan: 148.663 jiwa (BPS Batola, 2015).

Berdasarkan data tersebut, menjadi *urgent*, pemerintah Pusat dan Daerah terus melakukan upaya secara bersinergi, guna mewujudkan kehidupan yang lebih layak dan lebih bermartabat

melalui pemenuhan hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial (UU No. 11/2009). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 12 ayat 1) juga mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar yang meliputi: (i) pendidikan, (ii) kesehatan, (iii) pekerjaan umum dan penataan ruang, (iv) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (v) ketenteraman, keter-tiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan (vi) sosial.

Kemiskinan, merupakan sebuah konsep, ia mempunyai banyak pengertian, tergantung dari sisi pendekatannya. Untuk itu, pemahaman terhadap konsep kemiskinan menjadi hal esensial. Menurut Friedman (1979) kemiskinan adalah sebagai ketidaksamaan kesempatan untuk memormulasikan basis kekuasaan sosial, yang meliputi aset (tanah, perumahan, peralatan, kesehatan), sumber keuangan (pendapatan dan kredit yang memadai), organisasi sosial politik yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai kepentingan bersama, jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang atau jasa, pengetahuan dan keterampilan yang memadai, dan informasi yang berguna. Sementara, Bappenas (1993) mendefinisikan kemiskinan sebagai situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena kehendak oleh si miskin, melainkan karena keadaan yang tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang ada padanya. Faturchman dan Marcelinus Molo (1994) mendefenisikannya sebagai ketidakmampuan individu dan atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Sedangkan Ellis (1994) mendefinisikan kemiskinan sebagai gejala multidimensional yang dapat ditelaah dari dimensi ekonomi, sosial politik.

Dari beberapa batasan seperti dikemukakan, dapat dipahami bahwa kemiskinan adalah sebagai suatu situasi dan kondisi, baik yang merupakan sebagai sebab, proses maupun akibat ketidakmampuan individu, keluarga, dan/atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan pemahaman tersebut, penanggulangan kemiskinan, seperti ditegaskan dalam Undang-Undang Kesejahteraan Sosial Nomor 11 tahun 2009, pasal 19 dan 20, dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan, yang ditujukan untuk: (i) meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin, (ii) memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar, (iii) mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan, dan (d) memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.

Penanggulangan kemiskinan di Indonesia sesungguhnya telah sejak lama menjadi perhatian dan agenda utama pemerintah melalui berbagai cara dan strategi yang dilakukan. Di era reformasi misalnya, pemerintah, melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang di bentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan, telah melakukan upaya penanggulangan kemiskinan secara komprehensif. Dalam kerangka itu telah dirumuskan empat strategi utama, yaitu: (i) memperbaiki program perlindungan sosial, (ii) meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar, (iii) pemberdayaan kelompok masyarakat miskin, dan (iv) menciptakan pembangunan yang inklusif. Sistem perlindungan sosial dimaksudkan untuk membantu individu dan masyarakat menghadapi guncangan-guncangan (*shocks*) dalam hidup, seperti jatuh sakit, kematian anggota keluarga, kehilangan pekerjaan, ditimpa bencana atau bencana alam, dan sebagainya. Sistem perlindungan sosial yang efektif akan mengantisipasi agar seseorang atau masyarakat yang mengalami guncangan tidak sampai jatuh miskin. Memperbaiki akses kelompok masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar. Akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, serta pangan dan gizi akan membantu mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh kelompok masyarakat miskin. Di sisi lain peningkatan akses terhadap pelayanan dasar mendorong peningkatan investasi modal manusia (*human capital*). Dalam upaya penanggulangan kemiskinan sangat penting untuk tidak memperlakukan penduduk miskin semata-mata sebagai obyek pembangunan. Upaya untuk memberdayakan penduduk miskin perlu dilakukan agar penduduk miskin dapat berupaya keluar dari kemiskinan dan tidak jatuh kembali ke dalam kemiskinan. Pembangunan yang inklusif yang diartikan sebagai pembangunan yang mengikutsertakan dan sekaligus memberi manfaat kepada seluruh masyarakat. Partisipasi menjadi kata kunci dari seluruh pelaksanaan pembangunan.

Kemudian, di era pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, melalui kebijakan Nawa Cita, khususnya agenda *ketiga* (membangun Indonesia dari pinggiran dengan

memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan), agenda *kelima* (meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui Program Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera), dan agenda *kesembilan* (memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia) terkait erat dengan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Melalui kebijakan Nawa Cita tersebut pemerintahan saat ini melanjutkan dan memantapkan kebijakan pemerintahan sebelumnya dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang secara prinsip pemerintah menyelenggarakan program perlindungan sosial guna mempercepat penanggulangan kemiskinan. Program perlindungan sosial dimaksud meliputi: (i) Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS); (ii) Program Indonesia Sehat (PIS); dan (iii) Program Indonesia Pintar (PIP).

Komitmen pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan fokus pada perbaikan bantuan tepat sasaran, seperti KIS, KIP, bantuan pangan nontunai dan Program Keluarga Harapan (Kompas, 10 Jan. 2018). Sejalan dengan komitmen itu, berbagai persiapan terus dimaksimalkan Kementerian Sosial guna memastikan perluasan bantuan sosial PKH, bantuan sosial pangan, dan bantuan pangan nontunai kepada 10 juta KPM pada 2018. Menurut Menteri Sosial, persiapan yang dilakukan antara lain *cleaning* dan validasi calon penerima manfaat yang bersumber dari BDT 2015 oleh Kementerian Sosial. Adapun penyiapan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Buku Tabungan, personalisasi KKS, isi rekening dan distribusi, dan aktivasi KKS dilakukan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) (Republika, 18 Desb. 2017).

Berdasarkan kebijakan sebagaimana dikemukakan, terlihat jelas, betapa perlindung-

an sosial bagi keluarga miskin, menjadi agenda penting pemerintah, dengan diselenggarakannya program bantuan sosial secara komplementaritas dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar keluarga miskin, yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara terpadu, dan keberlanjutan antar para pemangku kepentingan, baik pusat maupun daerah.

Kebutuhan dasar bagi keluarga miskin seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial. Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2012, sebagai penjabaran dari Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tersebut, kebutuhan dasar dimaksud adalah kebutuhan manusia yang meliputi air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, kesehatan, psikososial, penampungan dan tempat hunian. Dalam konteks kajian ini kebutuhan dasar dimaksud adalah kebutuhan pangan, perumahan, kesehatan, dan pendidikan.

Pemenuhan kebutuhan dasar keluarga miskin dalam kerangka perlindungan sosial dilaksanakan melalui komplementaritas program bantuan sosial. Komplementaritas adalah berbagai kegiatan yang dilakukan secara baik dan bersama-sama, agar masing-masing dapat menghasilkan nilai yang tinggi (Kremer dalam Supiandi, 2014). Istilah komplementaritas tersebut dikembangkan oleh Kementerian Sosial guna memaksimalkan bantuan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dengan bantuan sosial dan program subsidi lainnya untuk percepatan penanganan kemiskinan di Indonesia. PKH merupakan salah satu program untuk mempercepat pemerataan dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Menurut Menteri Sosial, penerima PKH seharusnya juga menerima BPNT atau Rastra, anak mereka menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP), Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), Kartu Indonesia Sehat (KIS),

subsidi listrik dan bantuan pemberdayaan berupa e-Warong KUBE-PKH. Jika mereka menerima secara komprehensif diharapkan maksimal lima tahun mandiri. Jika mereka menerima program e-Warong KUBE-PKH diharapkan dua tahun mandiri. Dengan adanya komplementaritas bantuan sosial kepada KPM, akan memberikan daya ungkit dan manfaat untuk meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan bagi KPM (Biro Humas Kemensos, 2017).

Hal tersebut juga ditegaskan di dalam pedoman pelaksanaan PKH (2016), bahwa PKH sebagai program perlindungan sosial berfokus pada perbaikan kualitas hidup dasar masyarakat miskin, menjadi dasar penargetan program-program jaminan dan perlindungan sosial lainnya, antara lain: (i) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), PKH-Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN mendapat layanan kesehatan; (ii) Beras Sejahtera (Rastra), PKH-Rastra menda-pat 15 Kg per bulan, Rp. 1600,- per bulan; (iii) Program Indonesia Pintar (PIP), PKH-KIP (Kartu Indonesia Pintar) 6-21 tahun. Dengan demikian perlindungan sosial melalui komplementaritas program bantuan sosial dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi keluarga miskin menjadi keputusan tepat pemerintah dalam kerangka percepatan penanggulangan kemiskinan.

Kajian ini mendeskripsikan komplementaritas program bantuan sosial dan dampaknya dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar keluarga miskin di Desa Tenggiran Baru dan Desa Mekarsari Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala.

METODE

Jenis kajian ini deskriptif dengan pendekatan kombinasi (*mixed methode*), yakni sebagai metode penelitian yang dicirikan dengan pengumpulan data kuantitatif pada tahap pertama, dan kemudian diikuti dengan pengumpulan dan

analisis data kualitatif pada tahap kedua, guna memperkuat hasil penelitian kuantitatif yang dilakukan pada tahap pertama (Creswell, 2009). Sasaran kajian adalah keluarga penerima manfaat (KPM) PKH sebanyak 50 orang di dua desa, yaitu Desa Mekarsari dan Desa Tenggiran Baru. Pengumpulan data dilakukan selama empat hari efektif Bulan November 2017 melalui kuesioner, yang kemudian diperkaya dengan diskusi kelompok terarah (*focus group discussions/FGD*) dengan para pemangku kepentingan daerah (OPD terkait penang-gulangan kemiskinan). Disamping itu, juga dilakukan observasi dan studi dokumen dengan memanfaatkan data sekunder, termasuk *browshing* internet untuk memperoleh bahan-bahan yang dinilai relevan.

Data kuantitatif dianalisis secara deskriptif dengan bantuan SPSS. Sedangkan data kualitatif dianalisis melalui proses mencari dan menyusun secara sistimatis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi umum Lokasi

Kabupaten Barito Kuala, dengan ibukota Marabahan, secara geografis terletak di paling barat Provinsi Kalimantan Selatan. Batas-batas wilayahnya dengan daerah di sekitarnya. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tapin, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin, sedangkan pada sebelah barat berbatasan

dengan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten Barito Kuala terdiri dari 17 wilayah kecamatan (195 desa, 6 kelurahan –BPS Batola, 2014), diapit oleh dua buah sungai besar yaitu Sungai Barito dan Sungai Kapuas, hal itu berpengaruh terhadap tata air di wilayah Kabupaten Barito Kuala. Disamping itu, terdapat pula tiga buah terusan (anjir) buatan yang menghubungkan Sungai Barito dan Sungai Kapuas, yaitu Anjir Talaran, Anjir Serapat dan Anjir Tamban. Keadaan hidrologi ini sangat dipengaruhi oleh curah hujan dan *present land use* baik di daerah ini maupun di bagian hulu. Dalam musim hujan pada waktu pasang air Sungai Barito dapat membanjiri sebagian besar wilayah ini dan mengakibatkan permukaan tanah tergenang terus menerus. Kapasitas pengairan alam melalui anak-anak sungai kecil sehingga terbentuk tanah rawa (<https://bappeda.baritokualakab.go.id/index.php/selayang-pan-dang/geografis>).

Secara demografis berdasarkan data BPS Batola (2015) bahwa jumlah penduduk Kabupaten Barito Kuala sebanyak 298.282 jiwa (laki-laki 149.619 jiwa, dan perempuan 148.663 jiwa). Kemudian, berdasarkan validasi data Badan Pusat Statistik (BPS), orang miskin di wilayah Kabupaten Batola berjumlah 105.585 jiwa atau 32.348 KK (40 persen). Sementara, yang mendapatkan kesesuaian kesehatan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial (2017), yang mendapatkan kartu BPJS sebanyak 81.199 jiwa dan keluarga pra sejahtera sebanyak 14.500 KK. Khusus penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 6.342 keluarga penerima manfaat (Bag. Pendahuluan).

Atas dasar itu, permasalahan sosial utama penduduk Kabupaten Barito Kula khususnya warga Desa Mekarsari dan Desa Tenggiran Baru adalah kemiskinan.

Hal itu antara lain terbatasnya aksesibilitas terhadap air bersih dan sanitasi sebagai salah satu kebutuhan dasar. Untuk itu, dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar, mereka mendayagunakan air yang ada.



Gambar 1: Sumber air bersih & MCK KPM di Desa Mekarsari

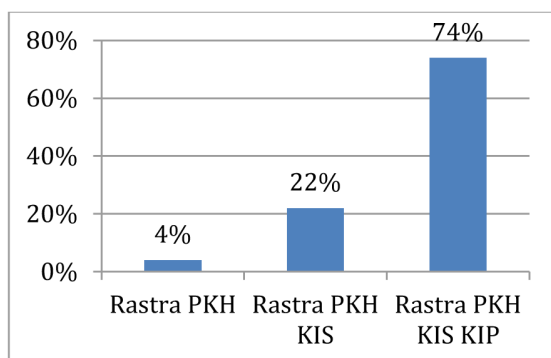
Sumber: Hasil kajian, 2017.

2. Komplementaritas Program Bantuan Sosial Keluarga Miskin

Menyadari bahwa kemiskinan merupakan permasalahan sosial utama di Kabupaten Barito Kuala, pemerintah baik dengan dukungan APBD, maupun dukungan APBN, telah melakukan berbagai upaya penanggulangan kemiskinan tersebut, antara lain diselenggarakan program Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) berupa Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan Gerakan Pembangunan Masyarakat dalam Pengentasan Kemiskinan (Gerbangmas-Taskin), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri sejak tahun 2007. Kemudian, juga telah diselenggarakan program-program bantuan sosial lainnya, seperti beras bersubsidi bagi keluarga berpenghasilan rendah melalui Raskin (Rastra), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Sehat melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan tersebut dalam kerangka memenuhi hak-hak sosial masyarakat melalui penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan sosial, serta terkendalinya pertumbuhan penduduk untuk membentuk keluarga kecil bahagia.

Seperti dikemukakan bahwa pemerintah, dalam hal ini Kementerian Sosial, melalui Program Keluarga Harapan (PKH) memaksimalkan program bantuan sosial (komplementaritas) bagi keluarga miskin dengan bantuan sosial dan program subsidi lainnya dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Dengan komplementaritas program bantuan sosial bagi keluarga miskin, akan memberikan daya ungkit dan manfaat untuk meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan bagi keluarga miskin tersebut. Terkait komplementaritas program bantuan sosial khususnya di Desa Tenggiran Baru dan Desa Mekarsari, dari hasil kajian cepat menunjukkan, 74 persen dari 50 responden menyatakan menerima empat program bantuan sosial, yaitu PKH, Rastra, KIS dan KIP, 22 persen menerima tiga program, yaitu Rastra, PKH, dan KIS, serta empat persen lainnya menerima dua program, yaitu Rastra dan PKH (Grafik 1).



Grafik 1: Komplementaritas Program Bansos Keluarga Miskin

Sumber: Hasil kajian, 2017.

Data tersebut menunjukkan bahwa keluarga miskin khususnya di Desa Mekarsari dan Desa Tenggiran Baru, Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala telah menerima bantuan sosial secara komplementaritas. Namun, masih (banyak) dijumpai, keluarga yang sejatinya termasuk kategori miskin, tetapi tidak dapat mengakses (menerima) program (Pernyataan keluarga miskin-LH, Nov. 2017).

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa penerima PKH di Kabupaten Barito Kuala, lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin yang ada. Dengan demikian masih banyak terdapat penduduk dalam kategori tidak mampu (miskin), namun tidak menerima program bantuan sosial, khususnya yang diselenggarakan oleh pemerintah karena *exclusion error* keluarga miskin yang semestinya layak menerima program bantuan sosial, tetapi tidak mendapatkannya. Kenyataan empirik tersebut menunjukkan, validitas data sebagai dasar pemberian pelayanan bagi keluarga miskin masih menyisakan masalah.

Ketidaktepatan sasaran penerima bantuan sosial (keluarga miskin) sesungguhnya cerita lama yang terus berulang. Survey AKN/ Sakernas (2011) misalnya, telah menunjukkan, tidak sedikit keluarga miskin tidak menerima manfaat dari program bantuan sosial. Sebagai gambaran, sekitar 65 persen penduduk berusia tua di daerah perdesaan tidak memiliki asuransi kesehatan. Tingginya angka *exclusion error* berpengaruh pada efektivitas program sekaligus menunjukkan adanya persoalan yang perlu diperbaiki pada basis data sebagai sasaran, desain dan mekanisme program.

Exclusion error juga masih terjadi saat dilakukan kajian ini (2017), meskipun data

penerima program bantuan sosial sudah dimu-takhirkan (PBDT 2015). Hal itu terungkap dari penuturan salah satu keluarga miskin di Desa Tenggiran Baru berikut:

Pak, mengapa saya tidak dapat bantuan seperti tetangga ya pak... saya tidak beda dengan mereka pak, suami kerja serabutan, kalau ada yang nyuruh, saya juga begitu. Saya juga ada anak sekolah: SD, SMP. Mereka dapat bantu-an beras, PKH, juga kartu ... (peneliti: KIS, KIP). Koq saya tidak dapat pak... Saya warga sini ... mengapa pak ... (peneliti: ekspresi kecewa warga yang mengadu tersebut) (LH, Nov. 2017).

Informasi tersebut secara jelas menggambarkan bahwa data penerima program bantuan sosial penting untuk divalidasi, sungguhpun data tersebut hasil pemutakhiran basis data terpadu (PBDT) tahun 2015, masih banyak terjadi, keluarga yang semestinya menerima program bantuan sosial seperti Rastra dan PKH, tetapi tidak mendapatkannya (*exclusion error*). Demikian halnya terjadi sebaliknya, yakni *inclusion error*—dimana keluarga yang semestinya tidak berhak menerima program bantuan sosial, malah menerimanya—. Hal itu sejalan dengan pernyataan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial bahwa masih terlihat permasalahan dalam program penanganan fakir miskin, seperti lebih dari 20 program yang diluncurkan, namun belum semua program menggunakan basis data yang sama dalam penetapan sasaran; melibatkan banyak pihak, dimana setiap institusi pemerintah memiliki program masing-masing yang belum tentu bersinergi satu dengan yang lainnya, misalnya: (i) banyak rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang tidak menerima Rastra sesuai jatahnya (15 kg); (ii) program PKH baru tahun 2015

memasukkan anak SMA; (iii) indeks total bantuan yang diterima relatif kecil dan sulit mengukur efektifitas program, karena target yang berbeda. Kondisi tersebut ditambah belum optimalnya keterlibatan dan tanggungjawab pemerintah daerah (Ditjen. PFM Kemensos, 2016).

Kondisi tersebut juga senada dengan kondisi di lapangan, dari penuturan salah satu peserta FGD berikut:

Penerima bantuan program sosial adalah keluarga miskin berdasarkan PBDT 2015. Tetapi, masih banyak terjadi, keluarga miskin yang seharusnya memperoleh bantuan, malah tidak memperolehnya, dan demikian sebaliknya. Padahal, waktu pemutakhiran data, keluarga miskin yang sebelumnya tidak masuk data, sudah diusulkan ke petugas pemutakhiran data (BPS). Ketika data turun, yang muncul ya data sebelum di perbarui tadi. Ini dimana salahnya dan siapa yang melakukan kesalahan, kami tidak tahu (FS, Nov. 2017).

3. Dampak Komplementaritas Program Bansos Keluarga Miskin

Meskipun kenyataan di lapangan masih menyisakan sejumlah persoalan khususnya terkait validitas data, namun efek positif bantuan sosial khususnya PKH sebagai titik tolak penargetan komplementaritas program bantuan sosial, dari hasil kajian cepat (2017) menunjukkan, pada aspek pendidikan, 56 persen anak-anak KPM rajin sekolah dan 44 persen lainnya dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sementara itu, pada aspek kesehatan, 28 keluarga KPM dalam kondisi sehat selalu, dan 72 persen menyatakan mudah mengakses layanan kesehatan.

Data tersebut sejalan dengan hasil evaluasi Bank Dunia dan TNP2K (2015)

yang menunjukkan, dampak PKH dari aspek: (i) konsumsi keluarga, meningkatkan konsumsi KPM sebesar 4,8 persen dan kenaikan konsumsi per kapita 5-10 persen serta kenaikan belanja pangan untuk protein $\pm$ 6,8 persen; (ii) partisipasi sekolah, meningkatnya angka partisipasi sekolah SD 1,8 persen, SMP 9,5 persen dan mendorong akses pendidikan kepada layanan SD, SMP dan SMA. Selain itu terdapat kenaikan persentase anak yang melanjutkan ke pendidikan menengah 8,8 persen serta berdampak pada penurunan jumlah pekerja anak; (iii) meningkatnya kunjungan penerima manfaat pada pelayanan prenatal sebesar 7 persen, pemantauan tumbuh kembang anak sebesar 22 persen, kenaikan imunisasi lengkap 8 persen dan menurunnya penderita kerdil berat 2,7 persen (Societa, Edisi II 2017).

Demikian halnya hasil penelitian Togiartua (et.al, 2012) menyimpulkan bahwa PKH berdampak positif bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM). Terdapat perbedaan signifikan antara kondisi sebelum dan sesudah khususnya dalam indikator bidang pendidikan dan kesehatan. Namun, belum cukup berdampak positif terhadap status sosial ekonomi RTSM. Untuk itu Togiartua dkk. memberikan beberapa rekomendasi, salah satunya adalah penataan ulang (*redesign*) dengan mengadakan intervensi khusus bidang sosial ekonomi keluarga RTSM.

Berdasarkan hasil kajian cepat (2017), evaluasi Bank Dunia dan TNP2K (2015), serta hasil penelitian Togiartua (et.al, 2012), secara jelas menggambarkan efek positif program bantuan sosial melalui PKH sebagai dasar penargetan komplementaritas khususnya aspek kesehatan dan pendidikan bagi penerima manfaat PKH di Kabupaten

Barito Kuala khususnya bagi 6.342 penerima PKH (Bag. Pendahuluan). Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa komplementaritas program bantuan sosial mempunyai efek positif bagi pemenuhan kebutuhan dasar pangan, kesehatan, dan pendidikan keluarga miskin. Akan tetapi, tidak serta merta akan terjadi peningkatan secara otomatis seperti diharapkan. Seringkali dilupakan kebanyakan orang adalah mengubah *mindset* penerima manfaat (KPM). Unsur penting terkait perubahan *mindset* KPM adalah peran pendamping sosial, di mana saat ini penyelenggara PKH Direktorat Jenderal Perlindungan Sosial Kementerian Sosial R.I. sedang mengembangkan pelatihan *family development session* (FDS) bagi pendamping PKH terkait perubahan *mindset* KPM.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan seperti dikemukakan dapat disimpulkan bahwa sebagian besar keluarga miskin di Desa Tenggiran Baru dan Desa Mekarsari telah menerima program bantuan sosial secara komplementaritas, sekurangnya keluarga miskin pada dua desa tersebut menerima dua program, yaitu Rastra dan PKH, dan mayoritas menerima Rastra, PKH, KIS, dan KIP. Efek positif dari penerimaan program bantuan sosial secara komplementaritas tersebut adalah dari sisi pendidikan, anak-anak keluarga miskin bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Kemudian, dari aspek kesehatan, keluarga penerima program merasa menjadi lebih sehat.

Sungguhpun demikian, masih banyak keluarga miskin khususnya di Desa Mekarsari dan Tenggiran Baru dan umumnya di Kabupaten Barito Kuala yang belum dapat mengakses program bantuan sosial, sebagai akibat dari belum/tidak validnya data, yang

pada akhirnya berdampak pada masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Barito Kuala.

SARAN

Berdasarkan simpulan tersebut bahwa meskipun komplementaritas program bantuan sosial (pangan, kesehatan, dan pendidikan) bagi keluarga miskin sudah terimplementasikan, demikian halnya efek positifnya juga sudah dirasakan oleh penerima manfaat, namun, validasi data *urgent* untuk dilakukan, agar penerima program bantuan sosial, dapat lebih tepat sasaran. Kemudian, dari sisi kuota program bantuan sosial khususnya PKH, perlu di tambah, dan kebutuhan dasar lainnya, seperti air bersih, sanitasi, dan bantuan rumah layak huni, perlu lebih banyak dan masif disediakan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan dimuatnya naskah tulisan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada kolega khususnya Pak Muhammad Syawie sebagai anggota Tim Kajian Cepat Komplementaritas Bantuan Sosial di Kabupaten Barito Kuala. Segala konsekuensi dari dimuatnya naskah pada Majalah Sosiokonsepsia menjadi tanggung jawab penulis. Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala yang memfasilitasi bagi terselenggaranya diskusi kelompok terarah dengan pemangku kepentingan di Kabupaten Barito Kuala. Tidak terkecuali, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada Kepala Puslitbangkesos sebagai penanggung jawab kegiatan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Bappenas. (1993). Panduan Program Inpres Desa Tertinggal. Jakarta.

BPS. (2017). Penduduk Miskin Indonesia 10,64 Persen 2017. [http://www.industry.co.id/read/12219/bps-penduduk-miskin-](http://www.industry.co.id/read/12219/bps-penduduk-miskin-indonesia-1064-persen-2017)

indonesia-1064-persen-2017. Diakses 2 Januari 2018.

----- Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), 2011. <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/dasar/pdf?kd=5&th=2011>

Dinsos (2017). Warga miskin Batola berjumlah 105.585 jiwa. <https://www.rayapos.com/dinsos-warga-miskin-batola-berjumlah-105-585-jiwa/>. Diakses 4 Januari 2018.

Ellis, G.F.R. (1984). *The Demotion Of Poverty*. Social Indicator Research.

Friedman, J. (1992). *Empowerment: Politics of Allternation Development*, Massachusetts. Blackwell Publisher.

Faturrochman, Marcellius M. (1994). *Karakteristik Rumah Tangga Miskin*. Populasi, Volume 5, Nomor 1, Tahun 1994.

Dulung, A.Z.A. (2016). *Komplementaritas Program Penanganan Fakir Miskin untuk Mendukung PKH*. Ditjen. PFM.

Peraturan Presiden R.I. Nomor 15 Tahun 2010 tentang Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Peraturan Presiden RI. Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Kementerian Sosial R.I. (2016). Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Jakarta: Dit. Jamsos.

----- (2017). Menuju 10 Juta KPM. Jakarta: Biro Humas.

Komitmen terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. <http://presidenri.go.id/pengentasan-kemiskinan/komitmen->

- terhadap-tujuan-pembangunan-berkelanjutan.html. Diakses 2 Januari 2018.
- Kompas. *Target Angka Kemiskinan di Bawah 10 Persen*. 10 Jan. 2018.
- Muhtar, Syawie, M. (2017). *Komplementaritas Program Bantuan Sosial dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar Keluarga Penerima Manfaat*. Jakarta: Puslitbangkesos (tidak dipublikasikan).
- Nainggolan, T., Sutaat, Sitepu, A., Padmi, T.A., Muhtar, Irmayani, Hutapea B. (2012). *Program Keluarga Harapan di Indonesia: Dampak pada Rumah Tangga Sangat Miskin di Tujuh Provinsi*. Jakarta: Puslitbangkesos.
- Nawa Cita, 9 Agenda Prioritas Jokowi-JK. <http://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.Nawa.Cita.9.Agenda.Prioritas.Jokowi-JK>. Diakses 4 Jan. 2018.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. (2014). *Buku I Agenda Pembangunan Nasional*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Republika. *Persiapan Bansos dimaksimalkan*. 18 Desember 2017.
- Supiandi, (2014). Summary: Michael P. Todaro and Stephen C. Smith. *Economic Development*, 11th Edition, Ch.4.
- Selayang Pandang Batola. (<https://bappeda.baritokualakab.go.id/index.php/selayang-pandang/geografis>).
- Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
- Undang-Undang R.I. Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.
- Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

KINERJA PENDAMPING SOSIAL PADA PROGRAM PENANGANAN KEMISKINAN DAN KELOMPOK RENTAN DI KOTA TARAKAN

SOCIAL FACILITATOR PERFORMANCE ON PROGRAM OF POVERTY ALLEVIATION AND VULNERABLE PEOPLE IN TARAkan CITY

Suradi dan B Mujiyadi

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
Jln. Dewi Sartika No. 200, Cawang III, Jakarta Timur, Telp. 021-8017146.
E-mail: mas.soeradi@yahoo.co.id

Diterima: 31 Mei 2018; Direvisi: 31 Juli 2018; Disetujui: 8 Agustus 2018

Abstrak

Pendamping sosial memiliki posisi penting dan menentukan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan karena itu kinerja pendamping sosial merupakan unsur yang fundamental. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendeskripsikan kinerja pendamping sosial pada program penanganan kemiskinan dan kelompok rentan di Kota Tarakan. Data dikumpulkan dari pendamping sosial, unsur Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Kelompok Penerima Manfaat; dengan teknik wawancara dan diskusi kelompok terarah, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa pendamping sosial telah melaksanakan tugas dan peranannya, dan sudah mengembangkan jejaring kerja dengan berbagai pihak. Meskipun demikian, kinerja pendamping sosial masih pada kategori *moderate*, sehingga masih memerlukan upaya optimalisasi.

Kata kunci: *pendampingan sosial, kinerja pendamping sosial, kemiskinan, kelompok rentan*

Abstract

Social facilitator has had an important and determine position in the implementation of social development. This study has aimed to describe social facilitator performance on facilitating social development program, epecially on poverty alleviation and vulnerable people in Tarakan Municipal area. Data has been collected through interviewing varies figures such as social facilitators, social staffs of Social Municipality, Social Care Institution, and crosschecked through interview for beneficiaries. Beyond those interviews, data has also collected through focus group discussion and documentary study. The result of study shows that social facilitators have already done by varies roles and activities and has developed a network to overcome the problems faced. However, the social faciliator performance is still in the moderate category, so the facilitator could be optimized of their performance by varies training activities for capacity building and facilitated by adequate tools on accessing their works.

Keywords: *social facilitating, social facilitator performance, poverty, vulnerable people*

PENDAHULUAN

Program kesejahteraan sosial dilaksanakan dalam usaha membantu mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial yang dihadapi oleh masyarakat yang kurang beruntung. Kementerian Sosial RI menggunakan istilah Kelompok Penerima Manfaat (KPM) pada masyarakat kurang beruntung yang ditetapkan sebagai penerima program. Karakteristik umum KPM adalah mereka yang mengalami keterbatasan secara sosial, ekonomi, intelektual dan emosional. Perbedaan persepsi pada KPM tersebut menyebabkan mereka kesulitan untuk memahami dengan baik maksud dan tujuan program kesejahteraan sosial. Sehubungan dengan itu, maka diperlukan pendampingan sosial pada program-program kesejahteraan sosial (Ningrum, 2017; Wulandari, 2017; Hendrikus, 2016; Huda, Anggraini dan Sutyono, 2013).

Kementerian Sosial RI mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial. Pada Permensos tersebut disebutkan, bahwa sumber daya manusia kesejahteraan sosial dibedakan menjadi: Pekerja Sosial, Penyuluh Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) dan Relawan Sosial. Pendamping sosial adalah salah satu TKS dari unsur masyarakat (lihat PP No 39/2012; Permensos No 16/2017).

Pengertian pendamping sosial pada setiap program dalam rumusan yang sedikit berbeda. Meskipun demikian, secara umum pendamping sosial adalah seseorang yang memenuhi kualifikasi dan memiliki kapasitas tertentu, serta menerima tugas untuk melakukan pendampingan sosial pada program-program Kementerian Sosial (lihat Susantyo, 2016).

Adapun tugas pendamping sosial adalah memfasilitasi akses kepada sistem

layanan (pendidikan, kesehatan, perumahan, permodalan dan layanan sosial lainnya; meningkatkan kapasitas KPM terkiat dengan perubahan perilaku, pola pikir dan komitmen; melakukan mediasi, fasilitasi dan advokasi untuk mendapatkan pelayanan sosial dasar (lihat Susantyo, 2016).

Pendamping sosial tersebar pada 14 program kesejahteraan sosial, yang antara lain pada: Program Keluarga Harapan, Program Penanganan Fakir Miskin, Program Asistensi Sosial Lanjut Usia, Program Kesejahteraan Sosial Anak, dan Program Asistensi Sosial Orang Dengan Kecacatan (Permensos No 16/2017).

Pendamping sosial pada program penanganan kemiskinan dan kelompok rentan memiliki peran yang sangat strategis. Mereka memainkan berbagai peranan penting yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas Kelompok Penerima Manfaat (KPM), sehingga mereka berdaya untuk mengatasi masalahnya sendiri, dan melaksanakan tugas-tugas kehidupan mereka. Oleh karena itu, kehadiran pendamping sosial sangat ditunggu-tunggu oleh KPM (Susantyo, et.al, 2018; Rahmawati, 2017; Rohman, 2017; Irmayani.et.al, 2016; Zuhri, 2014; Widyakusuma, 2013).

Pada sisi lain, pendamping sosial masih menghadapi berbagai permasalahan ketika melaksanakan pendampingan. Permasalahan dimaksud, terkait dengan jumlah, penempatan, fasilitas pendukung (Irmayani, 2016); kegiatan pemutakhiran data KPM (Rahmawati, 2017; Zuhri, 2014); terbatasnya sarana prasarana (Susantyo.et.al, 2018; Rohman, 2017); dan jumlah honor yang diterima belum layak, belum meratanya kesempatan pendidikan dan pelatihan (Widyakusuma, 2013). Permasalahan tersebut memerlukan solusi segera, agar pendamping sosial mampu melaksanakan tugasnya secara optimal.

Penelitian yang membahas kinerja pendampingan sosial sudah banyak dilakukan, dan dapat diakses pada publikasi nasional (Suryani dan Purnama, 2017; Widyakusuma, 2013; Alamin, 2010). Namun demikian, sebagian besar locus penelitian tersebut masih terbatas pada tingkat lokal atau di kabupaten/kota tertentu; dan sepengetahuan peneliti di Kota Tarakan belum dilakukan penelitian. Oleh karena itu, penelitian dengan mengangkat permasalahan kinerja pendamping sosial pada program penanganan kemiskinan dan kelompok rentan di Kota Tarakan ini penting untuk dilaksanakan.

Kinerja didefinisikan sebagai perilaku seseorang yang ditampilkan pada saat melaksanakan pekerjaan (Jex in Berghe, 2011); dan hasil kerja seseorang (Hersen in Berghe, 2011); serta komitmen untuk melaksanakan pekerjaan (Fogaca, et.al, 2018). Kinerja ini didasarkan pada tahapan tindakan logis, dimulai dengan niat dan terus sampai pada hasil yang dicapai (Bourguignon in Dobrin, et.al, 2012).

Menurut Campbell (Koopmans, 2011), ada delapan dimensi kinerja: (1) kemampuan melaksanakan tugas tugas spesifik, (2) kemampuan melaksanakan tugas non-spesifik, (3) komunikasi tertulis dan lisan, (4) menunjukkan usaha, (5) mempertahankan disiplin pribadi, (6) memfasilitasi kinerja rekan dan tim, (7) pengawasan, dan (8) manajemen dan administrasi.

Mengingat luasnya ruang lingkup kinerja pendamping sosial, maka pada penelitian ini, difokuskan pada bagaimana kegiatan dan peran, jaringan kerja/kemitraan dan permasalahan dalam pendampingan sosial.

Untuk menjawab permasalahan penelitian tersebut, maka tujuan penelitian ini untuk menjelaskan kinerja pendamping sosial pada

penerapan program penanganan kemiskinan dan kelompok rentan di Kota Tarakan dengan teknik penulisan deskripsi.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoretis maupun praktis, dalam meningkatkan kinerja pendamping pada program penanganan kemiskinan dan kelompok rentan.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif dan teknik penulisan deskriptif. Penelitian dilakukan dalam upaya Menggambarkan secara mendalam dengan teknik penulisan Pada penelitian ini, pendamping sosial tidak dilihat secara khusus pada *setting* program, dan oleh karena itu pembahasan penelitian berlaku untuk semua pendamping sosial yang menjadi subyek penelitian.

Penelitian dilaksanakan tahun 2018. Pada penelitian ini diwawancarai 10 orang pendamping sosial dari 5 (lima) program kesejahteraan sosial, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 4 orang, Penanganan Fakir Miskin (PFM) sebanyak 1 orang, Asistensi Sosial Lanjut Usia (ASLUT) sebanyak 2 orang, Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) sebanyak 2 orang, dan Asistensi Sosial Orang Dengan Kecacaa (ASODK) sebanyak 1 orang. Profil pendamping tersebut akan dideskripsikan pada pembahasan selanjutnya. Penetapan informan didasarkan pada data yang tersedia di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, dengan pertimbangan mereka melakukan pendampingan secara aktif pada 12 bulan terakhir.

Selain pendamping sosial, wawancara dilakukan pula dengan unsur instansi sosial Kota Tarakan selaku pembina fungsional pendamping sosial. Untuk mendalami informasi

terkait dengan pendampingan sosial, dilakukan diskusi kelompok terarah dengan pendamping sosial, unsur Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos dan PM) Kota Tarakan, LKS dan KPM. Peneliti juga melakukan studi doku mentasi dengan mempelajari laporan tertulis pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, maupun laporan yang dibuat oleh pendamping sosial. Studi dokumen tersebut dilakukan untuk memperoleh informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan t menggambarkan kinerja pendamping sosial.

Informasi yang dihimpun dari lapangan dikompilasi, dan dikategorisasi berdasarkan tujuan penelitian, dan sumber data. Kategorisasi data mencakup: karakteristik pendamping sosial, kegiatan/kinerja dan peran pendamping, jaringan kerja / kemitraan dalam pendampingan sosial dan permasalahan dalam pendampingan. Keempat komponen tersebut akan menjadi fokus analisis dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Umum Kota Tarakan

Kota Tarakan adalah sebuah kota di Kalimantan Utara, dan juga merupakan kota terbesar di Kalimantan Utara, sekaligus kota terkaya ke-17 di Indonesia. Kota ini memiliki luas wilayah 250,80 km². Kota Tarakan terpisah dari daratan Kalimantan, sehingga menyebabkan biaya logistik ke kota ini relatif mahal karena menggunakan sarana transportasi air. Kota Tarakan secara administratif sebelah utara berbatasan dengan Pantai Kec. P. Bunyu, selatan dengan Pesisir Panti Kec. Tanjanung Palas, barat dengan Pesisir panti Kec. Sesayap dan timur dengan Kec. Pulau Bunyu dan Laut Sulawesi. Kota ini dihuni penduduk sebanyak 641.936 jiwa, dengan rincian laki-laki berjumlah 340.811 jiwa dan perempuan berjumlah 301.125 jiwa (BPS Kota Tarakan, 2015).

Penduduk asli Kota Tarakan adalah suku asli Tidung. Dalam perkembangannya Kota Tarakan dihuni pula oleh suku-suku lain seperti, Suku Dayak, Banjar, Jawa, Bugis, Batak, Toraja, Tionghoa, dan lain-lain. Pemeluk agama terbesar adalah Islam disamping Kristen Protestan, Budha, Katolik dan Hindu. Masyarakat dengan berbagai macam suku dengan berbagai agama yang dianut tersebut hidup rukun dan saling menghormati. Ketika terjadi konflik sosial antara mereka, dapat diselesaikan secara damai (BPS Kota Tarakan, 2015).

Permasalahan sosial yang dihadapi Kota Tarakan adalah kemiskinan sebesar 5,17 persen atau berkisar 3.318.809 jiwa; angka pengguran sebesar 7.09 persen, rata-rata lama sekolah 9.50 tahun. Fenoma yang menarik, bahwa angka harapan hidup penduduk Kota Tarakan termasuk kategori tinggi, yaitu 72,19 tahun (BPS Kota Tarakan, 2015).

2. Karakteristik Pendamping Sosial

Pengenalan sosok pendamping dilihat dari pendidikan, pengalaman kerja dan bimbingan teknis (bintek) yang pernah diikuti, asal daerah, awal menjadi pendamping, insentif dan honorarium, peralatan kerja. Komponen-komponen tersebut dipandang perlu untuk dilihat, karena berkaitan langsung dan menentukan pelaksanaan pendampingan.

Pendidikan pendamping sosial termasuk kategori tinggi. Dari 10 orang pendamping sosial, sebagian besar (8 orang) berpendidikan sarjana, dan dua orang berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). Mereka yang pendidikan sarjana dari berbagai jurusan, yaitu tiga orang jurusan ekonomi, dan masing-masing satu orang jurusan psikologi, agama islam, apoteker, pendidikan dan

bahasa inggris. Data ini menggambarkan, bahwa pendidikan pendamping sosial dapat dikatakan kategori tinggi.

Pendidikan mengarah pada kapasitas keilmuan seseorang, dan kemampuannya dalam memahami masalah dan menemukan solusi. Seorang pendamping dengan pendidikan tinggi, mereka akan mampu melaksanakan tugas dan perannya dengan baik, atau berkinerja baik karena memiliki kapasitas keilmuan.

Pelatihan (termasuk bintek) dan atau bimbingan merupakan modal penting bagi pelaksanaan pendampingan. Sebanyak lima orang pernah mengikuti satu kali, empat orang mengikuti dua kali dan satu orang mengikuti tiga kali. Pelatihan atau binteks merupakan upaya meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pendamping sosial, baik administratif maupun teknis dalam melakukan pendampingan. Semakin banyak pengetahuan yang diperoleh dan keterampilan yang dikuasai, maka semestinya mereka akan lebih mampu melaksanakan tugas atau berkinerja lebih baik.

Proses bekerja sambil belajar antar mereka, dan bimbingan secara informal dari instansi sosial provinsi maupun kota, telah memberikan pengaruh positif terhadap pelaksanaan tugas pendamping sosial.

Dari sisi asal daerah, enam orang berasal dari Tarakan, dan empat orang berasal dari luar Kota Tarakan (Jawa Timur dua orang, Sulawesi Selatan satu orang dan Jawa Tengah satu orang). Bagi pendamping yang berasal dari luar Kota Tarakan, mereka sudah lebih dua tahun tinggal di Kota Tarakan, sehingga sudah beradaptasi dengan kultur dan situasi masyarakat di Kota Tarakan. Selain itu, selama di Kota Tarakan mereka lebih dua

tahun terlibat dalam kegiatan pendamping sosial.

Pendamping sosial sebagai pekerja masyarakat (*community worker*), akan melaksanakan tugas dan perannya atau berkinerja dengan baik apabila memperoleh kepercayaan dari masyarakat yang didampingi. Kepercayaan ini tidak lepas dari pemahaman yang sama terhadap kultur, nilai dan norma yang berlaku. Pendamping sosial dari orang setempat, mereka tidak mengalami kesulitan untuk memahami kultur, nilai dan norma masyarakat, sehingga akan lebih memudahkan mereka dalam melaksanakan tugas dan peranannya.

Pengalaman menjadi pendamping sosial akan ikut mewarnai dan memengaruhi pelaksanaan pendampingan sosial. Sebanyak tiga orang menjadi pendamping sosial kurang dari dua tahun, dan tujuh orang berpengalaman lebih dari tiga tahun. Pengalaman kerja ini tentu sudah banyak memberikan pengetahuan bagi pendamping sosial; sehingga mereka dapat menjelaskan pengalamannya dengan baik, dan memberikan informasi secara obyektif.

Pendamping sosial telah memiliki pengalaman bekerja/aktivitas di bidang kesejahteraan dengan Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi Kaltara dan Dinsos dan PM Kota Tarakan lebih dari dua kali. Selain bekerja bersama instansi tersebut, proses bekerja sambil belajar antar mereka, telah memberikan pengaruh positif terhadap pelaksanaan tugas pendamping sosial.

Seringkali teori yang dipelajari tidak sesuai dengan realitas sosial di masyarakat. Kelemahan ini dapat diatasi ketika seorang pendamping sosial memiliki pengalaman di bidang yang relatif sama dengan tugas dan perannya saat ini. Dengan pengalaman yang

dimiliki, maka seorang pendamping sosial memiliki modal yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan peranannya, sehingga berkinerja lebih baik.

Pemerintah memberikan insentif (honor atau tali asih) sebagai bentuk apresiasi atas pelaksanaan tugas pendamping sosial, yang besarnya bervariasi mulai dari Rp. 250.000,- sampai dengan Rp 2.000.000,-. Sebanyak tujuh orang memperoleh insentif dengan jenis honor yang besarnya Rp. 2.000.000,- dan tiga orang dengan jenis tali asih yang besarnya antara Rp.250.000,— Rp. 300.000,-. Meskipun ada perbedaan yang signifikan dari sisi besarnya insentif yang diterima, namun mereka tetap melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai pendamping sosial. Selain menerima insentif, sebagian pendamping sosial juga menerima honor dari sumber lain. Sebanyak tujuh orang menerima honor dari kegiatan lain, tetapi honor tersebut diterima per kegiatan sebesar Rp.500.000,-.

Honorarium memang memiliki korelasi yang lemah, karena banyak pendamping sosial yang bekerja karena panggilan kemanusiaan. Meskipun demikian, mereka memiliki daftar kebutuhan hidup yang memerlukan pemenuhan. Ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi disebabkan pendapatannya rendah, dapat mengganggu kinerja pendamping sosial.

Dari sisi peralatan kerja, sebanyak enam orang memperoleh sarana kerja. Dua orang dalam bentuk alat tulis kantor/ buku catatan, satu orang dalam bentuk sepeda motor dan dua orang dalam bentuk laptop. Sebagaimana dikemukakan di atas, mereka tetap melaksanakan tugasnya sebagai pendamping sosial, meskipun sarana prasarana kerja belum mendukung pelaksanaan tugas. Misalnya, tidak memiliki

komputer sendiri untuk pengolahan data, pembuatan laporan dan sosialisasi; alat tulis kantor diadakan sendiri, dan sarana transportasi sendiri.

Peralatan kerja bagi pendamping sosial diperlukan untuk mempermudah dan mempercepat pelaksanaan tugas mereka. Ketika sarana kerja jenis dan jumlahnya terbatas, tentu pelaksanaan tugas mereka menjadi tidak optimal.

3. Kegiatan dan Peran Pendamping

Kegiatan yang dilaksanakan oleh pendamping sosial, merupakan aspek yang menjadi dasar untuk mengetahui kinerja pendamping sosial. Kegiatan pendamping sosial di Kota Tarakan dibedakan menjadi kegiatan teknis dan kegiatan administratif.

a. Kegiatan Teknis

Pendampingan sosial pada kegiatan teknis meliputi: preventif, kuratif/ rehabilitatif, dan pengembangan (Mardjuki, 2017; Susantyo.e.t.al, 2018). Kegiatan teknis yang dilaksanakan oleh pendamping sosial di Kota Tarakan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Preventif

Kegiatan preventif adalah kegiatan dalam upaya untuk mencegah sebelum permasalahan terjadi. Kegiatan preventif yang dilaksanakan oleh pendamping sosial di Kota Tarakan, yaitu (1) penyuluhan sosial kepada masyarakat, (2) melaporkan kepada dinas sosial apabila ada calon KPM, (3) dan memberikan edukasi, sosialisasi dan motivasi kepada KPM.

2) Kuratif/Rehabilitatif

Kegiatan rehabilitatif atau kuratif adalah kegiatan dalam

upaya memecahkan, mengatasi, memperbaiki dan memulihkan suatu kondisi, dari bermasalah menuju keberfungsian sosial. Kegiatan kuratif/rehabilitatif yang dilaksanakan oleh pendamping sosial di Kota Tarakan, yaitu a. mengatasi anak putus sekolah, yang dilakukan dengan cara mendaftarkan kembali anak tersebut pada tahun ajaran baru, atau memasukkan ke program pendidikan kejar paket A, B atau C; b. membantu KPM memperoleh pelayanan kesehatan, yang dilakukan dengan cara membantu proses Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS atau Jamkesda; c. memfasilitasi anak KPM yang berhadapan dengan hukum, yang dilakukan dengan cara melakukan pendampingan kepada anak dan keluarganya selama proses peradilan, d. memberikan teguran keras kepada KPM yang melanggar komitmen, yang dilakukan dengan cara memberikan teguran lisan atau tertulis ketika KPM tidak berkomitmen terhadap program; e. memberikan motivasi kepada KPM, yang dilakukan dengan cara dialog dan konsultasi secara berkala, dan f. memberikan konseling (mengatasi tekanan psikologis) kepada KPM yang mengalami masalah psikosial

3) Pengembangan

Kegiatan pengembangan adalah kegiatan dalam upaya menggali dan mengoptimalkan sumber pada diri KPM, sehingga mereka menjadi berdaya. Kegiatan pengembangan yang dilaksanakan oleh pendamping sosial di Kota Tarakan, yaitu a. mendampingi KPM dalam mengelola usaha

ekonomi, dilakukan dengan cara mengajari pembukuan sederhana, membantu merencanakan usaha, dan pemanfaatan hasil usaha ; b. memberikan penyuluhan dan motivasi KPM, dilakukan dengan cara diskusi dalam pertemuan kelompok berkala dan c. sosialisasi program pengembangan melalui *Family Development Session (FDS)*, dilakukan dengan cara diskusi dalam pertemuan kelompok kecil, dan memanfaatkan media sosial.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh pendamping sosial tersebut terkait dengan pengetahuan teoretis maupun praktis, yaitu: *intellectual skill*, *managerial skill* dan *intervention skill*. Hasil analisis terhadap pelaksanaan kegiatan menunjukkan, bahwa pendamping sosial sudah memiliki pengetahuan intervensi sosial yang cukup memadai, baik secara teoretis maupun praktis. Pengetahuan pendamping sosial secara teoretis maupun teknis tersebut tercermin pada kompetensi mereka dalam pelaksanaan tugas. Kompetensi pendamping sosial dapat dikatakan juga cukup memadai dibandingkan dengan tugas-tugas, beban kerja dan dinamika masyarakat.

Kompetensi akan memengaruhi kerja seorang pendamping sosial. Pendamping sosial yang memiliki kompetensi yang baik, maka kinerjanya akan tinggi, atau sebaliknya. Pendamping sosial dapat melaksanakan perannya dengan baik (kinerja tinggi), karena memiliki kompetensi yang memadai. Pada kerangka ini, maka kompetensi pendamping sosial merupakan faktor penting dan menentukan pelaksanaan tugas mereka, dan hasil yang akan dicapai pada program kesejahteraan sosial (lihat Susantyo.et.al, 2018; Marjuki, 2017;

Bagia dan Susila, 2016; Budianto, 2013; Pratama; Mulyadi, 2010).

b. Kegiatan administratif

Selain kegiatan teknis, pendamping sosial juga mengerjakan tugas/kegiatan administratif. Kegiatan administratif yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah kegiatan yang berkaitan dengan pelaporan. Pelaporan meliputi: jenis laporan, cara penyampaian laporan, pengguna laporan, frekuensi laporan, umpan balik laporan dan sanksi apabila laporan tidak dibuat.

1) Jenis laporan

Pendamping sosial membuat laporan yang berisi pelaksanaan dan hasil (*ouput* dan *outcome*) kegiatan pendampingan sosial. Laporan dibuat secara tertulis yang seringkali melampaui waktu yang telah ditentukan.

2) Cara penyampaian laporan

Laporan yang dibuat oleh pendamping sosial disampaikan secara langsung, dan secara tidak langsung atau melalui email.

3) Pengguna laporan

Pengguna laporan kegiatan pendampingan sosial adalah: (1) koordinator pendamping Kota Tarakan, (2) Korwil Provinsi Kaltara, (3) Dinsos dan PM Kota Tarakan, (4) Dinas Sosial Provinsi Kaltara, dan (5) Instansi terkait.

4) Frekuensi pelaporan

Pada program PKH, laporan dibuat setiap bulan untuk mengetahui perkembangan KPM. Sedangkan pada program ASODK, ASLUT, PKSA dan FM yang lain dibuat sesuai kebutuhan.

5) Pemanfaatan laporan

Pemanfaatan laporan yang dibuat oleh pendamping sosial adalah honor atau taliasih yang diterima oleh pendamping. Artinya, pendamping sosial menerima honor atau tali asih setelah mengirimkan laporannya. Sedangkan umpan balik untuk kebijakan hingga saat ini belum ada.

6) Sanksi bila tidak membuat laporan

Apabila pendamping sosial tidak membuat laporan atau laporan terlambat, maka sanksinya mereka tidak menerima honor atau tali-asih. Atau penyaluran honor dan taliasih mereka terlambat diterima.

Pada manajemen modern, pelaporan merupakan salah komponen penting dari pengendalian; komponen lain adalah supervisi, monitoring dan evaluasi. Sehubungan dengan itu, maka pelaporan di dalam penyelenggaraan program dan kegiatan apapun tidak dapat diabaikan. Laporan memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai bahan untuk pertanggungjawaban, alat untuk menyampaikan informasi, alat pengawasan, bahan penilaian dan bahan pengambilan keputusan (Bobsusanto, 2016).

Banyak orang yang masih menganggap, bahwa laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan itu tidak penting. Padahal, sebuah laporan memiliki berbagai manfaat bagi sebuah organisasi, yaitu bahan penyusunan kebijakan dan arahan pimpinan, bahan penyusunan rencana berikutnya, mengetahui perkembangan dan peningkatan kegiatan, serta data sejarah perkembangan sebuah organisasi (Gunadi, 2013).

Laporan yang baik tidak dilihat dari ketebalan atau jumlah halamannya. Laporan yang tebal tidak menjamin

kelengkapan isi dan mudah dipahami oleh pihak pengguna. Laporan yang baik, menurut Bobsusanto (2016), memiliki ciri: ringkas, lengkap, logis dan sistematis.

Berdasarkan temuan lapangan, pendamping sosial telah menyusun laporan setiap bulan. Namun demikian, laporan yang dibuat pendamping tersebut masih sebatas bentuk pertanggungjawaban atas tugas yang dilaksanakan. Selain itu, masih terkesan laporan yang dibuat sebagai persyaratan untuk pencairan honor atau taliasih. Hal ini dapat dicermati dari tidak adanya umpan balik atas laporan yang dibuat oleh pendamping sosial. Jika demikian makalaporan pendamping sosial masih terbatas pada manfaat administratif program.

Adapun peran yang dimainkan oleh pendamping sosial dalam melakukan pendampingan sosial, yaitu penjalin sumber, motivator, pendidik dan fasilitator (Susantyo.et.al, 2018; Mardjuki, 2017; Suharto, 2005). Peran-peran yang dilaksanakan oleh pendamping sosial di Kota Tarakan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Penjalin sumber

Peran pendamping sosial sebagai penjalin sumber dilaksanakan melalui kegiatan: (1) memberi informasi kepada KPM yang berhubungan dengan kebijakan dan program PKH, (2) Konsultasi dan menerima saran KPM, (3) menjalinkan sumber dari Kementerian Sosial kepada KPM, (4) menjalinkan KPM dengan lingkungan sosial, dan (5) menjalin kerjasama dengan pihak terkait untuk tindak lanjut pelayanan sosial bagi KPM.

b. Motivator

Peran pendamping sosial sebagai motivator dilaksanakan melalui kegiatan: (1) memotivasi KPM agar memenuhi kewajiban dan komitmen terkait dengan pendidikan dan kesehatan bagi anak-anaknya, (2) memberi semangat agar KPM semangat mengelola usahanya, (3) memberikan edukasi dan memantau KPM, dan (4) memotivasi klien aktif mengikuti kegiatan agama/spiritual.

c. Pendidik

Peran pendamping sosial sebagai pendidik dilaksanakan melalui kegiatan: (1) memberikan bimbingan spiritualitas kepada KPM, (2) FDS merupakan wadah pengembangan pengetahuan peserta PKH di bidang ekonomi, kesehatan dan pendidikan, (3) memberikan bimbingan pengelolaan pendapatan, pembagian hasil usaha dan pembukuan, dan (4) mengarahkan KPM berpikir positif, terarah dan lebih baik, dan megutamakan kepentingan anak.

d. Fasilitator

Peran sebagai pendamping sosial sebagai fasilitator dilaksanakan melalui kegiatan: (1) melakukan mediasi, edukasi, advokasi dan fasilitasi kepada KPM untuk mendapatkan bantuan, (2) memfasilitasi layanan bagi KPM, dan (3) melakukan pendekatan ke instansi terkait berhubungan dengan pemasaran produk.

Berdasarkan informasi dari pendamping sosial terkait dengan empat peran, menunjukkan bahwa pendamping sosial telah melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik. Bergai peran tersebut dirasakan manfaatnya oleh KPM, seperti dalam mengelola usaha kelompok, mencairkan bantuan sosial, mengaskes pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta mengakses informasi yang diperlukan.

Pengetahuan terkait dengan peran pendamping sosial ini penting, sebagai dasar dalam melakukan intervensi sosial. Oleh karena itu, terkait dengan peran pendamping sosial ini, diperlukan pemahaman yang tepat. Apabila pendamping sosial memiliki pemahaman yang tepat, sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan peran ketika mendampingi KPM.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, bahwa pendamping sosial telah melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik. Ditegaskan, bahwa eksistensi pendamping sosial sebagai ujung tombak Dinsos dan PM dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Namun demikian Dinsos dan PM mengakui, bahwa masih ada permasalahan yang berhubungan dengan pemahaman pelaksanaan pendampingan sosial. Sehubungan dengan itu, Dinsos dan PM Kota Tarakan secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pendamping sosial. Hasil dari monitoring dan evaluasi dimanfaatkan untuk perbaikan kegiatan pendampingan sosial di masa akan datang.

Eksistensi pendamping sosial juga diakui dan diterima oleh LKS yang memanfaatkan tenaga pendamping sosial. Menurut pengelola LKS di Kota Tarakan, keberadaan pendamping sosial sangat membantu pelaksanaan tugas LKS. Permasalahan yang dihadapi oleh LKS, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan KPM (anak) dapat diatasi dengan bantuan dari pendamping sosial. Selain terkait dengan pemenuhan kebutuhan, pendamping sosial juga membantu dalam mengatasi masalah yang berkaitan dengan persoalan hukum

(pada anak yang berhadapan dengan hukum) yang ada di LKS.

Kemudian, menurut KPM bahwa pendamping sosial sudah dikenal dengan baik. Para KPM sering bertemu dengan pendamping, dan keberadaan pendamping sosial tersebut telah memberikan manfaat bagi mereka. Pendamping sosial memberikan informasi dan bimbingan, serta memfasilitasi dan membantu mengatasi masalah yang dihadapi KPM terkait dengan pendidikan anak, kesehatan, ekonomi dan sosial. Bagi para KPM, keberadaan pendamping sosial sebagai sumber informasi dan tempat mengadukan permasalahan yang dihadapi. Ditegaskan oleh seorang KPM, bahwa pendamping sosial telah memberikan waktu dan tenaganya, serta membagi ilmunya dengan sabar kepada PKM.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa pendamping sosial telah melaksanakan peran dengan baik. Peran adalah pelaksanaan hak dan kewajiban seorang pendamping sosial sesuai dengan kedudukannya. Peran menentukan apa yang harus diperbuat pendamping sosial bagi KPM, serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan KPM kepadanya. Pada penelitian ini, ada 4 (empat) peran pendamping sosial, yaitu penjalin sumber, motivator, pendidik dan fasilitator.

Ketika peran pendamping sosial dapat dilaksanakan dengan baik, maka program dan kegiatan yang menjadi arena praktik pendamping sosial akan mencapai tujuan secara optimal. Sehubungan dengan, diperlukan dukungan dari para pemangku kepentingan, terutama berkaitan dengan pengembangan kapasitas pendamping sosial (lihat Rahmawati, 2017; Rohman, 2017; Dirgantari, 2016; Zufri, 2014).

4. Jejaring/Kemitraan dalam Pendampingan

Pendamping sosial dihadapkan dengan berbagai permasalahan dalam melaksanakan tugasnya. Sehubungan dengan itu, maka mereka memerlukan jejaring / kemitraan dengan berbagai sistem sumber.

Menurut Gould dan Penley (Gibson, Hardy and Buckley, 2013), jejaring adalah praktik mengembangkan sistem di dalam dan di luar organisasi, sehingga memberikan informasi yang relevan dan dukungan untuk pelaksanaan tugas/ pengembangan karier. Definisi dalam perspektif yang lebih personal, dikemukakan oleh Michael dan Yukl (Gibson, Hardy and Buckley, 2013) bahwa jejaring adalah perilaku yang dirancang untuk membangun hubungan interpersonal informal dengan orang-orang di dalam dan di luar organisasi. Jejaringan tersebut melibatkan pertukaran perasaan (menyukai, persahabatan), informasi, manfaat, dan pengaruh.

Jejaring / kemitraan pendamping sosial dalam pelaksanaan tugas di Kota Tarakan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Siapa mitra kerja

Pada pelaksanaan pendampingan, pendamping sosial membangun jejaring/ kemitraan dengan berbagai pihak. Pada program PKH jejaring yang dibangun pendamping sosial dengan: (1) kecamatan, kelurahan, UPT kesehatan, UPT pendidikan dan RT, (2) BNI dan Badan Urusan Logistik (Bulog), (3) *service provider*, pilar-pilar kesejahteraan sosial (TKSK, PSM, Pekerja Sosial), dan (4) Dinsos dan PPM Kota Tarakan. Sedangkan pada program KUBE, PKSA, ASLUT dan ASODKB, pendamping sosial membangun jejaring dengan Dinsos dan PM Kota Tarakan,

pemerintah kecamatan, kelurahan, RT dan dasa wisma (khusus KUBE).

b. Manfaat jejaring

Manfaat jejaring adalah dukungan pada pelaksanaan pendampingan sosial, seperti: (1) partisipasi masyarakat dalam memantau KPM, (2) fasilitasi pada kegiatan pendampingan, dan (3) pelayanan yang baik kepada KPM..

Pada setiap program dan kegiatan, termasuk pendampingan sosial - jejaring merupakan faktor penting dan menentukan keberhasilan. Hal ini didasarkan pada fenomena empirik, bahwa permasalahan sosial di tataran praksis bersifat multi-dimensional, yang memerlukan pemahaman multi-perspektif dan multi-pendekatan. Meskipun jejaring bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan program, tetapi menjadi keniscayaan untuk mencapai hasil yang optimal tanpa membangun jejaring (lihat Harisman, 2017; Utami, Dinar dan Sumantri, 2016; Sofyan, 2006).

5. Permasalahan dalam Pendampingan

Pendamping sosial masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang dilihat dari: jumlah klien, jenis masalah, alokasi waktu, dan uraian tugas, yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Jumlah dan data klien

Pada program PKH, seorang pendamping mendampingi 159 – 299 orang KPM. Pada program KUBE mendampingi 90 orang (9 KUBE), pada program ASLUT mendampingi 10 orang, pada program ASODKB mendampingi 7 (tujuh) orang dan pada program PKSA mendampingi 37 orang.

Permasalahan berikutnya adalah masih ada data KPM yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Masih ada KPM yang tidak memenuhi persyaratan

menerima bantuan, atau sebaliknya. Berikutnya, penggantian KPM yang meninggal, pindah domisili dan graduasi yang belum terealisasi sesuai usulan.

b. Jenis masalah

Jenis masalah terkait dengan jumlah KPM dirasakan pada program PKH. Menurut mereka, idealnya seorang pendamping mendampingi KPM 150-200 orang. Sementara itu untuk program yang lain masih dipandang rasional. Masalah berikutnya adalah data yang tidak valid, kecemburuan sosial antara KPM dengan masyarakat di sekitarnya, KPM berusia lanjut sehingga seringkali terjadi miskomunikasi. Selain itu, pendamping sosial seringkali mendapat tugas tambahan di luar tugas pokok dari Dinsos dan PM Kota Tarakan maupun dari Dinas Sosial Provinsi Kaltara. Kemudian, bagi pendamping sosial program PKH, perluasan sasaran program PKH pada program ASLUT dan ASODKB, dirasakan menambah beban kerja. Mereka dituntut mendampingi lanjut usia dan orang dengan kecacatan berat, di mana mereka tidak memiliki keterampilan pendamping sosial yang memadai.

c. Alokasi Waktu

Pada program PKH, pendamping sosial melaksanakan pendampingan sosial penuh waktu. Artinya, seorang pendamping sosial PKH seluruh waktunya untuk mendampingi KPM penerima PKH saja. Sedangkan pada program yang lain dilaksanakan paruh waktu. Di mana pendamping sosial masih bisa melaksanakan aktivitas lain di luar tugasnya sebagai pendamping sosial.

d. Beban Kerja

Pendamping sosial melaksanakan tugas, baik yang bersifat administratif maupun

teknis di lapangan. Mereka membuat surat menyurat dan laporan tertulis sesuai kebutuhan. Kemudian, melaksanakan kegiatan teknis, seperti penyuluhan, koordinasi, validasi dan verifikasi data, penyaluran bantuan, kunjungan ke KPM, pertemuan kelompok, melakukan FDS, konseling dan memfasilitasi KPM pada sistem sumber. Tugas-tugas tersebut cukup menguras waktu dan tenaga pendamping sosial, sehingga dirasakan menjadi beban kerja.

e. Sarana prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana kerja masih terbatas (transportasi, peralatan kantor, peralatan lapangan). Pendamping sosial telah mengkomunikasikan permasalahan tersebut ke Dinasos dan PM Kota Tarakan dan Kementerian Sosial. Meskipun demikian, hingga saat ini belum ada respon dari instansi tersebut.

f. Kapasitas pendamping

Dinamika dan perkembangan permasalahan semakin kompleks serta beban kerja belum diimbangi dengan peningkatan kompetensi pendamping, terutama kompetensi teknis pendampingan. Sehubungan dengan itu, pendamping sosial merasa masih memerlukan pelatihan dan bimbingan lanjutan.

Permasalahan yang bersumber dari beban kerja yang tidak diimbangi dengan kompetensi yang memadai, akan memengaruhi kinerja seseorang. Tugas-tugas yang melampaui kemampuan dan kekuasaan seseorang, akan memengaruhi kondisi fisik dan psikologis seseorang, dan mengakibatkan seseorang tidak dapat mencapai kinerja yang baik atau sesuai tujuan yang diharapkan. Meskipun bukan satu-satunya faktor yang memengaruhi

kinerja seseorang, memberikan pekerjaan atau tugas yang melebihi kapasitas seseorang, bukan langkah yang tepat. Beban kerja berpengaruh terhadap kinerja dan produktivitas seseorang (lihat Adityawarman, Sanim dan Sinaga, 2015; Fajriani dan Septiari, 2016; Budianto, 2013).

KESIMPULAN

Kinerja pendamping sosial pada program penanganan kemiskinan dan kelompok rentan di Kota Tarakan pada kategori sedang (*moderate*). Hal ini didasarkan penilaian pada: pelaksanaan kegiatan (preventif, kuratif/rehabilitatif dan pengembangan) dan peranan (penjalin sumber, motivator, pendidik dan fasilitator); pengembangan jejaringan /kemitraan dengan sistem sumber; dan permasalahan-permasalahan yang masih dihadapi dalam melaksanakan pendampingan sosial.

SARAN

Berdasarkan temuan penelitian, maka disarankan:

1. Kepada Kementerian Sosial

- a. Data calon KPM terus di-*update* dengan melibatkan instansi sosial provinsi maupun kabupaten/kota dan pendamping sosial. Persoalan data yang tidak valid saat ini, telah memengaruhi pelaksanaan tugas dan peran pendamping sosial ketika berhadapan dengan tokoh masyarakat, dan masyarakat luas. Verifikasi dan validasi data calon KPM perlu melibatkan instansi sosial dan pendamping sosial.
- b. Rekrutmen pendamping sosial memperhatikan populasi kelompok sasaran (calon KPM), sehingga diperoleh rasio antara pendamping dan KPM yang rasional.

Rasio antara pendamping sosial dengan

KPM adalah seorang pendamping mendampingi 10 orang pada program ASODKB, ASLUT dan PKSA. Untuk KUBE seorang pendamping mendampingi 20-30 orang, dan pada PKH seorang pendamping mendampingi 150 – 200 orang.

- c. Pendamping sosial belum cukup dengan pelatihan yang diikuti pada ketika di awal tugasnya. Persoalan di lapangan ternyata lebih dinamis, yang menuntut kemampuan dan keterampilan yang lebih besar. Sehubungan dengan itu, diperlukan pelatihan atau bimbingan teknis lanjutan bagi pendamping sosial. Selain itu, pendamping sosial memerlukan pelatihan/bimbingan teknis mengenai advokasi sosial.
- d. Pendamping sosial berhadapan langsung dengan masyarakat, sehingga memerlukan pengakuan dari masyarakat. Sehubungan dengan itu, diperlukan atribut (pakaian kerja) sebagai bukti legalitasnya di tengah masyarakat.
- e. Besarnya insentif (honor, taliasih) bagi para pendamping perlu diperhitungkan kembali, sehingga kesenjangan insentif antara pendamping sosial pada program berbeda, tidak terlalu jauh.
- f. Memasukkan kewenangan instansi sosial kabupaten/kota dan provinsi di dalam panduan pelaksanaan program, terkait dengan pengembangan kompetensi dan pelaksanaan tugas pendamping sosial.
- g. Melakukan monitoring dan evaluasi, untuk mengetahui pelaksanaan peran dan fungsi pendamping sosial, sekurang-kurangnya setahun sekali.

2. Kepada Dinsos dan PM Kota Tarakan

- a. Melakukan koordinasi validasi dan verifikasi data calon KPM.
- b. Pengadaan sarana kerja dan insentif untuk mendukung pelaksanaan tugas

pendampingan sosial.

- c. Melakukan bimbingan teknis kepada pendamping sosial.
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan peran dan fungsi pendamping sosial, sekurang-kurangnya setahun sekali.

UCAPAN TERIMA KASIH

Disampaikan terimakasih kepada Sekretaris Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan beserta seluruh staf, pendamping sosial yang telah memberikan dukungan dan kesediaan berdiskusi dan memberikan informasi, dan rekan-rekan tim penelitian di Puslibtangeos.

DAFTAR PUSTAKA

- Adityawarman.Y, Sanim.B dan Sinaga.B.M, (2015), Pengaruh Beban Kerja terhadap Kinerja Karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Cabang Krekot /Jurnal Manajemen dan Organisasi Vol VI, No 1, April 2015.
- Amin.A.R, (2010), Analisis Peran Pendamping pada Program Keluarga Harapan pada Suku Dinas Sosial Jakarta Utara, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Kota Tarakan, (2015), Kota Tarakan dalam Angka, BPS, Kota Tarakan.
- Berghe.J.V, (2011), Job Satisfaction and Job Performance at the Work Place, Thesis, https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/28669/Vanden_Berghe_Jae.pdf [20/6/2018].
- Bobsusanto, (2016), Pengertian Laporan, Fungsi Laporan, dan Manfaat Laporan <http://www.spengetahuan.com/2016/09/pengertian-laporan-fungsi-laporan-dan-manfaat-laporan.html> [25/3/2018].
- Budianto.E, (2013), Pengaruh Beban Kerja dan Kapasitas Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada CV. Manggis Rotan Jepara, Skripsi, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus.
- Dirgantari.A.I, (2016), Efektivitas Peran Pendamping dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Bidang Kesehatan Di Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta
- Dobrin,C.O, Popescu,G.N, Popescu, V.A & Popescu.C.R, (2012), The Concept Of Performance In Business Organizations – Case Study On The Employee Performance In Romanian Business Organizations, Proceedings Of The 6th International Management Conference “Approaches In Organisational Management” 15-16 November 2012, Bucharest, Romania.
- Fogaca.N, Rego,M.C.B, Melo, M.C.C, Armond,L.P, Coelho,F.A, (2018), Job Performance Analysis: Scientific Studies in the Main Journals of Management and Psychology from 2006 to 2015, Published online in Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com). DOI: 10.1002/piq.21248. Volume 30, Number 4 / 2018.
- Gibson.C, Hardy.J.H & Buckley.M.R, (2013), Understanding the Role of Networking In Organizations, *Career Development International*, Vol. 19 No. 2, 2014 pp. 146-161, DOI: 10.1108/CDI-09-2013-0111.

- Gunadi, G, 2013, Pengertian, Tujuan, Manfaat, Jenis dan Ciri dari Laporan, <http://bald-gugungondrong.blogspot.co.id/2013/05/pengertian-tujuan-manfaat-jenis-dan.html> [25/2/2018].
- Harisman.K, (2017), Pola Kemitraan Antara Petani Dengan PT Indofood Fryto-Lay Makmur Pada Usahatani Kentang Industri Varietas Atlantik (Suatu Kasus Di Desa Cigedug Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut), *Jurnak Istek – Uin Sunan Gunungjati*, Edisi Mei 2017 Volume X No. 1.
- Hendrikus.M.B, (2016), Impelementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Pemberdayaan Fakir Miskin Kelompok Usah Bersama di Kecamatan Nunukan, Thesis, Universitas Terbuka, Jakarta.
- Huda.N, Anggraini, R dan Sutiyono.I.R, (2013), Peranan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Kemiskinan Berdasarkan Undang Undang No.13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Studi di Kabupaten Bondowoso), Universitas Jember, <http://repository.unej.ac.id/bitstream/andle/123456789/58825/Nurul%20Huda.pdf?...1> [5/3/2018].
- Irmayani.et.al, (2016), Pemetaan Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial di Empat Provinsi, Jakarta: Puslitbangkesos.
- Marjuki (2017). Optimalisasi Peran Sumberdaya Manusia Kesejahteraan Sosial dalam Pemanfaatan Sistem Sumber Kesejahteraan Sosial. Disampaikan pada saat diskusi penyusunan *policy memo* Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Aksesibilitas Sosial, 30 Januari 2018 Di Salemba Raya No. 28, Jakarta.
- Mulyadi.H, (2010) Pengaruh Motivasi dan Kompetensi Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada Pt. Galamedia Bandung Perkasa, *Manajerial Vol. 9, No. 17, Juli 2010: 97 – 111*.
- Ningrum.D.A, (2017), Peran Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Menangani Kemiskinan Di KUBE Sejahtera Desa Giripurno, Ngadirejo, Temanggung, http://eprints.uny.ac.id/52277/1/skripsi_diah%20ayu%20ningrum_13102241040.pdf [20/4/2018].
- Pratama.P.A, Bagia.I.W, Agus.G.P, And Susila.J, (2016) Pengaruh Kompensasi Finansial dan Kompetensi Sosial Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan E-Journal, Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen (Volume 4 Tahun 2016)
- Rahmawati.E, (2017), Peran Pendamping dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Semarang Tengah, Skripsi, Jurusan Pendidikan Nonformal Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang.
- Rohman.M.F, (2017), Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Triwidadi, Pajangan, bantul, Skripsi, Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Islam negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Sofyan.A, (2006) Strategi Kemitraan dalam Saluran Distribusi Untuk Meningkatkan Kinerja Bisnis (Studi Empiris Kemitraan Ternak Broiler Di Semarang, Kudus dan

- Salatiga), Tesis, Program Studi Magister Manajemen Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.
- Suharto.E, (2005), *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung: Refika Aditama.
- Suryani dan Purnama.A, (2017), Peran Pendamping KUBE-FM dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggotanya, *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 41, No. 1, April 2017, 67-76.
- Susantyo.B.et.al, (2018), *Optimalisasi Peran Pendamping Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Puslitbangkesos.
- Utami.A, Dinar dan Sumantri.K (2016) Pengaruh Pola Kemitraan Terhadap Pendapatan Petani Tebu (Suatu Kasus Di PT. PG Rajawali II, Unit PG Jatitujuh, Majalengka, Jawa Barat), *Jurnal Ilmu Pertanian dan Peternakan*, Volume 4 Nomor 1 Juli 2016.
- Widyakusuma.N, (2013), Peran Pendamping Dalam Program Pendampingan Dan Perawatan Sosial Lanjut Usia Di Lingkungan Keluarga: Studi Tentang Pendamping Di Yayasan Pitrah Sejahtera, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, *Informasi* Vol. 18, No. 02, Tahun 2013.
- Wulandari.D.N, (2017), Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Di Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai), *JOM Fisip* Vol. 4 No. 1 – Februari 2017.
- Zufri.O.R, (2014), Peran Pendamping Program
- Keluarga Harapan (PKH) Di Kabupaten Jombang (Studi Deskriptif Pada Suku Dinas Kabupaten Jombang Propinsi Jawa Timur), Skripsi, Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

PENGETAHUAN MANAJEMEN BENCANA DAN KEARIFAN SOSIAL DI KABUPATEN MALANG

DISASTER MANAGEMENT KNOWLEDGE AND SOCIAL WISDOM IN THE MALANG REGION

Oman Sukmana

Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Malang.
Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang, Jawa Timur; Tlp. (0341)-464318 Psw 136
E-mail: oman@umm.ac.id

Diterima: 13 Maret 2018; Direvisi: 15 Mei 2018; Disetujui: 8 Agustus 2018

Abstrak

Wilayah Indonesia merupakan kawasan rawan bencana, baik bencana alam, bencana non-alam, maupun bencana sosial. Proses manajemen bencana dilakukan melalui empat fase, yakni fase: mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan fase pemulihan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan konstruksi masyarakat tentang pengetahuan dan nilai kearifan sosial masyarakat lokal dalam proses manajemen bencana Gunung Kelud. Penelitian menggunakan pendekatan dan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan teknik analisa data menggunakan teknik deskriptif-kualitatif. Lokasi penelitian di Desa Pandansari, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, yang merupakan wilayah utama terkena dampak bencana Gunung Kelud. Subjek penelitian ditentukan secara *purposive sampling*, yang meliputi Aparat Desa Pandansari, tokoh masyarakat Desa Pandansari, dan Ketua Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB). Hasil penelitian dapat dinyatakan bahwa masyarakat memiliki pengetahuan tentang tanda-tanda alam akan terjadinya erupsi Gunung Kelud yaitu: (1) Terjadi migrasi binatang seperti monyet, ular, burung, dan sebagainya yang turun ke wilayah permukiman masyarakat, (2) Debit sumber air, seperti sumur, mata air, dan sungai kecil berkurang dan mengering, (3) Muncul awan panas dan gerah, (4) Muncul gempa-gempa kecil disertai kilat dan bunyi gelegar kecil, (5) Tumbuhan dan tanaman layu dan berubah warna, dan (6) Tokoh Tetua masyarakat bermimpi didatangi "Lembu Suro". Sedangkan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat terhadap Gunung Kelud tercermin dalam bentuk "*Ritual Sesaji Gunung Kelud*" dan "*Budaya Gotong Royong*".

Kata kunci: konstruksi, pengetahuan dan kearifan sosial, manajemen bencana.

Abstract

Indonesia is a disaster prone area, both natural disasters, man-made disasters, and social disasters. The disaster management process is carried out through four phases, namely: mitigation, preparedness, emergency response, and recovery phases. This study aims to illustrate the community's construction of the knowledge and value of social wisdom of local communities in the Kelud Mountain disaster management process. Research approach and type using of qualitative. Data collection techniques are done through interviews, observation, and documentation, while data analysis techniques using descriptive-qualitative techniques. Research location in Pandansari Village, Ngantang District, Malang Regency, which as the main area affected by Kelud Mountain disaster. The subjects were determined by purposive sampling, which included Pandansari Village Officer, Pandansari Village Leader, and Chairman of Disaster Risk Reduction Forum. The results can be stated that in the phase of disaster mitigation, the community has knowledge of the natural signs of Kelud Mountain eruption that is: (1) The migration of animals such as monkeys, snakes, birds, and so forth that descend into the settlement area of society, (2) The discharge of water sources, such as wells, springs, and small rivers is reduced and dries up, (3) Appears hot and sultry clouds, (4) There are small earthquakes accompanied by lightning, (5) Plants withered and discolored, and (6) Chairman

of Indigenous people dreamed of being visited by “Lembu Suro”. While the value of social wisdom of society to Kelud Mountain is reflected in the form of “Sesaji Gunung Kelud” rituals and “Gotong Royong” traditions.

Keywords: *construction, knowledge and local wisdom, disaster management.*

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional. Bencana di Indonesia adalah merupakan suatu keniscayaan, dapat terjadi secara tiba-tiba ataupun secara perlahan (Sudiyakto, Retnowati, Suryanti, & Hisbaron, dalam Indiyanto & Kuswanjono, 2012). Indonesia memiliki kerentanan dan potensi bencana yang sangat tinggi ditinjau dari beberapa aspek, seperti: aspek geografis, klimatologis, geologis, dan sosial-demografis. Indonesia sebagai negara tropis juga memiliki resiko tinggi karena ancaman banjir, tanah longsor, dan wabah penyakit. Indonesia merupakan negara yang diperhitungkan sebagai salah satu yang paling rentan bencana alam, dengan berbagai jenisnya, di dunia. Sebagai gambaran awal, sekitar 13 persen gunung berapi dunia ada di wilayah kepulauan Indonesia, dan seluruhnya berpotensi menimbulkan bencana alam dengan intensitas dan kekuatan yang berbeda-beda (Belanawane, 2015).

Salah satu peristiwa bencana yang terjadi pada tahun 2014 adalah bencana letusan Gunung Kelud di Jawa Timur. Dampak bencana letusan Gunung Kelud meliputi tiga wilayah kabupaten di Jawa Timur, yakni Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Blitar, yang memaksa sekitar 180 ribu jiwa

harus mengungsi. Wakil Presiden Boediono dalam kunjungannya ke lokasi bencana pada tanggal 27 April 2014 menyatakan bahwa masyarakat di sekitar Gunung Kelud yang menjadi korban bencana sebagai masyarakat yang tangguh. Wakil Presiden Boediono menilai bahwa masyarakat di kawasan bencana Gunung Kelud sebagai masyarakat yang cepat bergerak dari keterpurukan dan mampu bangkit menuju kehidupan normal kembali pasca bencana. Menurut Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kelancaran penanganan bencana letusan Gunung Kelud terjadi karena ketangguhan dan kesiapan masyarakat menghadapi bencana. Proses penanganan bencana Gunung Kelud dianggap berhasil karena ada peran serta masyarakat yang cukup baik.

Wiguna, Citrosiswoyo dan Widodo (2009) menyatakan bahwa penanggulangan bencana (*disaster management*) adalah serangkaian kegiatan dalam pengurangan risiko dan penekanan dampak bencana baik sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya peristiwa bencana, dengan memperhatikan ancaman bencana dan memanfaatkan sumber-sumber lokal yang tersedia dan keterlibatan para pihak. Tujuan penanggulangan untuk mengurangi risiko bencana. Selanjutnya Kusumasari (2015) menyatakan bahwa secara umum manajemen bencana (*disaster management*) merupakan rangkaian fase penanggulangan bencana yang meliputi: (1) Fase Mitigasi (*Mitigation*); (2) Fase Kesiap-siagaan (*Preparedness*); (3) Fase Tanggap darurat (*Emergency respons*; dan (4) Fase Pemulihan (*Recovery*). Dalam fase

pemulihan (*recovery*) di dalamnya meliputi juga upaya rehabilitasi dan rekonstruksi (*rehabilitation and reconstruction*). Sedangkan menurut UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

Menurut Jazziyatul dan Khasanah (Indiyanto & Kuswanjono, 2012) berangkat dari tingginya tingkat kerawanan bencana yang dihadapi oleh masyarakat, menarik untuk dikaji bagaimana masyarakat mampu beradaptasi dengan alam dan lingkungan sekitarnya. Dalam konteks ini, kearifan lokal menjadi objek kajian yang sangat penting, karena pemahaman terhadap kearifan lokal masyarakat menyangkut bencana akan menjadi satu input penting dalam proses mitigasi bencana. Pengurangan Risiko Bencana (PRB) adalah sebuah pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, mengkaji dan mengurangi risiko-risiko bencana. Pengurangan Risiko Bencana (PRB) bertujuan untuk mengurangi kerentanan-kerentanan sosial-ekonomi terhadap bencana dan menangani bahaya-bahaya lingkungan maupun bahaya-bahaya lainnya yang menimbulkan kerentanan.

Dalam penanggulangan bencana perlu dikembangkan mekanisme manajemen bencana internal atau seringkali dikenal dengan skala metode pendekatan Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat (PBBM), yaitu mekanisme penanggulangan bencana yang dilakukan oleh unsur-unsur masyarakat di lokasi bencana, baik keluarga, organisasi sosial, maupun masyarakat lokal. Pada dasarnya masyarakat mempunyai kearifan lokal yang terbentuk berdasar pengalaman. Kearifan masyarakat perlu dikembangkan dengan

memberi pengetahuan dan pelatihan secara praktis. Integrasi kearifan dan pengetahuan praktis dalam menghadapi bencana merupakan usaha peningkatan kemampuan masyarakat untuk mengurangi risiko bencana. Sosialisasi merupakan cara penyampaian pengetahuan secara massal agar masyarakat dapat berbuat atau melakukan sesuatu dalam menghadapi bencana dengan mengurangi risiko bencana (Sudiyakto, Retnowati, Suryanti, & Hisbaron dalam Indiyanto & Kuswanjono, 2012).

Selanjutnya Sudibyakto, Retnowati, Suryanti, dan Hisbaron dalam Indiyanto & Kuswanjono (2012, menyatakan bahwa Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat (PBBM) dipahami sebagai upaya meningkatkan kapasitas masyarakat atau mengurangi kerentanan masyarakat, agar mampu menolong diri sendiri dan kelompoknya dalam menghadapi ancaman bahaya yang berpotensi menjadi bencana di sekitar kehidupannya. Manajemen kebencanaan berbasis masyarakat ini meliputi keseluruhan tahap yaitu pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan. Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat (PBBM) pada intinya merupakan sebuah pendekatan penanggulangan bencana yang berbasis pada komunitas lokal. Pendekatan ini pada dasarnya mensyaratkan adanya sikap politik yang memberikan keberpihakan kepada kepentingan komunitas lokal. Pendekatan ini juga menempatkan pengetahuan lokal (*local knowledge*) dan para jenius lokal (*local geniuses*) di latar depan. Dalam praktiknya, pendekatan ini mengakomodasi potensi dan modal sosial (*social capital*) yang ada di masyarakat sebagai sumber daya dalam melaksanakan program penanggulangan bencana. Sehingga, diharapkan masyarakat akan tanggap dan sadar bahwa mereka hidup di daerah rawan bencana, dan mempunyai kapasitas yang memadai dalam penanggulangan bencana. Proses pemberdayaan

ini menghendaki adanya kemauan politik (*political will*) dari pemerintah untuk berperan sebagai fasilitator dalam rangka mendorong berkembangnya Kelompok Masyarakat Sadar dan Tanggap Bencana.

Mengacu kepada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, dinyatakan bahwa mengingat korban terbesar dari bencana adalah kaum miskin di tingkat masyarakat dan yang pertama-tama menghadapi bencana adalah masyarakat sendiri, pemerintah mengembangkan program pengurangan risiko bencana berbasis komunitas. Salah satu strategi yang akan digunakan untuk mewujudkan ini adalah melalui pengembangan desa-desa dan kelurahan-kelurahan yang tangguh terhadap bencana. Upaya pengurangan risiko bencana berbasis komunitas yang akan dilaksanakan melalui pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan, jika terkena bencana. Dengan demikian sebuah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah sebuah desa atau kelurahan yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pasca keadaan darurat.

Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana merupakan salah satu

upaya pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat. Pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat adalah segala bentuk upaya untuk mengurangi ancaman bencana dan kerentanan masyarakat, dan meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan, yang direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pelaku utama. Dalam Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, masyarakat terlibat aktif dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberkelanjutan.

Menurut Mukti dan Winana dalam Indiyanto & Kuswanjono (2012), keswadayaan masyarakat merupakan komponen utama dalam sistem penanggulangan bencana di Indonesia. Penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan masyarakat dari ancaman, risiko dan dampak bencana, sangat memerlukan peran masyarakat secara langsung. Dari berbagai pengalaman penanggulangan bencana alam di berbagai daerah, keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh sejauh mana peran serta masyarakat dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya menurut Hendarsah (2012) menyebutkan bahwa keterlibatan masyarakat telah menjadi salah satu prioritas utama untuk membangun kemitraan yang efektif dalam pengurangan risiko bencana sesuai dengan Kerangka Aksi Hyogo 2005-2015. Berkaitan dengan bencana, mengidentifikasi faktor-faktor risiko dan memahami cara masyarakat menangani dan menghadapi bencana (*coping strategies*) serta beradaptasi dengan lingkungan yang berbahaya dianggap faktor penentu penting bagi pengurangan risiko dan pengambilan keputusan di tingkat lokal.

Suardiman (Wagiran, 2009) mengungkapkan bahwa kearifan lokal identik dengan perilaku manusia berhubungan dengan: (1) Tuhan, (2) Tanda-tanda alam, (3) lingkungan hidup/pertanian, (4) membangun rumah, (5) pendidikan, (6) upacara perkawinan dan kelahiran, (7) Makanan, (8) siklus kehidupan manusia dan watak, (9) Kesehatan, (10) Bencana alam. Lingkup kearifan lokal dapat pula dibagi menjadi delapan, yaitu: (1) Norma-norma lokal yang dikembangkan, seperti 'laku Jawa', pantangan dan kewajiban; (2) Ritual dan tradisi masyarakat serta makna disebaliknya; (3) Lagu-lagu rakyat, legenda, mitos dan ceritera rakyat yang biasanya mengandung pelajaran atau pesan-pesan tertentu yang hanya dikenali oleh komunitas lokal; (4) Informasi data dan pengetahuan yang terhimpun pada diri seseorang masyarakat, tetua adat, pemimpin spiritual; (5) Manuskrip atau kitab-kitab suci yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat; (6) Cara-cara komunitas lokal dalam memenuhi kehidupannya sehari-hari; (7) Alat-bahan yang dipergunakan untuk kebutuhan tertentu; dan (8) Kondisi sumberdaya alam/lingkungan yang biasa dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Selanjutnya Mukti dan Winana (Indiyanto & Kuswanjono, 2012) menyatakan bahwa kearifan lokal (local wisdom) dapat dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budinya (kognisi) untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu. Kearifan lokal sangat dipengaruhi oleh kecerdasan kolektif yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat. Kecerdasan kolektif (sosial) sangat berhubungan dengan jati diri manusia sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, nilai manusia tersebut diukur dari partisipasi dan kemanfaatan sosialnya yang dilakukan melalui interaksi sosial. Interaksi sosial seseorang

dipengaruhi oleh 2 komponen, yaitu: (1) kualitas individu; dan (2) kualitas akses interaksinya. Masyarakat Indonesia dengan kearifan lokalnya, sebenarnya telah memiliki mayoritas kecerdasan emosi dan moral dalam budaya ke-Timuran yang masih memegang teguh etika dan keagamaan. Kecerdasan sosial (*social intelligence*) mempunyai peran yang amat penting dalam membangun sebuah relasi yang produktif dan harmonis.

Pada dasarnya masyarakat mempunyai kearifan lokal yang terbentuk berdasar pengalaman. Kearifan masyarakat perlu dikembangkan dengan memberi pengetahuan dan pelatihan secara praktis. Integrasi kearifan dan pengetahuan praktis dalam menghadapi bencana merupakan usaha peningkatan kemampuan masyarakat untuk mengurangi risiko bencana. Sosialisasi merupakan cara penyampaian pengetahuan secara massal agar masyarakat dapat berbuat atau melakukan sesuatu dalam menghadapi bencana dengan mengurangi risiko bencana (Sudiyakto, Retnowati, Suryanti, & Hisbaron dalam Indiyanto & Kuswanjono, 2012). Peningkatan kesadaran masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana adalah agenda mendesak, sehingga mereka dapat cepat dan tanggap untuk menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan.

Oleh karena itu penelitian yang mengkaji tentang bagaimana peran serta masyarakat dalam proses penanggulangan bencana merupakan hal yang penting. Dalam penelitian ini akan dikaji bagaimana proses dan model manajemen bencana berbasis pengetahuan dan nilai-nilai kearifan sosial masyarakat lokal pada masyarakat di sekitar wilayah rawan bencana Gunung Kelud, khususnya pada masyarakat yang ada di Desa Pandansari, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang.

Permasalahan utama yang menjadi fokus penelitian ini adalah berkaitan dengan: Bagaimanakah model manajemen bencana (*disaster managment*) berbasis masyarakat?. Secara khusus permasalahan penelitian dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: (1) Bagaimanakah konstruksi masyarakat tentang pengetahuan dan nilai-nilai kearifan sosial dalam proses manajemen bencana?; dan (2) Bagaimanakah konsep mitigasi bencana berbasis pengetahuan dan kearifan sosial masyarakat lokal?

METODE

Penelitian ini menggunakan paradigma interpretif-konstruktivisme (*constructivism-interpretative*), pendekatan dan jenis penelitian kualitatif. Menurut Denzim dan Guba (Salim, 2001:71), tujuan penelitian (*inquiry aim*) dari paradigma interpretatif-konstruktivisme adalah untuk mengadakan pemahaman dan rekonstruksi *social action*. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif (Denzim dan Lincoln (2009). Menurut Marvasti (2004), penelitian kualitatif memberikan penjelasan rinci dan analisis kualitas, atau substansi, dari pengalaman manusia.

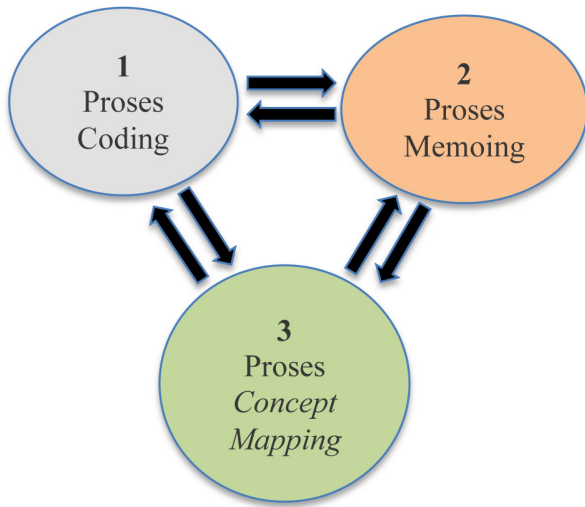
Setting (lokasi) penelitian ditentukan di wilayah yang terkena dampak bencana Gunung Kelud, yakni di Desa Pandansari, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Subjek dan informan penelitian ditentukan berdasarkan teknik *purposive or judgemental sampling* (Babbie, 2008; Neuman, 2007). Teknik *purposive sampling* digunakan dalam situasi di mana seorang pakar (peneliti) menggunakan pertimbangan-pertimbangan tertentu dengan tujuan yang khusus. Atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka yang menjadi subjek dan informan dalam penelitian

ini adalah meliputi: (1) Aparat Desa Pandansari, yang diwakili oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kepala Dusun; (2) Tokoh masyarakat Desa Pandansari, yang diwakili oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD); dan (3) Ketua dan Pengurus Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) Desa Pandansari, yang diwakili oleh Ketua dan Sekretaris FPRB.

Dalam penelitian ini, secara garis besar proses pengumpulan data menggunakan 3 (tiga) metode pokok yang saling berkaitan dan melengkapi, yaitu: wawancara (*Interview*), observasi (*observation*), dan dokumentasi (*Documentation*).

Mengingat data yang dihasilkan berupa data kualitatif, maka untuk menganalisisnya digunakan pendekatan interpretif (*interpretive approach*). Tahap-tahap proses data kualitatif mengacu kepada pendapat Babbie (2008), yakni: (1) Proses *Coding*, yaitu proses melakukan klasifikasi dan kategorisasi data, yang meliputi: *open coding*, *axial coding* dan *selective coding*. Menurut Kalof, Dan, dan Dietz (2008), *coding* adalah proses mengorganisasikan dan menginterpretasikan data, yakni melakukan pemetaan data ke dalam seperangkat kategori-kategori dimana peneliti akan menjadikannya sebagai teks kesimpulan dan pernyataan teoritik; (2) Proses *Memoing*, yaitu proses menulis memo atau catatan untuk diri sendiri dan orang lain yang terlibat dalam proyek (*writing memos or notes to yourself and others involved in the project*). Strauss dan Corbin (Babbie, 2008) menyatakan bahwa proses *memoing* meliputi tiga jenis, yakni: *Code Notes*, *Theoretical Notes*, dan *Operational Notes*; dan (3) Proses *Concept Mapping*, yaitu proses pemetaan relasi antar berbagai konsep. Pemetaan ini bisa berupa: alur, diagram, tabel, grafik, dsb.

Tahap Proses Analisis Data Kualitatif



Sumber: Dikonstruksi dari Pemikiran Babbie, 2008.

Untuk pengujian keabsahan data, peneliti memfokuskan pada kriteria kredibilitas (*credibility*) dan kepastian (*confirmability*). Teknik kredibilitas (*credibility*) yang digunakan adalah: perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, dan kecukupan referensial. Sedangkan teknik kepastian (*confirmability*) menggunakan teknik uraian rinci dan teknik audit kebenaran (Moleong, 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pengetahuan dan nilai-nilai kearifan sosial dalam proses manajemen bencana

Menurut masyarakat Desa Pandansari, alam akan memberi tanda-tanda kepada manusia jika akan terjadi suatu peristiwa alam, termasuk jika gunung akan meletus (erupsi). Oleh karena itu, apabila Gunung Kelud akan erupsi (meletus), maka alam akan memberikan tanda-tanda sebagai peringatan agar manusia yang tinggal di sekitar kawasan Gunung Kelud untuk bersiap-siap menghadapinya. Sebagaimana dinyatakan oleh ibu Sitin (51 tahun), kepada Desa Pandansari, sebagai berikut:

“...masyarakat Desa Pandansari yang tinggal di sekitar gunung Kelud, memiliki pemahaman bahwa gunung akan memberikan tanda-tanda alam jika mau erupsi atau meletus. Tanda-tanda alam tersebut seperti banyaknya binatang yang turun ke perkampungan, terus sumber air mengering, dan sebagainya. Selain itu juga masyarakat percaya bahwa juru kunci gunung Kelud akan diberitahu lewat mimpi bertemu Lembu Suro yang diyakini sebagai penunggu Gunung Kelud...”

Sejalan dengan pernyataan dari Kepada Desa Pandansari, Ketua BPD Desa Pandansari juga menyatakan sebagai berikut:

“...masyarakat Desa Pandansari masih memiliki keyakinan dan kepercayaan bahwa ada kekuatan ghaib yang menjaga Gunung Kelud. Selama masyarakat tidak mengganggu dan tidak merusak lingkungan alam Gunung Kelud, maka jika akan terjadi sesuatu dengan Gunung Kelud kekuatan ghaib ini akan memberitahu melalui tanda-tanda alam...”

Selanjutnya berdasarkan data hasil penelitian, maka konstruksi masyarakat terkait pengetahuan tentang tanda-tanda alam sebagai isyarat akan terjadinya bencana letusan gunung Kelud, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Pertama, Terjadi migrasi binatang, yakni hewan-hewan liar yang tinggal di atas gunung lari ke bawah (turun gunung). Menurut masyarakat, salah satu tanda alam bahwa gunung Kelud akan meletus ditandai dengan terjadinya migrasi berbagai macam binatang liar, seperti monyet, ular, burung, dan sebagainya, yang turun ke wilayah permukiman masyarakat (penduduk). Migrasinya berbagai binatang yang masuk

ke wilayah permukiman masyarakat (penduduk) tidak seperti biasanya, yakni bukan saja tujuan mencari makanan akan tetapi juga untuk mencari perlindungan tempat yang aman. Berbagai binatang tersebut tidak hanya turun masuk ke permukiman masyarakat (penduduk) pada malam hari saja, akan tetapi juga pada siang hari. Binatang-binatang ini migrasi dari gunung ke wilayah permukiman bukan hanya satu-satu akan tetapi juga kadang secara bergerombol. Sebagaimana dinyatakan oleh bapak Spd (37 tahun), Kepala Dusun Sambirejo, sebagai berikut:

“...yang dipahami oleh masyarakat disini itu kalau ada kejadian aneh diluar biasanya, seperti binatang-binatang pada muncul masuk ke wilayah perkampungan, sawah, kebun warga, seperti Monyet, Kijang, bahkan Harimau, yang biasanya tidak muncul, bukan saja hanya pada malam hari tapi juga siang hari, itu menandakan bahwa akan terjadi sesuatu dengan gunung Kelud...”

Terjadinya migrasi binatang (hewan) liar ini dapat dipastikan karena binatang-binatang tersebut merasa tidak nyaman berada di atas gunung akibat suhu yang bertambah panas. Binatang-binatang tersebut turun gunung untuk menjauhi panas yang menyengat dan menuju ke kaki gunung, bahkan ke permukiman warga. Binatang-binatang yang turun ini merupakan binatang liar yang habitatnya berada di gunung tersebut, sehingga diantara dari mereka mungkin terlihat asing. Ketika hal ini sudah terjadi, maka masyarakat harus waspada, bukan hanya terhadap turunnya binatang liar, namun juga terhadap status dari gunung berapi tersebut.

Kedua, Debit sumber air berkurang dan mengering. Selain terjadinya migrasi

binatang, tanda-tanda alam bahwa Gunung Kelud akan meletus adalah ditandai dengan berkurangnya atau mengeringnya debit sumber air, seperti mata air, sumur, dan sungai kecil. Menurut pemahaman masyarakat, salah satu tanda alam bahwa gunung Kelud akan meletus adalah jika air dari beberapa sumber mata air yang ada di wilayah permukiman masyarakat debitnya berkurang atau mengering. Dinyatakan oleh bapak Syn (47 tahun), Ketua Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) Desa Pandansari, sebagai berikut:

“...salah satu peringatan alam bahwa Gunung Kelud akan meletus atau akan terjadi sesuatu, ditandai antara lain kalau sumber mata air yang berasal dari gunung itu mengering, selain itu ya banyak binatang yang turun gunung, terus tumbuhan pada layu, suasana terasa panas dan gerah, terasa ada getaran-getaran. Nah kalau ada tanda-tanda seperti ini maka masyarakat mulai waspada...”

Alasan mengenai sumber mata air yang mengering ini, karena didasarkan semakin meningkatnya suhu di sekitaran gunung. Apabila magma yang ada di perut bumi mengalami kenaikan hingga mendekati permukaan bumi, maka suhu akan dirasakan semakin panas. Akibatnya sumber air atau mata air yang berada di sekitar gunung tersebut akan kepanasan pula. Seperti sifat air yang kepanasan, mata air tersebut akan menguap menjadi gas dan terbang ke atas. Akibatnya jumlah air menjadi semakin sedikit karena banyak yang telah menguap, lalu mata air tersebut akan mengering. Alasan mengapa air yang ada di dalam tanah ini menguap karena ketika magma naik ke atas, pada lapisan tanah tertentu akan terasa sangat panas, hingga dapat mengeringkan sumber air yang ada di dalam tanah tersebut.

Ketiga, Muncul awan panas dan cuaca gerah. Selain migrasi binatang dan berkurangnya debit amat air, masyarakat juga memahami adanya tanda-tanda alam sebagai isyarat gunung Kelud akan meletus, yakni munculnya awan aneh sehingga menyebabkan hawa (cuaca) terasa panas dan gerah.

Awan panas merupakan asap yang dikeluarkan oleh gunung berapi sebagai tanda bahwa gunung tersebut mempunyai aktivitas magma yang tinggi dan siap untuk erupsi. Awan panas dari gunung berapi ini berupa kepulan asap berwarna terkadang putih dan terkadang coklat yang mana keluarnya bisa dalam jumlah sangat besar, ataupun jumlah yang biasa. Awan panas ini mempunyai sifat yang sangat panas. Awan panas berasal dari dalam perut gunung atau perut bumi yang bersumber dari magma yang mempunyai suhu yang sangat panas. Awan panas mempunyai sifat seperti asap, yakni mudah terbawa angin sehingga awan panas pun bisa berpindah tempat hingga membumbung tinggi ke angkasa atau terbang ke wilayah lain. Kecepatan perpindahan awan panas ini juga sangat tinggi dan sifatnya merusak, terlebih jika melewati tumbuhan, binatang atau bahkan manusia. Apabila jumlah kepulan besar awan panas ini menerjang hutan, maka pohon- pohon yang ada di hutan tersebut bisa mati. Demikian pula apabila awan panas menerjang kandang ternak, maka ternak-ternak yang ada di kandang juga bisa mati. Tidak lain apabila awan panas menerjang pemukiman manusia, pastilah juga terdapat banyak korban jiwa. Selain bersifat panas, awan panas juga mengandung gas-gas yang sifatnya tidak baik bagi pernafasan. Awan panas oleh masyarakat yang berada di sekitar gunung dijuluki sebagai “Wedhus Gembel”

yang berarti biri-biri karena awan panas ini mempunyai bentuk yang menggulung-gulung layaknya bulu kambing biri-biri.

Tanda atau ciri dari Gunung Kelud akan meletus adalah meningkatnya suhu udara yang ada di sekitar gunung tersebut. Peningkatan suhu ini terutama dirasakan oleh masyarakat yang berada di sekitar lereng gunung tersebut ataupun kaki gunung. Naiknya suhu disekitar gunung ini disebabkan oleh aktivitas magma yang semakin banyak atau semakin meningkat sehingga akan berkumpul di dekat permukaan bumi. Dengan demikian, suhu panas yang dimiliki oleh magma tersebut akan merambat hingga mempengaruhi lapisan tanah yang ada atau yang menyusun badan gunung tersebut.

Keempat, Muncul gempa (getaran). Masyarakat juga memiliki pengetahuan terkait tanda-tanda alam akan terjadinya bencana letusan gunung Kelud, yakni jika terjadi getaran-getaran kecil disertai kilat dan bunyi gelegar kecil. Munculnya gempa (getaran) kecil ini dirasakan oleh masyarakat dalam waktu yang singkat, biasanya dalam beberapa detik saja, dan frekuensi yang sering, biasanya tiga hingga lima kali dalam sehari.

Tanda gunung akan meletus adalah sering terjadinya gempa vulkanik. Gempa vulkanik merupakan gempa yang berasal dari aktivitas gunung berapi. Aktivitas gunung berapi ketika akan meletus yang paling banyak adalah berupa aktivitas magma di dalam perut bumi. Magma yang semakin aktif di dalam perut bumi selain menimbulkan suara yang gemuruh juga akan menimbulkan getaran-getaran. Getaran-getaran inilah yang pada akhirnya sampai hingga ke permukaan bumi dan masyarakat menyebutnya sebagai gempa.

Gempa yang ditimbulkan karena aktivitas gunung berapi ini memanglah tidak terlalu besar. Gempa vulkanik umumnya lebih kecil daripada gempa tektonik. Gempa vulkanik ini akan sering dirasakan, terlebih oleh masyarakat yang ada di sekitar gunung tersebut. Semakin mendekati gunung akan meletus maka intensitas terjadinya gempa akan semakin tinggi. Gempa vulkanik akan sering terjadi, baik yang berkekuatan sangat rendah maupun yang besar.

Kelima, Tumbuhan dan tanaman layu dan berubah warna. Bagi masyarakat, salah satu tanda alam Gunung Kelud akan meletus adalah jika berbagai tumbuhan atau tanaman menjadi layu dan daunnya berubah warna menjadi pucat dan kekuning-kuningan. Sumber dari kekeringan dan kelayuan tanaman adalah suhu panas yang datang dari magma yang naik ke atas. Suhu panas yang ada di dalam panas dapat membuat tanaman- tanaman menjadi layu, terlebih panasnya ini meningkat secara signifikan. Efeknya akan lebih parah daripada layu akibat musim kemarau. Karena ketika magma terkumpul tepat di balik gunung, ada salah satu lokasi dimana magma dapat bergerak ke atas dekat dengan lapisan tanah. Hal inilah yang menyebabkan tumbuhan layu, bahkan mati seketika.

Keenam, Tokoh Tetua masyarakat (Juru Kunci Gunung Kelud) bermimpi didatangi "*Lembu Suro*". Masyarakat sekitar gunung Kelud memiliki keyakinan atau kepercayaan bahwa penghuni gunung Kelud yakni "*Lembu Suro*" akan datang menemui tokoh Tetua Masyarakat (Juru Kunci gunung Kelud) untuk memberitahu bahwa gunung Kelud akan meletus. dinyatakan oleh ibu Sitin (51 tahun), kepada Desa Pandansari, sebagai berikut:

"...Gunung Kelud ini dijaga oleh seorang Kuncen atau "Juru Kunci" namanya mbah Ronggo usia 60 tahun. Nah masyarakat percaya bahwa Mbah Ronggo ini bisa berhubungan atau berkomunikasi secara ghaib lewat mimpi bertemu dengan Lembu Suro penunggu dan penjaga Gunung Kelud. Jika akan terjadi peristiwa erupsi atau letusan Gunung Kelud, masyarakat percaya bahwa Lembu Suro akan memberi pesan kepada mbah Ronggo..."

Biasanya Juru Kunci gunung Kelud bermimpi didatangi oleh "*Lembu Suro*" untuk memberitahukan agar masyarakat yang tinggal di sekitar gunung Kelud untuk mengungsi karena gunung Kelud akan meletus. Mbah Ronggo (60 tahun) adalah Juru Kunci Gunung Kelud, yang dipercaya oleh masyarakat sebagai "*media*" penghubung antara penghuni gunung Kelud, yakni "*Lembu Suro*" dan masyarakat. Menurut kepercayaan dan pengetahuan masyarakat, jika gunung Kelud akan meletus maka mbah Ronggo sebagai Juru Kunci gunung Kelud pasti akan memberitahukannya kepada masyarakat.

Oleh karena itu, masyarakat sekitar Gunung Kelud berkeyakinan bahwa salah satu tanda akan terjadinya bencana erupsi Gunung Kelud adalah apabila mbah Ronggo sudah bermimpi ketemu *Lembu Suro*.

Sedangkan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat terhadap Gunung Kelud tercermin dalam bentuk Ritual "*Sesaji Gunung Kelud*" dan "*Budaya Gotong Royong*" merawat Gunung Kelud. Bapak Prn (49 tahun), Kepala Dusun Plumbang dan Wakil Ketua Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) Desa Pandansari menyatakan sebagai berikut:

“...Kami masyarakat yang tinggal sekitar Gunung Kelud memiliki tradisi yakni berupa Ritual “Sesaji Gunung Kelud” dan “Budaya Gotong Royong” merawat Gunung Kelud. Tradisi ini merupakan bentuk nilai kearifan local masyarakat dalam merawat Gunung Kelud agar Gunung Kelud tidak menurunkan bencana kepada masyarakat. Ritual sesaji Gunung Kelud dilakukan agar Lembu Suro tidak marah...”

Pertama, Ritual “Sesaji Gunung Kelud”. Masyarakat memandang bahwa gunung Kelud penuh dengan misteri. Masyarakat memahami misteri gunung Kelud berkaitan dengan kepercayaan-kepercayaan sebagai berikut: (1) Sejarah Gunung Kelud dan “Lembu Suro”, (2) Letusan Gunung Kelud terjadi sebagai akibat dari kutukan “Lembu Suro”, (3) Gunung Kelud adalah tempat dikuburnya Keris Mpu Gandring yang sangat sakti, (4) Buaya Putih sang penunggu kawah Gunung Kelud, dan (5) Upacara adat ritual Gunung Kelud untuk menolak bala kutukan “*Lembu Suro*”.

Setiap tahun secara rutin, di bulan Suro, masyarakat sekitar lereng gunung Kelud selalu mengadakan upacara adat *Wage Keramat*, karena wage di bulan Suro adalah hari yang identik dengan meletusnya gunung Kelud. Dalam upacara adat tersebut, masyarakat meminta perlindungan kepada Tuhan dari macam bala yang disebabkan kutukan “*Lembu Suro*”. Sedangkan bagi umat hindu, upacara adat ini dilakukan sebagai rasa sukur kepada *Sang Hyang Widhi*.

Bagi orang Jawa tradisional, khususnya yang tinggal di sekitar Gunung Kelud, keberadaan Gunung Kelud tidak hanya merupakan entitas gunung yang muncul akibat tekanan magma dari dalam bumi

ring of fire, tapi juga entitas yang hidup yang selalu menunjukkan siapa dirinya dan menjaga eksistensinya. Bagi orang Jawa, keberadaan mitologi dan legenda gunung merupakan symbol kultural yang melekat dalam tradisi kehidupannya. Mitos dan legenda telah memperkaya khasanah tradisi kehidupan orang Jawa sehingga banyak memunculkan kearifan lokal yang berguna untuk menjaga kelestarian lingkungan serta mewaspadaai setiap gejala anomali yang muncul di alam sekitarnya. Hal ini terjadi karena kebudayaan tradisional akan hadir di tengah kelompok orang-orang yang menjalani kehidupan dengan latar belakang mitologi dan legenda di sekitarnya. Dengan demikian, mitologi dan legenda adalah bagian yang tak terpisahkan dalam pembentukan peradaban manusia, sejak zaman tradisional sampai zaman modern.

Gunung Kelud juga tak lepas dari mitologi yang mengiringi keberadaannya. Meletusnya Gunung Kelud merupakan bentuk “kemarahannya” terhadap kondisi yang ada di sekelilingnya. Munculnya kawah Gunung Kelud misalnya, dipercayai orang Jawa tradisional sebagai “tragedi” pengkhianatan cinta. Menurut legenda dan kitab Pararaton yang diceritakan turun-temurun masyarakat tradisional sekitar Gunung Kelud, fenomena meletusnya Gunung Kelud tersebut adalah akibat perbuatan Putri dari Kerajaan Jenggala (meliputi daerah Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Tulungagung) yang bernama Dewi Kili Suci. Sang Dewi yang amat cantik ini, konon, dilamar oleh dua raja siluman sakti bernama Mahesa Suro (manusia berkepala kerbau) dan Lembu Suro (berkepala sapi).

Tentu saja Sang Dewi tak bisa menolak lamaran kedua raja itu. Namun, gadis cantik

ini punya akal agar tidak bisa dinikahi kedua raja siluman tersebut. Ia menerima pinangan keduanya asal memenuhi sarat yang dimintanya; yaitu kedua raja harus membuat sumur di puncak Gunung Kelud. Sumurnya yang pertama harus berbau amis dan kedua berbau wangi. Batas waktunya hanya satu malam, mulai terbenam matahari sampai ayam berkokok. Merasa punya kesaktian yang hebat, kedua raja siluman tersebut siap memenuhi sarat sang dewi. Keduanya membuat sumur yang diminta. Tapi ketika kedua raja siluman itu berada di dasar sumur, Sang Putri Raja Jenggala memerintahkan prajurit kerajaan untuk menutup sumur itu dengan batubatuan. Akibatnya kedua raja siluman itu pun tewas. Tapi sebelum mengembuskan napas terakhir, Lembu Suro bersumpah akan membalas dendam. Oleh karena itu untuk menolak “bala” kutukan Lembu Suro, maka masyarakat sekitar Gunung Kelud melakukan ritual “*Sesaji Gunung Kelud*”.

Kedua, “Budaya Gotong Royong” merawat Gunung Kelud. Apabila perilaku manusia negatif maka alam pun akan negatif pula. Konsep keseimbangan yang menjadi kearifan penduduk sekitar Gunung Kelud merupakan implementasi dari nilai-nilai yang mereka percayai bahwa para “penghuni” akan murka ketika mereka menyimpang dari kaidah-kaidah alam yang benar dan seimbang. Perilaku yang selalu diusahakan untuk tidak *nyebal* (menyimpang) dari kaidah-kaidah keseimbangan alam yang selalu selaras, serasi dan seimbang, untuk menjaga keutuhan ekosistem.

Manusia harus memperlakukan lingkungan di sekitarnya sebagai tempat tinggal yang telah memberikan segalanya untuk kehidupan masyarakat, sehingga ada

tanggung jawab yang besar untuk menjaga dan mengelolanya. Kearifan lingkungan masyarakat Gunung Kelud dalam mengelola lingkungannya dilakukan secara bergotong royong, misalnya menjaga sumber-sumber air yang ada dengan melakukan perlindungan dan membuat aturan-aturan adat yang memberikan larangan-larangan kepada masyarakat, yang memberikan penilaian negatif dari dampak yang akan ditimbulkan bila tidak dilakukan, untuk dapat menjaga dan mengelola sumber-sumber air yang ada.

b. Konsep mitigasi bencana berbasis pengetahuan dan kearifan sosial masyarakat lokal

Masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Kelud, khususnya masyarakat Desa Pandansari, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, memiliki konsep tersendiri dalam fase mitigasi bencana Gunung Kelud yang didasarkan atas pengetahuan dari tanda-tanda alam. Dalam fase Mitigasi dan Kesiapsiagaan (*Mitigation and preparedness*) ini, masyarakat di sekitar Gunung Kelud mendasarkan pada isyarat-isyarat (tanda-tanda) alam dalam menilai apakah Gunung Kelud akan meletus atau tidak. Tanda-tanda alam dimaksud sebagaimana sudah dijelaskan di atas, yakni: terjadinya migrasi binatang (hewan) liar dari atas gunung yang turun ke wilayah pemukiman penduduk, debit sumber air berkurang dan mengering, muncul awan panas dan cuaca gerah, muncul gempa (getaran) kecil, tumbuhan dan tanaman layu dan berubah warna, dan tokoh tetua masyarakat (Juru Kunci Gunung Kelud) bermimpi didatangi “*Lembu Suro*”. Jadi dalam fase mitigasi bencana, masyarakat berpijak kepada tanda-tanda alam sebagai basis pengetahuan dalam memahami

gejala-gejala bencana erupsi Gunung Kelud.

Sementara untuk mencegah agar tidak terjadi bencana erupsi Gunung Kelud, kemudian masyarakat melakukan ritual sesaji Gunung Kelud sebagai upaya menolak bala “Kutukan Lembu Suro”. Selain itu, masyarakat juga melakukan gotong-royong untuk menjaga dan memelihara alam Gunung Kelud agar tetap lestari, sehingga alam Gunung Kelud tidak menjadi murka.

Namun demikian, tidak semuanya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang tanda-tanda alam akan terjadinya bencana erupsi (letusan) Gunung Kelud tersebut dapat dijadikan dasar dalam mitigasi bencana. Masyarakat juga diberikan pemahaman tentang indikator ilmiah tanda-tanda Gunung Kelud akan erupsi. Sebagaimana dinyatakan oleh bapak Prn (49 tahun), Wakil Ketua Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) Desa Pandansari, sebagai berikut:

“...dalam proses mitigasi bencana Gunung Kelud, pengetahuan dan kearifan lokal masyarakat tetap dijadikan sebagai bahan pertimbangan namun masyarakat juga diberikan pemahaman dan informasi tentang pengetahuan ilmiah terkait tanda-tanda akan terjadinya bencana erupsi Gunung Kelud...”

Dengan demikian, maka dapat dinyatakan konsep mitigasi bencana erupsi Gunung Kelud berbasiskan pengetahuan dan kearifan local masyarakat diperkuat oleh pengetahuan ilmiah bencana gunung api.

KESIMPULAN

Masyarakat yang tinggal di sekitar gunung

Kelud, khususnya masyarakat Desa Pandansari, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, memiliki pengetahuan tentang tanda-tanda alam akan terjadinya erupsi Gunung Kelud, yakni: (1) Terjadi migrasi binatang seperti monyet, ular, burung, dan sebagainya yang turun ke wilayah permukiman masyarakat, (2) Debit sumber air, seperti sumur, mata air, dan sungai kecil berkurang dan mengering, (3) Muncul awan panas dan gerah, (4) Muncul gempa-gempa kecil disertai kilat dan bunyi gelegar kecil, (5) Tumbuhan dan tanaman layu dan berubah warna, dan (6) Tokoh Tetua masyarakat bermimpi didatangi “*Lembu Suro*”. Sedangkan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat terhadap Gunung Kelud tercermin dalam bentuk “*Ritual Sesaji Gunung Kelud*” dan “*Budaya Gotong Royong*” merawat Gunung Kelud. Dalam proses mitigasi dan kesiap-siagaan menghadapi bencana erupsi Gunung Kelud, masyarakat menjadikan tanda-tanda alam tersebut sebagai pengetahuan dalam menilai apakah akan terjadi bencana erupsi Gunung Kelud atau tidak.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini maka selanjutnya penulis memberikan saran sebagai berikut:

Pertama, bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang sebaiknya melakukan pendekatan mitigasi bencana letusan Gunung Kelud yang berbasis pengetahuan dan pemahaman masyarakat diintegrasikan dengan mitigasi ilmiah.

Kedua, bagi masyarakat sekitar Gunung Kelud perlu juga memperhatikan dan mengikuti petunjuk dari pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang tentang tanda-tanda ilmiah akan terjadinya letusan (erupsi) Gunung Kelud, mengingat tanda-tanda akan terjadinya letusan Gunung Kelud sebagaimana yang dipahami oleh

masyarakat tidak selalu muncul bahkan sebagian bersifat mitos.

Ketiga, perlu dibentuk jaringan komunikasi antar-desa yang tinggal di sekitar Gunung Kelud untuk saling memberikan informasi terkait munculnya tanda-tanda alam akan terjadinya bencana letusan Gunung Kelud sebagaimana yang dipahami oleh masyarakat, mengingat bahwa tanda-tanda alam tersebut tidak muncul secara merata.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung kelancaran penelitian ini, khususnya kepada Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (DP2M) Universitas Muhammadiyah Malang yang telah membiayai penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Babbie, E. (2008). *The Basics of Social Research*. Belmont, USA: Thomson Wadsworth.
- Beach, M. (2010). *Disaster Preparednes and Management*. Philadelphia: F.A. Davis Company.
- Belanawane S., M. (2015). "Kampung Siaga Bencana Sebagai Instrumen Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas di Indonesia: Politik Pembangunan dan Partisipasi Dalam Diskursus Pembangunan Kebencanaan". *SOSIOKONSEPSIA* Vol. 5 No. 1, September-Desember 2015. Jakarta: Balitbang Depsos RI.
- Debnath, B. (2007). *Resettlement and Rehabilitation*. Economic and Political Weekly, Vol. 42, Mo. 32 (Aug. 11-17, 2007), p.3340.
- Denzin, N.K., & Lincoln, Y.S. (2009). *Handbook of Qualitative Research* (terj.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Sosial RI. (2004). Buku Panduan: Pola Penanganan Korban Bencana Sosial di Indonesia. Jakarta: Direktorat Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial.
- Djajaningrat, H. (ed.). (2011). *Pedoman Praktis Manajemen Bencana*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Hendarsah, H. (2012). Pemetaan Partisipatif Ancaman, Strategi Coping dan Kesipasiagaan Masyarakat Dalam Upaya Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Masyarakat di Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang. *SOSIO KONSEPSIA*, Vol. 17 No. 03, September-Desember. Jakarta: Balitbang Depsos RI
- Kementerian Sosial RI. (2004). Pola Penangan Korban Bencana Sosial di Indonesia. Jakart: Direktorat Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial.
- Indiyanto, A.; & Kuswanjono, A. (2012). *Konstruksi Masyarakat Tangguh Bencana*. Bandung: Mizan.
- Kalof, L., Dan, A., & Dietz, T. (2008). *Essentials of Social Research*. Berkshire: Open University Press.
- Kusumasari, B. (2014). *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal*. Yogyakarta: Gava Media.
- Luce, H., & Wisner, B. (1993). *Disaster Vurnerability: Scale, Power and Daily Life*. GeoJournal, Vol. 30, No. 2, Vulnerability, Hunger and Famine (June 1993), pp. 127-40.

- Marvasti, A.B. (2004). *Qualitative Research in Sociology: An Introduction*. London: SAGE Publications.
- Mishra, P. K. (2002). *Maps and Disaster Management*. Economic and Political Weekly, Vol. 37, No. 47 (Nov. 23-29, 2002), pp. 4676-4677.
- Neuman, W. L. (2007). *Basics of Social Research: Qualitative and Quantitative Approaches*. Boston: Pearson Education, Inc.
- Nurjanah, dkk. (2013). *Manajemen Bencana*. Bandung: ALFABETA.
- Picou, J. S., Marshall, B.K., & Gill, D. A. (2004). *Disaster, Litigation, and the Corrosive Community*. Social Forces, Vol. 82, No. 4 (Jun., 2004), pp. 1493-1522.
- Ramli, S. (2011). *Pedoman Praktis: Manajemen Bencana*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana*. Jakarta: Kemenkumham.
- Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana*. Jakarta: BNPB.
- Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana*. Jakarta: BNPB.
- Rodriguez, H., Quarantelli, E.L., & Dynes, R.R. (eds.). (2007). *Handbook of Disaster Research*. New York: Springer Science+Business, LLC.
- Salim, A. (peny.). (2001). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial: Pemikiran Norman K. Denzin & Egon Guba, dan penerapannya*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Wagiran. (2009). *Pengembangan Model Pendidikan Kearifan Lokal di Wilayah Propinsi DIY dan Mendukung Perwujudan Visi Pembangunan DIY Menuju tahun 2025*. Yogyakarta: Setda Provinsi DIY.
- Wiguna, I.P.A., Citrosiswoyo, W., & Widodo, A (eds.). (2009). *Penanggulangan Semburan Lumpur Sidoarjo*. Surabaya: PSKB ITS.

RASA SALING PERCAYA ANTARA PEMULUNG DAN PENGEPUK DI KABUPATEN BEKASI: PERSPEKTIF KAPITAL SOSIAL

MUTUAL TRUST BETWEEN SCAVANGERS AND COLLECTORS IN BEKASI REGION: SOCIAL CAPITAL PERSPECTIVE

Mutiara Irfarinda dan Robert MZ Lawang

Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP UI
Gedung Nusantara 2 lantai 2 R.C.L Rudolf, Kampus FISIP UI Depok, Depok, 16424

E-mail: mutiarairfarinda@gmail.com

Diterima: 17 April 2018; Direvisi: 3 Mei 2018; Disetujui: 8 Agustus 2018

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang timbulnya proses kepercayaan antara pemulung dan pengepul. Kepercayaan yang berkembang tersebut diketahui dapat membentuk kapital sosial di dalam hubungan kerja antara pemulung dan pengepul. Elemen kapital sosial selain kepercayaan juga ditemukan dalam penelitian ini, diantaranya unsur jaringan dan norma yang digunakan untuk memperlancar aktivitas jual beli antara pemulung dan pengepul. Fokus penelitian ini adalah unsur percaya antara pemulung dan pengepul dan kontribusinya unsur percaya tersebut pada kelancaran aktivitas jual beli antara pemulung dan pengepul. Rasa saling percaya antara keduanya juga dianggap penting dalam rangka meningkatkan kapital sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hubungan kerja antara pemulung dan pengepul ini besar dipengaruhi oleh rasa saling percaya. Hubungan kerja kedua aktor ini dapat langgeng selain karena mendapat mutual benefit, keduanya juga sudah memiliki rasa saling percaya. Rasa percaya yang terjadi di antara kedua aktor semakin kuat, maka dapat meningkatkan unsur jaringan dan melonggarkan unsur norma, sehingga kapital sosial dapat dikatakan meningkat.

Kata Kunci: kapital sosial, saling percaya, pemulung.

Abstract

The objective of this study is describing the emergence of a trust process between scavengers and collectors. Trust that is growing form capital social in the working relationship between scavengers and collectors. Elements of social capital other than trust are also found in this study, including the elements of networks and norms used to facilitate buying and selling activities between scavengers and collectors. The focus of this study is the element of trust between scavengers and collectors and the contribution of these elements of trust in the smoothness of buying and selling activities between scavengers and collectors. The mutual trust between the two is also considered important in order to improve social capital. The results showed that in the working relationship between scavengers and collectors is greatly influenced by mutual trust. The working relationship of these two actors can be lasting apart from having mutual benefit, they also have mutual trust. The trust between the two actors is getting stronger, it can increase the elements of the network and loosen the elements of the norm, so that social capital would improve significantly.

Keywords: social capital, mutual trust, scavengers.

PENDAHULUAN

Permasalahan yang dihadapi negara-negara berkembang pada umumnya termasuk Indonesia adalah pertumbuhan penduduk usia kerja yang sangat cepat. Menurut Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi angkatan kerja di Indonesia bertambah 2,02 juta jiwa pada tahun 2012, yang secara umum masih didominasi oleh lulusan SD. Pesatnya peningkatan angkatan kerja, tetapi di lain sisi rendahnya daya serap tenaga kerja terutama sektor formal yang tidak diimbangi dengan perluasan lapangan kerja akan menimbulkan masalah pengangguran. Hal ini akibat dari banyaknya sumber daya manusia yang kurang memiliki keahlian khusus untuk memasuki dunia kerja sektor informal.

Salah satu bentuk kegiatan sektor informal yang cukup menarik saat ini adalah pemulung. Keterbatasan lahan dan kemiskinan di daerah pedesaan, serta tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan di daerah perkotaan menjadi penyebab mereka bekerja sebagai pemulung. Bekerja sebagai pemulung di daerah perkotaan juga muncul akibat adanya nilai ekonomi dari sampah dan banyaknya jumlah sampah yang dihasilkan masyarakat. Pemulung beranggapan bahwa sampah adalah ladang yang dapat menghidupi keluarga mereka (Susanti, 2012).

Pada umumnya, pekerjaan sebagai pemulung lebih banyak digeluti oleh masyarakat miskin (Ameriani, 2006). Tidak banyak yang melirik pekerjaan sebagai pemulung karena kebanyakan hanya sebagai pelarian dari sulitnya mencari pekerjaan saat ini. Pemulung adalah pekerja yang mandiri, dimana ketika pemerintah belum mampu menyediakan lapangan pekerjaan untuk pemulung, namun dengan cara memulung sampah mereka justru mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi mereka sendiri (Taufik, 2013).

Menurut Eka (2009), selain karena keterbatasan lahan sektor formal di perkotaan, faktor pendidikan yang rendah serta minimnya keterampilan yang dimiliki para migran pun menjadi salah satu faktor menjamurnya sektor informal di perkotaan. Keberadaan pemulung semakin berkembang tidak saja di kota metropolitan, tetapi juga di kota-kota pendukung kota metropolitan. Parmonangan (2013) juga menjelaskan ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya pemulung yaitu kemiskinan, pendidikan, rendahnya keterampilan dan tidak adanya modal usaha. Faktor lainnya adalah tuntutan hidup yang harus memberi makan keluarga dan menyekolahkan anak, belum lagi minimnya lapangan kerja untuk rakyat kecil. Fenomena ini menunjukkan bahwa tidak saja kaum pria, namun kaum wanita juga ikut termotivasi untuk bekerja sebagai pemulung. Sebagai tenaga kerja dalam keluarga, wanita memilih bekerja di sektor informal agar dapat membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga. Pada umumnya kebanyakan motivasi tenaga kerja wanita adalah untuk membantu menghidupi keluarga.

Kemiskinan sebagai masalah bangsa, banyak dialami oleh pekerja non formal seperti pemulung, pedagang kaki lima, pengamen jalanan, dan lain sebagainya, sehingga banyak orang memiliki stigma negatif terhadap masyarakat golongan ini. Padahal pemulung merupakan alternatif tanpa biaya untuk mengurangi kotornya Wilayah Bekasi dan Kabupaten Bogor karena Burangkeng sendiri letaknya di antara dua kota satelit tersebut. Oleh karena itu upaya yang peneliti lakukan adalah melakukan pengkajian tentang peran *trust building* pada kapital sosial dalam kehidupan pemulung Burangkeng.

Kapital sosial sendiri didefinisikan oleh banyak ahli dan salah satunya adalah Putnam (2000) dalam bukunya yang berjudul *Bowling*

Alone: The Collapse and Revival of American Community, menyatakan bahwa Kapital Sosial menunjuk pada bagian-bagian dari organisasi sosial seperti kepercayaan, norma dan jaringan yang dapat meningkatkan efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi tindakan-tindakan yang terkoordinasi. Dengan kata lain kapital sosial itu bersifat produktif, memungkinkan pencapaian tujuan tertentu, yang tanpa kontribusinya tujuan itu tidak akan tercapai. Modal sosial mengenal 3 aspek penting yang mengindikasikan adanya nilai-nilai kapital sosial yang menurut Robert Putnam (Lawang, 2005) bahwa kapital sosial ini dilihat sebagai institusi sosial yang melibatkan jaringan (*Networks*), norma-norma (*Norms*), kepercayaan sosial (*Social Trust*) yang mendorong pada sebuah kolaborasi sosial (koordinasi dan kooperasi) untuk kepentingan bersama.

Dasar teori Putnam menekankan bahwa kapital sosial sebagai suatu nilai tentang kepercayaan timbal balik (*mutual trust*) antara anggota masyarakat maupun masyarakat secara keseluruhan terhadap pemimpinnya. Kapital sosial ini dilihat sebagai institusi sosial yang melibatkan jaringan (*networks*), norma-norma (*norms*) dan kepercayaan sosial (*social trust*) yang mendorong pada sebuah kolaborasi sosial (koordinasi dan kooperasi) untuk kepentingan bersama. Hal ini juga mengandung pengertian bahwa diperlukan adanya suatu *social networks* (*networks of civic engagement*) ikatan/jaringan sosial yang ada dalam masyarakat dan norma yang mendorong produktivitas komunitas.

Menurut Gunawan (2012), kajian mengenai kehidupan pemulung ini berawal dari sebuah keprihatinan atas kehidupan pemulung pada umumnya hidup di kawasan yang kumuh, Namun mereka masih dapat bertahan dengan segala peluang dan hambatan yang ada. Pekerjaan sebagai pemulung memang bukan pilihan utama namun keterbatasan

pendidikan dan skill membuat sebagian orang mau melakoni pekerjaan seperti ini. Kajian seperti ini perlu untuk di teliti karena melihat sebagian orang berlomba-lomba untuk bekerja di sektor formal. Bentuk hubungan kerja dan sosial yang terjadi di antara pemulung, lapak, dan masyarakat, menarik untuk dikaji karena hubungan ini menjamin keberlangsungan hidup. Selain itu kepercayaan yang di miliki bisa memperkuat kelompok pemulung dan hubungan timbal balik ini juga merupakan sebuah modal yang dimiliki oleh pemulung dimana satu sama lainnya saling membutuhkan dan menguntungkan.

Berangkat dari hal tersebut peneliti mencoba menggambarkan proses berkembangnya rasa saling percaya antara pemulung dan pengepul yang dapat memperlancar usaha jual beli hasil pulungan. Pada studi ini, lokasi penelitian adalah di Kampung Pemulung Burangkeng Kota Bekasi. Pertimbangan pemilihan lokasi ini adalah karena lokasi yang strategis dengan objek untuk diteliti, yaitu pemulung yang sudah bermukim di sekitar Burangkeng dan terdapatnya Tempat Pembuangan Akhir (TPA). TPA di Burangkeng ini merupakan salah satu TPA andalan bagi warga Kota Bekasi. Studi ini berusaha menyelidiki proses timbulnya *trust building* yang merupakan bagian dari kapital sosial pada kehidupan pemulung.

METODE

Berdasarkan latar belakang dan tujuan dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui proses berkembangnya rasa saling percaya antara pemulung dan pengepul di TPA Burangkeng, maka pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Rubin (2001) menjelaskan bahwa penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang berusaha menemukan makna terdalam dari pengalaman khusus

manusia dan bertujuan untuk menghasilkan observasi yang secara teoritis lebih kaya dan tidak mudah direduksi dalam bentuk angka. Oleh karena itu pendekatan kualitatif ini menghasilkan data berupa kata-kata tulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Creswell (2016), proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data spesifik dari para informan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data.

Selanjutnya, untuk menggambarkan proses pengembangan hubungan saling percaya antara pemulung dan pengepul, penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Neuman (2006) menyebutkan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang ingin menggambarkan suatu hal dengan kata-kata dan menyampaikan profil, tipe-tipe klasifikasi, dan gambaran besar dari langkah-langkah untuk menjawab pertanyaan seperti siapa, kapan, dimana, dan bagaimana. Sementara itu berdasarkan jangka waktu informasi yang dipakai dalam penelitian ini maka digunakan penelitian cross sectional yakni penelitian yang menyelidiki dari banyak kasus pada suatu kurun waktu tertentu saja (Neuman, 2006). Untuk itu maka peneliti menyelidiki informasi secara mendalam mengenai pengalaman dan pandangan tentang rasa saling percaya antara pemulung dan pengepul sehingga untuk jangka panjang saling percaya tersebut bermanfaat bagi kegiatan selanjutnya.

Di dalam penelitian ini yang dimaksudkan pemulung adalah pemulung yang mendapatkan barang bekas dengan cara memungut, mencari sampah di jalanan, TPS, TPA, atau rumah-rumah untuk dijual. Pada umumnya mereka bekerja dengan jalan kaki menggunakan alat

kerja sederhana seperti karung dan gancu dan ada juga yang menggunakan sepeda berkeranjang dan gerobak, mereka juga bekerja tidak dibatasi oleh waktu jadi bekerja sesuka hati mereka. Jenis sampah yang dipungut adalah jenis sampah plastik, karet, minuman kaleng dengan besi, dan lain-lain. Penelitian ini mencoba menggambarkan tentang rasa saling percaya antara pemulung dan pengepul dan kontribusi saling percaya untuk pekerjaan mereka selanjutnya.

HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum Lokasi

Kelurahan Burangkeng terdiri atas 15 RW dan 92 RT, merupakan salah satu dari tujuh kelurahan yang ada di wilayah kecamatan Setu. Wilayah kelurahan Burangkeng berbatasan dengan beberapa wilayah lainnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Cimuning dan Cikarang Selatan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tamansari dan Cileungsi Bogor
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Sumur Batu dan Bantar Gebang, Bekasi
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ciledug dan Kecamatan Serang Baru

Berdasarkan data kependudukan 2017, Kelurahan Burangkeng yang berada di Kecamatan Setu khususnya memiliki 23.761 jiwa yang dimana pembagiannya sebesar 11.804 jiwa penduduk laki-laki dan 11.957 penduduk perempuan. Burangkeng merupakan salah satu dari 3 kelurahan yang memiliki kepadatan penduduk tinggi untuk wilayah Kecamatan Setu. Hal ini disebabkan karena banyaknya wilayah permukiman yang tumbuh di Burangkeng dan sebagai pusat kegiatan ekonomi penduduk. Pusat kegiatan ekonomi penduduk di Burangkeng salah satunya

digerakkan oleh TPA terbesar kedua untuk wilayah Bekasi setelah TPA Sumur Batu.

Kondisi Sosial Masyarakat Burangkeng

Masyarakat di Kelurahan Burangkeng terbilang cukup heterogen, terdiri dari berbagai suku bangsa yang berbeda-beda dan tetap menjaga kerukunan dalam berinteraksi sosial. Suku bangsa yang tinggal di Burangkeng diantaranya ada Betawi, Sunda Jawa, Madura, Bugis, Jambi, dan sebagainya. Di daerah TPA pun tidak sedikit masyarakat yang berasal dari luar daerah Bekasi bahkan dari luar pulau Jawa. Interaksi masyarakat sejauh ini berjalan harmonis walaupun dengan latar belakang budaya yang berbeda. Keberadaan majelis taklim menjadi salah satu wadah interaksi antar warga khususnya kaum ibu selain kegiatan PKK yang digandrungi. Di samping itu juga ada perkumpulan beberapa cabang olahraga diantaranya badminton yang sebagian besar diminati oleh bapak-bapak, perkumpulan volley ibu-ibu, serta sepakbola dan futsal yang diikuti oleh para pemuda.

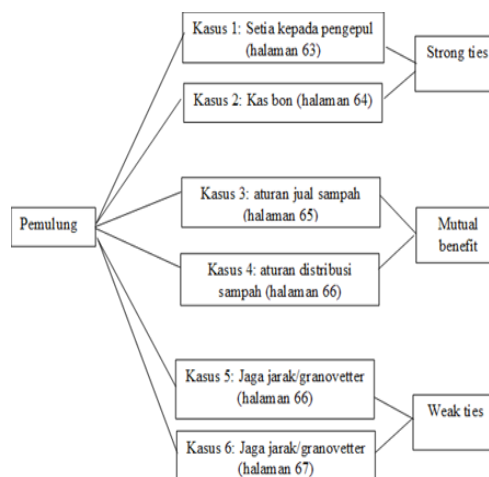
Pada bidang sosial, untuk fasilitas beribadatan warga tersedia sejumlah 13 masjid dan musholla, untuk tempat beribadatan umat beragama di luar muslim hanya terdapat di daerah Kecamatan. Fasilitas olahraga dan hiburan, tersedia sekitar 3 buah lapangan sepak bola yang dapat digunakan juga sebagai lapangan volley serta 2 buah lapangan bulu tangkis. Lapangan volley yang cukup besar biasanya berada di kecamatan tetangga dan pada acara perlombaan volley antar kelurahan, lapangan tersebut dapat digunakan. Untuk sarana pendidikan tersedia 4 yayasan yang dikhususkan bagi umat muslim, serta terdapat 3 pondok pesantren, 2 sekolah menengah pertama, 1 sekolah menengah atas, 1 MTS, dan 4 sekolah dasar.

Kondisi Ekonomi Masyarakat Burangkeng

Sebagian besar masyarakat kelurahan Burangkeng sekitar 30,6% nya bekerja di bidang industri sebagai karyawan atau buruh sedangkan pada urutan berikutnya adalah sebagai pemulung, setelah itu diikuti dengan pekerjaan sebagai pedagang kecil/mikro yang memiliki warung sayur, toko kelontong, ataupun memiliki toko di pasar. Mayoritas merupakan golongan ekonomi menengah ke bawah, untuk yang berada pada golongan ke atas pun jumlahnya dapat dihitung dengan jari. Banyak warga yang masih belum memiliki rumah sendiri sehingga umumnya mereka tinggal di rumah petak atau kontrakan yang rata-rata harganya berada di kisaran Rp 400.000 – Rp 500.000 per bulan. Terbilang cukup tinggi, karena jika diingat lagi, Bekasi memiliki standar upah yang cukup untuk pekerjaan yang hanya sebagai buruh, serta untuk pekerjaan pemulung pun per minggunya mereka bisa mendapatkan Rp 500.000 – 1.000.000 sesuai dengan banyak sedikitnya hasil pulungan yang didapat setiap minggunya.

Gambaran Usia Pemulung di TPA Burangkeng

TPA Burangkeng termasuk wilayah yang dipadati penduduk, diantaranya penduduk tersebut berprofesi sebagai pemulung. Melalui penelitian ini, pemulung dikategorikan menjadi 5 macam berdasarkan usianya.



- Usia muda 25 – 34 tahun
- Usia pekerja 35 – 44 tahun
- Usia paruh baya 45 – 54 tahun
- Usia tua 55 – 64 tahun
- Usia lanjut di atas 65 tahun

PEMBAHASAN

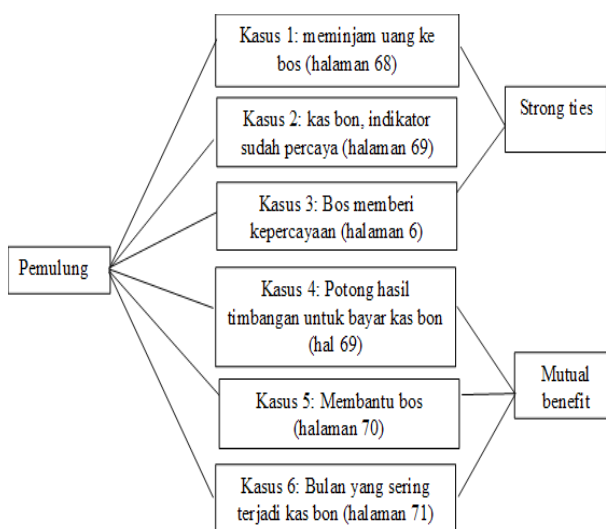
Proses Timbulnya Rasa Percaya antara Pemulung dan Pengepul

Terbentuknya saling percaya menurut Pranadji (2006) adalah hasil interaksi yang melibatkan anggota masyarakat dalam suatu kelompok ketetanggaan, asosiasi tingkat dukuh, organisasi tingkat desa, dan berkembangnya sistem jaringan sosial hingga melintasi batas desa, dan berkembangnya sistem jaringan sosial hingga melintasi batas desa. Terbentuknya rasa percaya membutuhkan proses yang dimana beberapa aktor yang terlibat saling berinteraksi lalu saling memberikan penilaian masing-masing dan kepercayaan timbul jika ditemukan sikap-sikap yang dirasa sesuai dan menguntungkan atau berdampak positif untuk kedua belah pihak.

Berdasarkan penelitian, tujuan murni yang dirasakan oleh pemulung terhadap pengepul hanya sebagai penyambung hidup dan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Seperti yang diketahui bahwa interaksi yang terjalin antara pemulung dan pengepul tidak dapat menjadikan seseorang yang awalnya pemulung bisa menjadi pegawai kantor atau menjadi sebuah pemilik perusahaan, tetapi interaksi yang seperti ini tetap dipertahankan oleh pemulung karena didasari rasa kebutuhan untuk memenuhi ekonomi keluarga. Di dalam percakapan dengan salah satu pemulung dikatakan bahwa uang bonus tidak pernah pemulung dapatkan melalui transaksi distribusi sampah atau barang bekas yang terjadi dengan pengepul. Selama ini, pemulung-pemulung

hanya mempertahankan jalur distribusi sampah kepada pengepul untuk menjual sampah hasil pulungan yang selama seminggu telah pemulung kumpulkan.

Menurut Granovetter (1973) mengenai *Theory of the Strength of Weak Ties*, berdasarkan kasus 1 mengenai kesetiaan pemulung terhadap pengepul ini menggambarkan hubungan yang kuat (*strong ties*) antara kedua belah pihak. Pemulung pun sudah menyatakan bahwa mereka tidak akan pindah ke pengepul lain atas dasar memenuhi kebutuhan. Granovetter juga menggambarkan *strong ties* memiliki kesempatan kecil untuk melakukan mobilitas. Ciri-ciri dari *strong ties* juga digambarkan memiliki kohesi lokal dan norma-norma yang mengikat, yang dimana pada kasus 2 pemulung sering melakukan kas bon kepada pengepul. Pengepul sudah memahami kondisi pemulung dan tetap membantu memberikan kas bon kepada pemulung, serta norma mengenai cara pengembalian uang kas bon yang setiap minggu dipotong dari hasil pulungan pemulung. Sedangkan kohesi lokal dianggap sebagai gaya tarik-menarik antara pemulung dan pengepul yang sudah saling memahami dan mereka sama-sama tahu bahwa mereka saling membutuhkan.



Weak ties memiliki ciri-ciri berpeluang besar untuk bermobilitas atau berpindah-pindah,

perilaku ini terlihat dari pemulung yang segan atau merasa tidak enak jika hendak meminjam uang kepada sesama pemulung, mereka lebih memilih meminjam uang kepada sanak saudara, mungkin beberapa kali juga pernah pinjam kepada bos pengepulnya. Dikatakan bahwa orang-orang dengan ikatan lemah (*weak ties*) hidup sesuai dengan harapan orang lain dan di sini mereka menyesuaikan diri dengan berbagai harapan. *Weak ties* terlihat pada kasus 5 mengenai harapan dari pengepul, apabila pemulung bekerja semakin keras maka uang yang didapat semakin besar, harapan inilah yang diterapkan oleh pemulung dalam bekerja.

Bentuk Sikap Saling Percaya antara Pemulung dan Pengepul

Perwujudan sikap yang pemulung dan pengepul tunjukan dari hasil penelitian ini yaitu, mereka telah mempercayai satu sama lain biasanya dengan berhubungan baik. Hubungan yang baik dan dekat antara pemulung dengan pengepul juga menguntungkan kedua belah pihak. beberapa pemulung senior atau yang sudah cukup mengenal bosnya atau pengepul yang bisa melakukan kas bon atau meminjam uang dari para pengepul. Pengembalian dari uang pinjaman tersebut juga tidak rumit, cukup dengan dipotong dari setoran yang biasa pemulung hasilkan per minggu.

Terlihat bahwa pemulung dan pengepul menunjukan sikap saling percaya secara alami saja seiring berjalannya waktu dan intensitas interaksi yang terjadi antara mereka. Mungkin sedikit berbeda dengan pemulung, para pengepul memiliki cara khusus dalam memperlakukan anak buahnya atau pemulung. Mengabulkan peminjaman uang yang diminta oleh pemulung termasuk salah satu bentuk dari sikap rasa percaya kepada pemulung, selain sebagai strategi agar pemulung tetap bertahan atau 'betah' menjadi anak buah dan agar pemulung

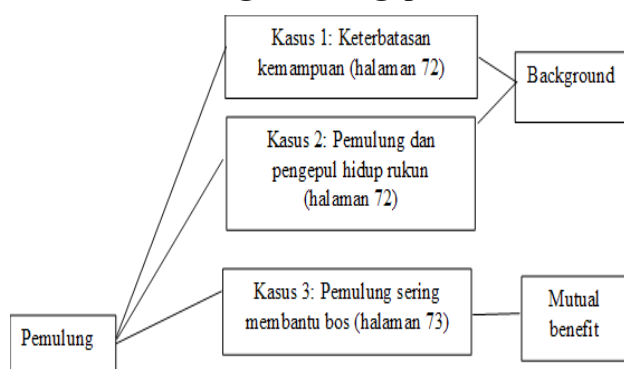
memiliki etos kerja yang lebih baik lagi agar termotivasi dalam memenuhi kebutuhan hidup pemulung yang dirasa semakin hari semakin meningkat.

Jika seseorang merasa butuh dan mulai tergantung pada orang lain, maka akan terbentuk rasa percaya dan mulai menggantungkan kebutuhan atau kehidupannya pada orang tersebut. Hal ini terjadi pada pemulung yang memang sangat bergantung hanya pada pengepul yang menjadi bos mereka masing-masing. Pemulung sebenarnya bisa saja berganti keanggotaan dari pengepul yang lama, tapi hal tersebut tidak akan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Pemulung telah menyadari hal ini karena untuk bisa melakukan pinjaman kepada bos (pengepul), setidaknya mereka harus sudah akrab dan bekerja cukup lama dengan masing-masing bos mereka. Sedangkan Dari sisi pengepul, mereka akan memiliki anak buah atau pemulung yang memiliki sikap jujur dan etos kerja yang baik.

Para pemulung memiliki perwujudan sendiri untuk menunjukkan bahwa mereka telah sepenuhnya mempercayai pengepul sebagai bosnya, biasanya bentuk sikap yang pemulung tunjukan adalah dengan bekerja sukarela untuk membuat bos atau pengepul senang. Caranya tentu saja dengan bekerja yang giat dan jujur, selain itu aktif turut serta dalam membantu penimbangan sampah hasil pulungan yang diadakan setiap minggunya. Perwujudan sikap saling percaya antara pemulung dan pengepul sesuai dengan pendapat menurut Yalom (1985) mengenai adanya rasa percaya antar anggota kelompok dapat meningkatkan partisipasi anggota dan kerekatan kelompok. Semangat kolektivitas yang didasari oleh saling mempercayai akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai bentuk untuk melakukan pembangunan.

Sikap saling percaya yang bisa ditunjukkan antar pemulung dan pengepul kebanyakan hanya sebatas urusan kerja. Sejauh ini tidak ada yang menunjukkan sikap saling percaya mereka dengan mencoba membantu atau mencampuri urusan personal atau masalah pribadi keluarga masing-masing pemulung dan pengepul. Pengepul paham benar, bahwa kebutuhan kebanyakan pemulung biasanya sebatas ekonomi atau perihal keperluan mendadak jika ada salah satu anggota keluarga pemulung yang sakit dan membutuhkan uang lebih untuk berjaga-jaga. Kebanyakan pengepul juga tahu, pinjaman dana akan membesar pada bulan-bulan Juli dan Januari mengingat bulan tersebut adalah bulan waktunya daftar ulang untuk biaya sekolah anak-anak pemulung. Pengepul sangat memaklumi hal tersebut dan jika bisa membantu pasti mereka akan membantu anak buah pemulungnya. Tidak ada yang merasa dirugikan juga jika memang mereka adalah rekan kerja dan uang yang dipinjam sudah pasti akan kembali dengan cara dipotong dari hasil pulungan pemulung per minggunya atau uang tersebut dipotong sesuai dengan permintaan pengepul mengenai waktunya.

Cara Mengembangkan Rasa Saling Percaya antara Pemulung dan Pengepul



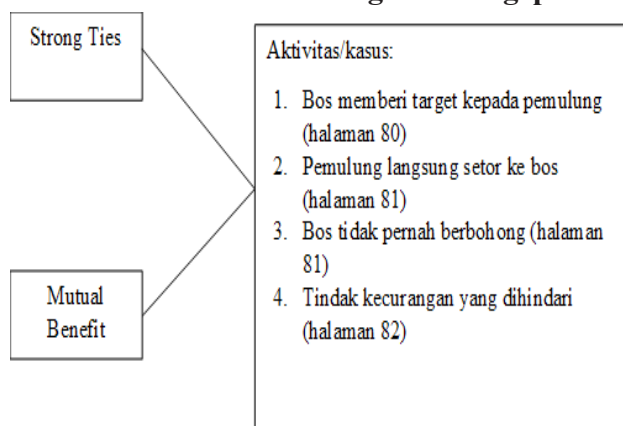
Bagi sesama pemulung, saling menolong selain bertukar informasi juga dilakukan oleh sesama pemulung. Tidak ada persaingan yang terjadi dengan sesama teman kerja. Para

pemulung sudah sama-sama tahu kesusahan hidup masing-masing. Bersaing tidak akan menghasilkan apa-apa. Motivasilah yang sama-sama dibangun oleh sesama pemulung. Berbeda bos pengepul bukan berarti saingan, justru bagi pemulung mereka dapat berbagi cerita mengenai bos masing-masing dan pemulung senior dapat berbagi cerita cara mendekati bos pengepul kepada juniornya. Melakukan pekerjaan yang dapat membuat bos pengepul senang juga awal mula membangun kepercayaan dari si bos kepada anak buahnya. Pengepul sebagai bos pun mengakui bahwa mereka senang melihat anak buahnya aktif dalam membantu pekerjaan pengepul. Hal ini menyebabkan pengepul memberi kepercayaan kepada pemulung dan tidak perlu sulit lagi melakukan pendekatan kepada bos pengepul jika telah berhasil mengambil hatinya dengan performa kerja yang baik. Pengepul juga tidak akan malas membantu anak buahnya (pemulung) yang sedang kesulitan ekonomi atau membutuhkan pinjaman uang. Cara membangun kepercayaan antar pemulung dan pengepul juga diantaranya adalah pengembalian pinjaman dengan cara menyicil, dipotong dari hasil pulungan per minggu sesuai jumlah uang yang dipinjam tanpa memberikan bunga atau denda. “Sama-sama butuh” adalah kata-kata yang paling sesuai untuk dijadikan akar dari rasa saling percaya yang ke depannya dipegang teguh dan dipertahankan oleh pemulung dan pengepul dalam melakoni kegiatan ekonominya. Pemulung dan pengepul sebisa mungkin beradaptasi dan mempertahankan hubungan kerja yang telah mereka miliki saat ini dengan dilandasi rasa saling percaya.

Pemulung merupakan pekerjaan yang sulit untuk dilakoni bagi beberapa orang, tetapi bagi mereka yang sudah terlanjur menjalani pekerjaan ini, mereka tetap akan melanjutkan hidupnya dan mempertahankan posisi yang

mereka miliki saat ini. Pemulung tahu betul yang mereka butuhkan bukan kenaikan jabatan atau mendapatkan fasilitas lebih seperti yang biasa terjadi pada sindrom para pegawai kantor. Pemulung sadar akan diri mereka yang sebatas lulusan SD, menjadi lulusan SMP pun sudah hal yang bagus. Kehidupan pemulung dan keluarga setidaknya harus berjalan dan terus tercukupi, terpikirkan untuk menabung kadang-kadang, tetapi jika menabung bukan hal yang dapat mereka lakukan, maka yang menjadi utama adalah membuat perut kenyang. Pendidikan yang baik, tentu saja untuk anak-anak mereka, generasi penerus mereka, para orang tua pemulung tidak ingin anaknya memiliki nasib yang sama seperti mereka.

Kontribusi Rasa Percaya terhadap Aktivitas Jual Beli antara Pemulung dan Pengepul



Saling percaya satu sama lain antara pemulung dan pengepul, itu yang dirasakan oleh mereka dalam menjalin hubungan kerja. Tanpa ada rasa percaya, tentu saja hubungan kerja yang terjadi tidak akan berjalan mulus. Kebanyakan pemulung dan pengepul tidak memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi, walaupun demikian, mereka tidak kehilangan cara atau strategi untuk memperlancar hubungan kerja diantara mereka. Para pemulung yang secara tidak langsung sebagai pekerja dari pengepul selalu melakukan kewajibannya dalam

melakukan setoran per minggu kepada para pengepul, walaupun para pengepul sebagai bos tidak pernah memberikan target yang harus dicapai setiap minggunya.

Rasa percaya antara pemulung dan pengepul muncul dari adanya interaksi berkesinambungan yang awalnya didasari oleh rasa saling membutuhkan. Seiring berjalannya interaksi yang terjadi, maka terbentuk norma di antara pemulung dan pengepul. Menurut (Larossa dan reitzes, 1993). Norma juga bisa dihasilkan dan dipertahankan melalui interaksi sosial atau pertukaran sosial. Teori interaksi simbolik bahwa individu merupakan hal yang paling penting dalam konsep sosiologi. Mereka mengatakan bahwa individu objek yang bisa secara langsung ditelaah dan dianalisis melalui interaksinya dengan individu lain.

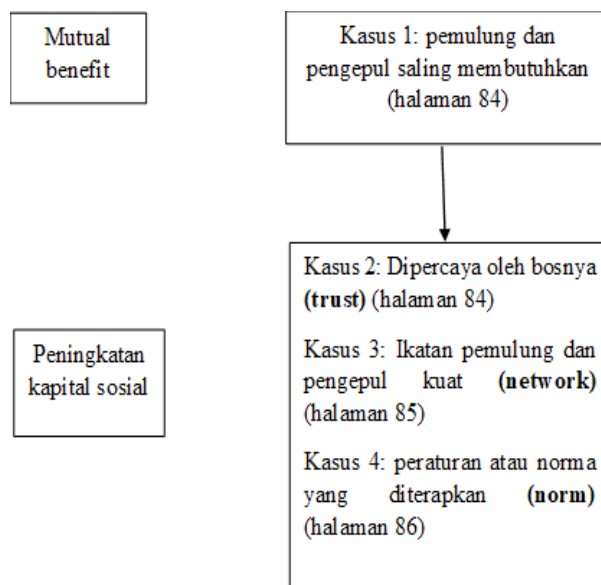
Rasa percaya yang terjalin dari interaksi antara pemulung dan pengepul dapat menguntungkan kedua belah pihak sebagai landasan untuk mempertahankan hubungan kerja antara pemulung dan pengepul. Kepercayaan itulah yang membuat para pemulung tetap menjalin kerjasama atau tetap menyetorkan hasil pulungannya kepada pengepul atau bos mereka. Para pemulung setia atau loyal untuk tetap menyetorkan kepada satu bos saja. Ini disebabkan oleh rasa percaya yang sudah mereka tuju hanya untuk bos mereka, begitu pun sebaliknya. Para pengepul yang sudah percaya dengan anak buahnya atau para pemulung, mereka tidak segan untuk memberikan pinjaman uang atau yang disebut dengan kas bon. Cara pengembalian uang pinjaman pun sangat mudah, hanya dengan dipotong dari hasil setoran para pemulung per minggunya.

Kesadaran tinggi selalu dimiliki oleh masing-masing pemulung dalam menjalankan

kewajibannya, terutama mengingat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari apalagi bagi para pemulung yang juga harus memenuhi kebutuhan anak dan istri. Ketergantungan hubungan kerja kepada pengepul sangat dirasakan oleh sebagian besar pemulung. Pengepul sebagai satu-satunya jalur penjualan sampah bagi para pemulung. Hubungan dan rasa saling butuh ini yang menimbulkan rasa saling percaya, sehingga terciptalah hubungan yang langgeng yang dapat mempermudah kerjasama antara pemulung dan pengepul. Para pemulung tidak pernah meragukan harga yang diberikan oleh pengepul dalam menjual barang bekas ataupun sampah hasil timbangan. Begitu juga dengan pengepul yang selalu menganggap pemulung sebagai para pekerja yang dapat dipercaya dan dapat diajak bekerja sama sampai beberapa tahun mendatang.

Didasari oleh rasa saling membutuhkan dan kesadaran akan perasaan saling ketergantungan, maka kegiatan atau aktivitas jual beli antara pemulung dan pengepul mulai diiringi oleh rasa percaya. Rasa percaya ini diakui oleh pemulung dan pengepul sebagai dasar mereka untuk tetap saling menjalin hubungan kerja. Salah satu pengepul pun menyatakan bahwa tanpa didasari rasa percaya, ia tidak akan segan-segan untuk mengganti personil anak buahnya. Sedangkan dari pihak pemulung mengatakan bahwa jika kedapatan si pengepul berbuat curang, mereka juga tidak akan melakukan setoran kepada pengepul tersebut lagi. Hal ini sebelumnya sudah dipertimbangkan oleh salah seorang pengepul, pengepul sudah pasti tidak berani untuk berbuat curang karena rumor akan tersebar dengan cepat di Burangkeng dan hal ini akan menyebabkan banyak anak buah yang akan berpindah ke pengepul lain.

Kontribusi Rasa Percaya antara Pemulung dan Pengepul dalam Meningkatkan Kapital Sosial



Pada penelitian ini ditemukan elemen-elemen yang terdapat pada hubungan kerja pemulung dengan pemilik lapak diantaranya norma (*norm*), harapan (*expectation*), serta kontrol sosial (*social control*). Mengenai peraturan dalam memulung, lapak memberikan peraturan tersebut secara tidak tertulis. Peraturan tersebut antara lain: dalam memulung harus jujur, tidak boleh mencuri, harga sudah ditentukan, sopan, dan dilarang untuk berkelahi. Di dalam interaksi yang saling membutuhkan antara pemulung dengan pemilik lapak menciptakan elemen jaringan (*network*). Jaringan ini diperkuat dengan dasar percaya serta norma yang terbentuk di dalam hubungan kerja antara pemulung dengan pemilik lapak. Berdasarkan penelitian lapang, para pemilik lapak tidak bisa menjalankan usahanya bila tidak ada pemulung yang menjadi anak buahnya. Semakin banyak anak buahnya, penghasilan lapak pun akan semakin besar.

Norma, jaringan, dan kepercayaan kurang lebih merupakan elemen pembentuk kapital sosial. Kapital sosial tidak dapat dibentuk menggunakan satu elemen saja, semua elemen

saling terkait dan berhubungan. Seperti jaringan antara pemulung dan pengepul yang terbentuk melalui hubungan kerja, serta norma yang diterapkan sebagai pengontrol pekerjaan pemulung, dan rasa saling percaya yang mulai timbul dari lamanya interaksi yang terjalin antara pemulung dan pengepul. Bourdieu mengakui kapital sosial sebagai “kumpulan sumber daya aktual atau potensial yang terkait kepemilikan jaringan awet dari hubungan yang kurang lebih dilembagakan saling kenal dan saling mengenal”. Kapital sosial, integrasi dalam jaringan koneksi sosial yang dapat dimobilisasi tujuan tertentu, jelas diakui sebagai sumber khas bersama modal finansial dan modal budaya (Bourdieu, 1986).

KESIMPULAN

Kesimpulan umum yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah mengenai elemen terkuat yang dapat meningkatkan kapital sosial antara hubungan kerja pemulung dan pengepul adalah rasa percaya. Tidak dipungkiri bahwa elemen jaringan dan norma juga mengikat dalam hubungan pemulung dan pengepul, tetapi yang membuat kedua aktor tersebut bertahan satu sama lain adalah rasa saling membutuhkan (*mutual benefit*) dan rasa saling percaya.

Proses timbulnya rasa percaya antara pemulung dan pengepul awalnya didasari oleh rasa kebutuhan untuk memenuhi ekonomi keluarga. Bentuk sikap saling percaya antara pemulung dan pengepul berawal dari rasa saling membutuhkan dan hubungan yang saling menguntungkan. Jika seseorang merasa butuh dan mulai tergantung pada orang lain, maka akan terbentuk rasa percaya dan mulai menggantungkan kebutuhan atau kehidupannya pada orang tersebut. Hal ini terjadi pada pemulung yang memang sangat bergantung hanya pada pengepul yang menjadi bos mereka masing-masing. Cara mengembangkan rasa

saling percaya didasari oleh perasaan “sama-sama butuh”. Kata-kata tersebut adalah hal yang paling sesuai untuk dijadikan akar dari rasa saling percaya yang ke depannya dipegang teguh dan dipertahankan oleh pemulung dan pengepul dalam melakoni kegiatan ekonominya.

Kontribusi rasa percaya terhadap aktivitas jual beli antara pemulung dan pengepul adalah hubungan kerja yang berjalan mulus. Kesadaran tinggi selalu dimiliki oleh masing-masing pemulung dalam menjalankan kewajibannya, terutama mengingat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari apalagi bagi para pemulung yang juga harus memenuhi kebutuhan anak dan istri. Kepercayaan adalah satu-satunya jalan yang harus pemulung berikan kepada pengepul jika ingin tetap bekerja sama dan memiliki hubungan yang langgeng.

Kontribusi rasa percaya antara pemulung dan pengepul dalam meningkatkan kapital sosial sangat dirasakan oleh kedua belah aktor. Elemen dari kapital sosial adalah rasa percaya, norma, dan jaringan yang tidak dapat dipungkiri bahwa sangat membantu dalam hubungan kerja pemulung dengan pengepul sama halnya dengan kehidupan bermasyarakat yang ikatannya bahkan lebih kuat karena didasari rasa saling membutuhkan.

SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, peningkatan kapital sosial yang terjadi melalui pengembangan kepercayaan antara pemulung dan pengepul juga diperlukan sebuah intervensi kebijakan pada tingkat desa yang mengakomodir semua pihak. Hal ini dapat dicapai dengan:

1. Kemauan dan komitmen kuat dari seluruh *stakeholder* di dalam pengelolaan TPA Burangkeng untuk menjaga hubungan baik yang bermanfaat bagi jangka panjang.

2. Peningkatan kapasitas SDM didalam kepengurusan TPA Burangkeng, diantaranya adalah para pemilik lapak dan beberapa pemulung yang dianggap sebagai tokoh masyarakat. Hal ini dapat diajukan kepada instansi terkait yang lebih tinggi dalam bentuk pelatihan atau pendampingan.
3. Pengawasan dan keterlibatan kinerja alur pendistribusian sampah dan barang bekas oleh seluruh masyarakat Burangkeng sebagai bentuk partisipasi aktif dalam pembangunan dan demi terciptanya kenyamanan di dalam lingkungan sekitar TPA.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada seluruh masyarakat Kelurahan Burangkeng yang sangat terbuka dalam memberikan informasi dan inspirasi kepada peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Abom, B. (2004). Social Capital, NGOs, and Development: A Guatemala Case Study. *Development in Practice*, Vol. 14 No. 3, 342-353. Diambil kembali dari <http://www.jstor.org/stable/4029995>
- Adger, W. N. (1999). Social Vulnerability Climate Change and Extremes in Coastal Vietnam *World Development*, 27, 69-249.
- Adi, I. R. (2013). *Intervensi Komunitas & Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat* (1 ed.). Jakarta: Rajawali Press.
- Adi, I. R. (2015). *Kesejahteraan Sosial: Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ameriani, A. (2006). *Analisis Karakteristik Pemulung, Karakteristik Kerja, Hubungan Sosial, dan kesejahteraan Pemulung (Kasus Pemukiman Pemulung Di Desa Kedaung, Kecamatan Pamulang, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten)*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- B, A. (2004, Apr 3). Social Capital, NGOs, and Development: A Guatemala Case Study. *Development in Practice*, 14, No. 3, 342-353. Diambil kembali dari <http://www.jstor.org/stable/4029995>
- Bourdieu, P. (1986). The Forms of Capital. Dalam J. C. Richardson, *Handbook of Theory and Research for The Sociology of Education* (hal. 241-58). New York: Greenwood Press. Diambil kembali dari <http://www.socialcapitalgateway.org/sites/socialcapitalgateway.org/files/data/paper/2016/10/18/rbasicsbourdieu1986-theformsofcapital.pdf>
- Budiono, P. (2015). Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Bojonegoro (Studi di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor). *Jurnal Politik Muda*, Vol. 4, No. 01, 116-125.
- Chambers, R. (1987). *Pembangunan Desa: Mulai dari Belakang*. Jakarta: LP3ES.
- Creswell, J. W. (2014). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (4th ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Eka, N. (2009). Kajian Aktivitas Ekonomi Pelaku Sektor Informal di Kota Denpasar

- (Studi Kasus Wanita Pedagang Canang Sari). *Piramida*, Vol. V No. 2, 54-64.
- Granovetter, M. S. (1973). The Strength of Weak Ties. *American Journal of Sociology*, 1360-1380.
- Gunawan. (2012). *Strategi Bertahan Hidup Pemulung*. Tanjung Pinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Ife, J. (2013). *Community Development in An Uncertain World Vision, Analysis and Practice*. New York: Cambridge University Press.
- Lawang, R. M. (2005). *Kapita Sosial dalam Perspektif Sosiologi: Suatu Pengantar*. Depok: FISIP UI Press.
- Lewandowski, J. D. (2008). On Social Poverty: Human Development and The Distribution of Social Capital. *Journal of Poverty*, Vol. 12 No. 1, 293-308. Diambil kembali dari http://www.academia.edu/342774/On_Social_Poverty
- Midgley, J. (2005). *Pembangunan Sosial Perspektif Pembangunan dalam Kesejahteraan Sosial*. (D. Setiawan, & S. Abbas, Penerj.) Jakarta: Ditperta Depag RI.
- Nainggolan, T., & Susantyo, B. (2017). Upaya Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pogram Keluarga Harapan: Studi di Empat Daerah di Indonesia. *SOSIO KONSEPSIA*, Vol. 7, No. 01, 31-46.
- Parmonangan, A. (2013). *Pemulung dan Kontribusinya pada Penyelamatan Lingkungan*. Fakultas Ekonomi. Denpasar: Universitas Udayana.
- Pranadji, T. (2006). Penguatan Modal Sosial untuk Pemberdayaan Masyarakat pedesaan dalam Pengelolaan Agroekosistem Lahan Kering. *Jurnal AgroEkonomi*, Vol. 24 No. 2, 178-206.
- Putnam, R. (2000). *Bowling Alone: The Colapse and Revival of American Community*. New York: Simon and Schuster.
- Putra, A. S. (2015). *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Ridlwani, Z. (2013). Payung Hukum Pembentukan BUMDes. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 03, 355-370.
- Rubin, A. (2001). *Research Method for The Social Work*. Toronto: Wad Sworth Thompson Learning.
- Setiawan, H. H. (2017). Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pusat Kesejahteraan Sosial. *Sosio Informa*, Vol. 3, No. 03, 273-286.
- Sumarti, T. (2007). Kemiskinan Petani dan Strategi Nafkah Ganda. *Jurnal Sodality*, Vol. 1, No. 02, 217-232.
- Susanti, R. (2012). *Analisa Pertukaran Sosial Mengenai Pola Bekerja Pemulung di TPA Muara Fajar Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru*. Pekanbaru: Universitas Riau.
- Taga, A. (2013). Social Capital and Poverty Alleviation: Some Qualitative Evidence from Lahore District. *Insan Akademika Publications*, 681-693.
- Taufik, i. (2013). Persepsi Masyarakat Terhadap Pemulung di Pemukiman TPA

Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu. *E-Journal Sosiologi Konsentrasi*, Vol. 1 No. 4, 85-95.

Tulak, P. (2009). *Analisis Tingkat Kesejahteraan dan Strategi Nafkah Rumah Tangga Petani Transmigran (Studi Sosio-ekonomi Perbandingan di Tiga Kampung di Distrik Masni Kabupaten manokwari Provinsi Papua Barat*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Turner, L. H. (2008). *Pengantar Teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Humanika.

UNESCO. (2002). *Social Capital and Poverty Reduction*. Paris: UNESCO. Diambil kembali dari <http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001506/150618eo.pdf>

Wahyuni, N. (2004). *Teori Belajar dan Pembelajaran*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Group.

BADAN USAHA MILIK DESA DAN PEMBANGUNAN SOSIAL DI KABUPATEN BOJONEGORO

VILLAGE OWNED ENTERPRISES AND SOCIAL DEVELOPMENT IN BOJONEGORO REGION

Versanudin Hekmatyar dan Fentiny Nugroho

Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP UI
Gedung Nusantara 2 lantai 2 R.C.L Rudolf, Kampus FISIP UI Depok, Depok, 16424
E-mail: versahekmattyar@gmail.com

Diterima: 10 April 2018; Direvisi: 11 Juli 2018; Disetujui: 8 Agustus 2018

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Badan Usaha Milik (BUM) Desa sebagai instrumen pembangunan sosial dengan mengambil studi kasus di Desa Kedungprimpen. Data dikumpulkan dengan pendekatan kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan. Pertama, BUMDesa sebagai unit usaha ekonomi desa bersifat kolektif antara pemerintah desa dan masyarakat desa, dimana usaha ekonomi yang dilakukan mengandung unsur bisnis ekonomi dan bisnis sosial. Kedua, BUMDes memiliki peran penting didalam pengelolaan irigasi, dan bertanggungjawab penuh untuk melakukan pendistribusian air kesetiap lahan pertanian penduduk Desa Kedungprimpen didalam proses produksi pertanian. Ketiga, BUMDesa memiliki tanggungjawab didalam pembagian hasil usaha pengelolaan irigasi kepada lapisan terbawah di Desa Kedungprimpen. Terakhir, BUMDesa di Desa Kedungprimpen memiliki potensi yang dapat dikelola berupa tanah kas desa. Pengelolaan tanah kas desa oleh BUMDesa dapat digunakan sebagai strategi peningkatan kualitas ekonomi dan mengurangi adanya ketimpangan penduduk Desa Kedungprimpen. Hal ini dapat dilakukan dengan adanya komitmen kuat antara seluruh stakeholder untuk mendistribusikan tanah kas desa kepada golongan lapisan terbawah penduduk di Desa Kedungprimpen dengan biaya sewa terjangkau. Sebagai rekomendasi, upaya tersebut perlu dikembangkan dengan meningkatkan status kelembagaan, sumberdaya manusia, sarana prasarana, dan otoritas dari BUMDesa.

Kata Kunci: BUMDesa, Peran BUMDesa, Pembangunan Sosial.

Abstract

The objective of this study is describing the role of BUMDesa as a social development instrument with a case study in Kedungprimpen Village. Qualitative approach was used to collect the data and descriptively presented. The results are as follows. First, BUMDesa as a village economic business unit use collective method between village government and village community, the economic effort that has been done itself contains economic and social business element. Second, BUMDesa has important role in managing the irrigation, and has fully responsible for distributing water to every farmland of Kedungprimpen villagers in the agricultural production process. Third, BUMDesa has responsibility to distribute the business result of irrigation management to the lowest layer in Kedungprimpen Village. Finally, BUMDesa in Kedungprimpen Village has potential that can be managed, which is the form of village treasury lands. Village cash management by BUMDesa can be used as a strategy to improve quality of the economy and reducing the disparity of the people of Kedungprimpen Village. This can be done with a strong commitment among all stakeholders to distribute the village treasury lands to the lowest layer of people in Kedungprimpen Village with low rents. As a recommendation, these efforts need to be developed, by improving the status of institutional, human resources, infrastructure, and the authority of BUMDesa.

Keywords: BUMDesa, Role of BUMDesa, Social Development.

PENDAHULUAN

Pembangunan di pedesaan telah lama mendapatkan perhatian pemerintah. Setidaknya pembangunan pedesaan sudah dimulai sejak masa orde baru dengan program revolusi hijau pada tahun 1980an yang bertujuan meningkatkan hasil produksi pertanian. Program revolusi hijau ditandai dengan memodernisasi sistem pertanian, diantaranya adalah perbaikan sistem irigasi, pemakaian bibit unggul, pupuk dan pestisida.

Revolusi hijau terbukti ampuh untuk menaikkan produktivitas pertanian, selama Pelita I dicapai kenaikan produksi padi sebesar 6 persen per tahun, dimana kenaikan tersebut terutama adalah berkat usaha-usaha dibidang intensifikasi produksi padi yang pelaksanaannya dititikberatkan di Pulau Jawa. Disisi lain, revolusi hijau juga menciptakan distorsi pembangunan dengan menciptakan kesenjangan ekonomi dan sosial dipedesaan karena kenyataannya revolusi hijau hanya menguntungkan petani yang memiliki lahan pertanian luas dan akses terhadap permodalan.

Hampir tiga *decade* sejak pertama kali program revolusi hijau dilaksanakan, program-program pembangunan di pedesaan belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Kondisi ini dapat dilihat dari data BPS bulan maret 2017 yang menunjukkan total jumlah penduduk miskin Indonesia 27,77 juta jiwa (10,64%), dimana 17.1 juta jiwa (61,5%) penduduk miskin tinggal di pedesaan dan 10,67 juta jiwa (38,4%) berada perkotaan. Adapun garis kemiskinan Indonesia per Maret 2017 adalah 361.496/kapita/bulan untuk pedesaan dan 385.621/kapita/bulan untuk perkotaan. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa distribusi kemiskinan tidak merata dan lebih terkonsentrasi dipedesaan.

Kemiskinan merupakan permasalahan mendasar bagi Negara Indonesia yang bersifat multidimensional sekaligus politis tergantung bagaimana kepentingan dan cara melihatnya. Sumarti, (2007) menjelaskan bahwa kemiskinan adalah kondisi yang bersifat multidimensional, tidak hanya mencakup tingkat pendapatan yang rendah, tetapi juga (a) Kurangnya kesempatan/akses. Pendapatan yang rendah terkait erat dengan distribusi asset fisik (lahan), sumberdaya manusia, dan asset sosial, serta kesempatan usaha/kerja; (b) Rendahnya kemampuan (pendidikan dan kesehatan); (c) Rendahnya tingkat keamanan (jaminan terhadap resiko dan tekanan ekonomi) baik di tingkat nasional, lokal maupun rumah tangga (individu); (d) Pemberdayaan (kapasitas golongan miskin untuk mengakses dan mempengaruhi kelembagaan dan proses sosial yang membentuk alokasi sumberdaya). Dengan kondisi seperti ini, seseorang akan terjebak di dalam Perangkap kemiskinan (*poverty trap*).

Perangkap kemiskinan (*poverty trap*) merupakan inti dari masalah kemiskinan yang menurut Chamber (1988) terdiri dari lima unsur yaitu: (a) Kemiskinan itu sendiri; (b) kelemahan fisik; (c) keterasingan/kadar isolasi; (d). Kerentanan/kerawanan; (e) ketidakberdayaan. Kelima unsur ini berkaitan antara satu dengan yang lain dalam satu jaringan interaksi timbal balik sehingga perangkap kemiskinan benar-benar mematikan peluang hidup masyarakat dan keluarga miskin.

Pemahaman tentang pengertian kemiskinan dilakukan dengan menggunakan ukuran-ukuran yang disepakati untuk menggolongkan seseorang kedalam taraf hidup tertentu, miskin atau tidak miskin. Sebagaimana BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) untuk mengukur kemiskinan. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang

sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan. Jadi Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Besarnya angka kemiskinan masih menjadi masalah utama yang dihadapi dalam menentukan kebijakan dan perencanaan pembangunan.

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kekurangan program-program pembangunan yang telah dilakukan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di pedesaan. Salah satunya adalah terlalu besarnya intervensi pemerintah (*top down*) dalam setiap program pembangunan, sehingga mengesampingkan inisiatif dari masyarakat (*bottom up*). Kemudian juga kegagalan pemerintah dalam memastikan bahwa keuntungan dari program pembangunan dapat menyentuh masyarakat secara keseluruhan. Lebih lanjut, program pembangunan memiliki kecenderungan lebih berfokus pada pembangunan ekonomi dan tidak sejalan dengan pembangunan pada aspek sosial. Sehingga, dalam menentukan arah pembangunan penting untuk mengharmonisasikan tujuan-tujuan dari pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial.

Midgley (2005) mendefinisikan pembangunan sosial sebagai sebuah proses perubahan sosial yang terencana yang didesain untuk mengangkat kesejahteraan penduduk menyeluruh dengan menggabungkannya dengan proses pembangunan ekonomi yang dinamis.

Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi serta menumbuhkan suasana yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan kegiatan Pemerintah harus berjalan secara harmonis, saling menunjang, saling mengisi, dan saling

melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional. Hal ini harus dilakukan sampai pada unit terkecil dalam pemerintahan, yakni pada unit desa.

Desain pembangunan dilaksanakan salah satunya melalui pendirian kelembagaan ekonomi desa yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Lembaga ekonomi ini tidak lagi didirikan atas dasar instruksi pemerintah, tetapi didasarkan pada keinginan masyarakat desa yang berangkat dari potensi lokal yang jika dikelola dengan baik akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Usaha dalam peningkatan kesejahteraan dilakukan dengan mengupayakan terbangunnya sumber-sumber penghasilan asli desa (PADes). Sumber penghasilan desa tersebut diantaranya berbentuk badan usaha, atau badan usaha milik desa (BUMDesa).

Secara historis, landasan hukum tentang BUMDesa dimulai dengan disahkannya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 213 ayat (1) “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”. Rumusan yang sama diatur dalam PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa pada bagian kelima tentang Badan Usaha Milik Desa yang terdiri dari Pasal 78-81 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Meskipun landasan hukum telah disahkan, fakta dilapangan menunjukan bahwa implementasi BUMDesa belum sepenuhnya dilaksanakan oleh seluruh desa yang ada di Indonesia.

Selanjutnya, disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa lebih luas untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama, termasuk juga memajukan perekonomian

masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional. Hal ini secara eksplisit termuat pada Bab X yang terdiri dari Pasal 87-90 tentang Badan Usaha Milik Desa. Serta secara khusus diatur didalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUM Desa.

Upaya pemerintah dalam mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa lebih luas untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama sekaligus secara tegas membedakan antara Pembangunan Desa dan Pembangunan Perdesaan. Perbedaan ini terkait dari paradigma pembangunan desa yang digunakan yaitu antara pembangunan desa dan pembangunan perdesaan. Pembangunan Desa menggunakan Paradigma “Desa Membangun” berbasis Desa, sedangkan Pembangunan Perdesaan menggunakan Paradigma “Membangun Desa” berbasis Kawasan Perdesaan.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti mencoba untuk berfokus pada peran BUMDesa sebagai instrumen pembangunan sosial dengan menempatkan desa sebagai subjek pembangunan. Hal ini dapat didorong salah satunya dengan memanfaatkan BUMDesa sebagai strategi pembangunan terpadu. Setidaknya untuk mencapai hal tersebut terdapat beberapa prasyarat, yang oleh Putra, (2015) diterjemahkan kedalam “*Tradisi Berdesa*”, yakni:

1. BUMDesa membutuhkan modal sosial (kerja sama, solidaritas, kepercayaan, dan sejenisnya) untuk pengembangan usaha melalui jejaring sosial yang lebih inklusif dan lebih luas.
2. BUMDesa berkembang dalam politik inklusif melalui praksis Musyawarah

Desa sebagai forum tertinggi untuk pengembangan usaha ekonomi Desa yang digerakkan oleh BUM Desa.

3. BUMDesa merupakan salah satu bentuk usaha ekonomi Desa yang bersifat kolektif antara pemerintah Desa dan masyarakat Desa. Usaha ekonomi Desa kolektif yang dilakukan oleh BUM Desa mengandung unsur bisnis sosial dan bisnis ekonomi.

Atas dasar informasi tersebut pada penelitian ini, peran BUMDesa sebagai instrumen pembangunan sosial mencoba untuk diidentifikasi lebih lanjut dengan menggunakan paradigma “Desa Membangun” di Desa Kedungprimpen, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Creswell (2016) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang- dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Pada penelitian ini kompleksitas persoalan yang mencoba untuk diterjemahkan adalah tentang peran BUMDesa sebagai instrumen pembangunan sosial dipedesaan.

Selanjutnya, strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Menurut Creswell, (2014) penelitian studi kasus adalah strategi kualitatif di mana peneliti mengkaji sebuah program, kejadian, aktivitas, proses atau satu atau lebih individu dengan lebih mendalam. Kasus-kasus tersebut dibatasi oleh

waktu dan aktivitas, sehingga peneliti harus mengumpulkan informasi yang detail dengan menggunakan beragam prosedur pengumpulan data selama periode waktu tertentu. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskripsi dengan mencoba menggambarkan peran BUMDesa sebagai instrumen pembangunan sosial dipedesaan.

Pembahasan mengenai para partisipan dan lokasi penelitian dapat mencakup empat aspek yang dinyatakan oleh Miles dan Huberman (1994 dalam Creswell, 2016), yaitu: *setting* (lokasi penelitian), aktor (siapa yang akan diobservasi atau diwawancarai), peristiwa (kejadian apa saja yang dirasakan oleh aktor yang akan dijadikan topik wawancara dan observasi), dan proses (sifat peristiwa yang dirasakan oleh aktor dalam lokasi penelitian). Sehingga dalam penelitian ini, teknik pemilihan informan yang digunakan adalah *nonprobability sampling* dengan *purposive sampling* dimana informan yang dipilih disesuaikan dengan kebutuhan data penelitian. Data pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

Data primer diperoleh dari informan melalui pengamatan, observasi dan wawancara mendalam. Selanjutnya hasil dari pengamatan observasi, dan wawancara mendalam dituangkan dalam bentuk uraian rinci dan kutipan langsung. Data sekunder diperoleh dari informasi tertulis, data-data dan literatur-literatur yang mendukung kebutuhan data. Data dan informasi pada penelitian ini diperoleh dari pemerintahan desa, pengurus BUMDesa, dan penelusuran informasi melalui pustaka. Data primer dan data skunder sifatnya saling melengkapi sehingga hasil penelitian lebih akurat. Berikut adalah tabel mengenai jenis dan sumber data dalam peneltian ini.

Selanjutnya, penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Desa Kedungprimpen,

Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, dengan fokus kajian pada BUMDesa sebagai instrumen pembangunan sosial dipedesaan. Pertimbangan pemilihan lokasi ini karena Bojonegoro mewakili salah satu daerah yang memiliki karakteristik secara sejarah sebagai daerah miskin, dan memiliki kerentanan terhadap bencana alam karena berbatasan langsung dengan sungai bengawan solo. Kelemahan dan kerentanan tersebut juga sekaligus menjadi peluang pada pengembangan BUMDesa sebagai instrumen pembangunan sosial. Secara khusus dengan memanfaatkan aliran sungai bengawan solo untuk irigasi lahan pertanian yang dikelola sebagai unit usaha dari BUMDesa.

Analisa hasil penelitian dilakukan dengan mengorganisasikan data, mereduksi data, dan menyajikan data dalam bentuk bagan, tabel, atau pembahasan secara deskriptif. Creswell, (2014) menjelaskan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif dimulai dengan menyiapkan dan menorganisasikan data (yaitu data teks seperti transkrip, atau data gambar seperti foto) untuk analisis, kemudian mereduksi data menjadi tema melalui proses dan peringkasan kode, dan terakhir menyajikan data dalam bentuk bagan, tabel, atau pembahasan.

HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum Lokasi

Secara administratif, Desa Kedungprimpen terletak di Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, dengan posisi geografis antara 07,074890° LS dan 112,07254° BT. Jarak antara Desa Kedungprimpen dengan pusat kecamatan, yaitu adalah 9 Km, dapat ditempuh selama 20 menit dengan kendaraan yang paling banyak dipakai adalah motor. Sedangkan jarak dengan pusat kabupaten adalah 26 Km dengan waktu tempuh sekitar 60 menit dengan menggunakan kendaraan bermotor.

Desa Kedungprimpen berada pada dataran rendah 15 mdpl (*lowland*), dengan curah hujan 121,43 mm dan suhu harian berkisar 22°C sampai dengan 29 °C. Berada pada bagian utara dari Kabupaten Bojonegoro, berbatasan langsung dengan Kabupaten Tuban dan berada pada aliran sungai Bengawan Solo yang merentang di tengah Pulau Jawa, mulai dari Wonogiri, Jawa Tengah sampai Gresik, Jawa Timur.

Desa Kedungprimpen terbagi kedalam tiga dusun, 5 Rukun Warga (RW), dan 22 Rukun Tetangga (RT). Ketiga dusun tersebut ialah Dusun Peni, Kedung dan Blimbing. Luas wilayah Desa Kedungprimpen adalah 376 Ha terdiri dari 303,67 Ha sawah, 4,89 Ha tanah tegal/ladang, 44,40 Ha permukiman dan 20,98 Ha tanah pekarangan. Sistem pengairan sawah adalah irigasi teknis yang cukup baik, dan semua sawah yang ada di Desa Kedungprimpen dapat ditanami padi dua kali atau lebih dalam setahun. Akan tetapi pada musim penghujan karena sering terjadi banjir, sawah umumnya diberakan setelah musim tanam (MT) II.

Jumlah penduduk Desa Kedungprimpen pada tahun 2016 mencapai 2999 jiwa terdiri atas, 1420 jiwa penduduk laki-laki (L) dan 1579 jiwa penduduk perempuan (P) dan terhimpun dalam 882 KK dengan kepadatan penduduk 798 jiwa/Km². Penduduk Desa Kedungprimpen ditinjau dari struktur umur menunjukkan sebaran yang merata disetiap kategorinya, dengan rasio jenis kelamin 90 laki-laki per 100 perempuan.

Mata Pencarian Penduduk

Berdasarkan potensi sumberdaya manusia tersebut, susunan penduduk menurut jenis mata pencahariannya adalah diantara penduduk usia produktif yang berjumlah 2257 jiwa (75%), 1674 jiwa (74%) bekerja dibidang pertanian, 408 jiwa (18%) tidak/belum bekerja, dan sisanya bekerja dibidang jasa, serta diantaranya

ada yang menjadi pegawai negeri ataupun pensiunan pegawai negeri.

Menurut data statistik tersebut 1674 jiwa (74%) yang bekerja dibidang pertanian digolongkan lagi kedalam dua golongan, yang terdiri dari 1073 jiwa (48%) sebagai petani dan 601 jiwa (27%) sebagai buruh tani. Dari angka penggolongan ini dapat dilihat pola penguasaan tanah yang terjadi di Desa Kedungprimpen. Namun, harus diperhatikan bahwa angka-angka statistik ini tidak memberikan keterangan tentang pekerjaan sampingan. Kenyataannya jenis mata pencaharian dan jumlah penduduk yang ikut terlibat didalam kegiatan mata pencaharian tidak hanya sebesar angka statistik yang tersedia di desa. Misalnya PNS yang juga ikut melakukan aktivitas nafkah sebagai petani, atau pada kategori petani yang juga ikut serta kedalam aktivitas sebagai buruh tani.

Sebagaimana ciri masyarakat agraris sebagian umum, dimana masyarakatnya menggantungkan hidup pada sektor pertanian dengan ketergantungan yang tinggi pada lahan pertanian.

“disini itu semua petani, meskipun punya pekerjaan lainnya, jadi petani tetap yang nomor satu. Tani itu membuat hati damai, meskipun apa-apa mahal kalau punya beras sendiri kan sudah bisa makan” (LJN, Perangkat Desa, 30 November 2017).

Pertanian merupakan sumber nafkah terpenting di Desa Kedungprimpen. Secara umum tanah berdasarkan pemilikan dan penguasaan di Desa Kedungprimpen dikategorikan kedalam dua kategori, tanah yang dimiliki desa dan tanah yang dimiliki penduduk. Tanah yang dikuasai desa berdasarkan fungsinya ada tiga jenis, sebagaimana yang disampaikan oleh informan yakni,

“untuk fasilitas umum, bengkok sebagai

gaji perangkat desa, dan sisanya dilelang untuk keperluan kas desa” (SH, Perangkat Desa, 30 November 2017)

Peruntukan pertama adalah tanah yang digunakan sebagai fasilitas umum, seperti untuk bangunan pemerintahan, bangunan sekolah, masjid, puskesmas, pasar desa, pemakaman dan lapangan.

“fasilitas umum termasuk sekolah, masjid, balai desa, puskesmas, pemakaman, dan juga lapangan. Awalnya ada yang sebagian tanah itu punya warga, lalu ditukar dengan tanah bengkok desa. Seperti lapangan, desa butuh lapangan yang dekat dengan jalan tapi punya sawah, akhirnya kita berunding dengan beberapa warga yang punya tanah sesuai dengan kebutuhan desa, lalu menawarkan untuk ditukar sawahnya. Alhamdulillah ada yang mau” (SH, Perangkat Desa, 30 November 2017)

Peruntukan kedua adalah tanah kas desa sebagai tanah bengkok yang diberikan kepada aparat desa untuk dikelola selama menjabat sebagai pengganti dari gaji. Luas keseluruhan lahan bengkok di Desa Kedungprimpen adalah sekitar 22,54 Ha. Terakhir adalah tanah kas desa yang berfungsi untuk menambah pemasukan desa. Tanah kas desa pada kategori ini biasa dilelang setiap tahun untuk mendapatkan uang tunai.

“tanah kas desa yang dilelang, ada sekitar 16 Ha. Kesemuanya adalah sawah, setahun bisa panen dua kali, dan lelangan biasa dilakukan setelah musim tanam kedua, kira-kira bulan februari. Kita tentukan harga dasarnya, dan harga akhir adalah berdasarkan penawaran tertinggi, dengan sistem lelangan tertutup” (SH, Perangkat Desa, 30 November 2017).

Luas pasti tanah kas desa yang dilelang berdasarkan penelusuran dokumen adalah

seluas 16,635 Ha. Sistem lelang tertutup, yakni dilakukan dengan cara, peserta mengisi formulir harga penawaran yang telah disediakan oleh panitia. Selisih harga lelang yang disepakai adalah Rp. 10.000. Sistem ini dipilih untuk mencegah adanya perang harga yang tidak sehat diantara warga desa.

“tahun 2017, jumlah tanah yang dilelang ada 49 persil dengan luas dan lokasi berbeda yang menentukan harga. Total hasil lelang yang didapat adalah Rp. 500.540.000” (SH, Perangkat Desa, 30 November 2017).

Sementara tanah yang dimiliki penduduk Desa Kedungprimpen secara total adalah 240,13 Ha. Berdasarkan buku pajak bumi dan bangunan terdapat 882 rumah tangga pemilik tanah di Desa Kedungprimpen. Tanah-tanah yang dimiliki penduduk sebagian besar diperoleh melalui mekanisme warisan, dan sebagian kecil lain melalui pembelian. Selebihnya, tanah-tanah pertanian yang ada di Desa Kedungprimpen ada juga yang dimiliki oleh orang luar Desa Kedungprimpen.

“rata-rata kepemilikan sawah penduduk disini dibawah 0,5 Ha, hanya sedikit yang punya sawah sampai diatas 1 Ha” (LJN, Perangkat Desa, 30 November 2017).

Rata-rata luas pemilikan di Desa Kedungprimpen, secara resmi berdasarkan data pajak bumi dan bangunan adalah 0,27 Ha, namun kenyataannya menunjukkan bahwa tanah-tanah pertanian di Desa Kedungprimpen tidak terbagi secara merata. Proporsi pemilikan tanah paling besar adalah kurang dari 0,1 Ha sebanyak 291 rumah tangga atau 32,99% dari keseluruhan rumah tangga di Desa Kedungprimpen. Artinya rumah tangga yang demikian adalah rumah tangga yang hanya memiliki sebidang kecil tanah tempat rumah mereka berdiri, dan tidak memiliki tanah pertanian. Fakta ini menunjukkan bahwa di Desa Kedungprimpen

terjadi ketimpangan distribusi pemilikan lahan sebagai aspek paling penting dalam sumber nafkah penduduk Desa Kedungprimpen.

Kelembagaan BUMDesa

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Pendirian BUMDesa disepakati melalui musyawarah desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa, serta dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Hasil usaha BUMDesa dimanfaatkan untuk pengembangan usaha dan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Budiono, (2015) menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kedungprimpen berdiri sejak tahun 2006, BUMDes ini merupakan lanjutan dari Usaha Desa yang telah ada sejak tahun 1994 yang sebelumnya bernama Usaha Desa.

“BUMDes disini sebenarnya sudah lama, sejak tahun 90an, sejak areal (irigasi) dikelola oleh desa sudah menjadi bagian dari usaha desa. Namun, baru pada tahun-tahun belakangan ini BUMDes lebih banyak mendapatkan perhatian dari pemerintah” (SPI, Direktur BUMDesa, 02 Desember 2017).

Pada Desa Kedungprimpen, BUMDesa memiliki unit usaha berupa pengelolaan irigasi dengan nama Pompanisasi Srisedani yang dikelola secara terpisah dari APBDesa.

“kalau unit usahanya, BUMDes baru memiliki usaha pada bidang pompanisasi yang dikelola oleh pengurus areal (irigasi), dan bertanggungjawab pada direksi BUMDes, dan Kepala Desa. Kedapan kita ingin untuk melakukan irigasi pada desa-desa tetangga, dan menambah unit usaha, mungkin pada pengelolaan tanah lelangan, atau pasar desa” (SPI, Direktur BUMDesa, 02 Desember 2017).

Pompanisasi Srisedani memiliki tujuan untuk mengelola irigasi dengan wilayah kerjanya adalah lahan pertanian Desa Kedungprimpen. Secara struktur pengurus Pompanisasi Srisedani terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, koordinator lapang dan koordinator logistik yang dipilih/diangkat/ dan diberhentikan oleh direksi (Direktur BUMDesa) atas persetujuan komisisaris (kepala desa) dengan masa jabatan selama tiga tahun.

Pengurus pompanisasi Srisedani bertugas untuk memberikan pertanggungjawaban administrasi keuangan, bidang lapangan dan logistik kepada direksi. Pengurus pompanisasi Srisedani dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh pekerja lapang yang membantu melaksanakan dan mengatur pembagian air pada wilayah kerja, operator bertugas untuk mengoperasikan pompa induk, dan servis yang bertugas untuk merawat keseluruhan pompa/mesin asset dari Pompanisasi Srisedani. Keseluruhan total jumlah pekerja lapang, operator, dan servis adalah 22 orang.

“Untuk pekerjaan tersebut, Pompanisasi Srisedani mendapatkan sepertujuh bagian dari total panen di Desa Kedungprimpen pada setiap musim tanam. Dari hasil ini, kemudian dikurangi biaya produksi, lalu dikeluarkan zakat 2.5%, dan baru dibagi sesuai dengan AD/ART. Tahun 2017, hasil areal (irigasi), Alhamdulillah sekitar 1,3 M” (SPI, Direktur BUMDesa, 02 Desember 2017).

Berdasarkan hasil usaha tersebut, setelah dikurangi dengan modal usaha yang dikeluarkan selama satu musim. Adapun hasil usaha dari Pompanisasi Srisedani tersebut pada MT1 tahun 2017 setelah dikurangi modal usaha adalah sebesar Rp. 1.128.200.000. Kemudian dari hasil tersebut dialokasikan 2,5% untuk zakat yang disalurkan pada fakir miskin dan anak yatim, sebesar Rp. 28.205.000. Selanjutnya hasil usaha dibagi sesuai dengan AD/ART BUMDesa, sebagai berikut.

Tabel 1. Pembagian hasil usaha Pompanisasi Srisedani

No	Alokasi	Persentase	Jumlah
1	Komisaris I	3,00%	Rp32.999.850
2	Komisaris II	1,50%	Rp16.499.925
3	Direksi	4,00%	Rp43.999.800
4	Pengurus Unit	10,00%	Rp109.999.500
5	Pekerja Lapangan	24,00%	Rp263.998.800
6	Pendidikan	5,00%	Rp54.999.750
7	Kesejahteraan Desa	12,00%	Rp131.999.400
No	Alokasi	Persentase	Jumlah
8	Pembangunan Desa	20,00%	Rp219.999.000
9	Cadangan Modal	11,00%	Rp120.999.450
10	Sarana Pompanisasi	3,50%	Rp38.499.825
11	Lain-lain	6,00%	Rp65.999.700
Jumlah		100,00%	Rp1.099.995.000

Sumber: diolah dari AD/ART BUMDesa dan hasil wawancara

Berdasarkan pada pembagian hasil usaha Pompanisasi Srisedani diatas, pada kategori pendidikan dikelompokkan lagi kedalam beberapa alokasi pembagian. Pembagian ini didasarkan pada lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Desa Kedungprimpen, baik pendidikan formal maupun pendidikan nonformal. Secara lengkap, alokasi pembagian hasil usaha untuk pendidikan disajikan pada tabel 2.

Tabel 2. Pembagian hasil usaha Pompanisasi Srisedani untuk pendidikan

No	Alokasi	Persentase	Jumlah
1	Pos PAUD	0,50%	Rp5.499.975
2	PAUD	0,50%	Rp5.499.975
3	TK/RA	1,00%	Rp10.999.950
4	SD/MI	0,75%	Rp8.249.963
5	SMP/MTs	0,75%	Rp8.249.963
6	Ponpes	0,50%	Rp5.499.975
7	Sarana Pendidikan	1,00%	Rp10.999.950
Jumlah		5,00%	Rp54.999.750

Sumber: diolah dari AD/ART BUMDesa dan hasil wawancara

Sedangkan pada kategori kesejahteraan desa, secara umum alokasi bagi hasil Pompanisasi Srisedani hanya dialokasikan kepada pada aparatur desa, dan belum terdistribusi keseluruhan lapisan masyarakat sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3 berikut. Hal ini berarti belum ada alokasi yang secara khusus diprioritaskan kepada lapisan terbawah penduduk di Desa Kedungprimpen diluar 2,5% dari zakat yang dikeluarkan.

Tabel 3. Pembagian hasil usaha Pompanisasi Srisedani untuk kesejahteraan desa

No	Alokasi	Persentase	Jumlah
1	Perangkat Desa	1,50%	Rp16.499.925
2	LPMD	0,25%	Rp2.749.988
3	BPD	2,25%	Rp24.749.888
4	RT/RW	2,00%	Rp21.999.900
5	Karang Taruna	1,00%	Rp10.999.950
6	Kader Posyandu	1,00%	Rp10.999.950
7	Muspika	1,00%	Rp10.999.950
8	PKK	1,00%	Rp10.999.950
9	Kelompok Tani	0,75%	Rp8.249.963
10	LINMAS	0,75%	Rp8.249.963
11	Pertanian/ Pengairan	0,50%	Rp5.499.975
Jumlah		12,00%	Rp131.999.400

Sumber: diolah dari AD/ART BUMDesa dan hasil wawancara

PEMBAHASAN

BUMDesa: Strategi Pembangunan Terpadu

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas dengan melihat apa yang akan terjadi pada tahun-tahun mendatang. Penting untuk diperhatikan, pertama tentang transisi demografis, peningkatan proporsi penduduk usia muda memberikan tekanan pada sumber-sumber mata pencaharian penduduk Desa Kedungprimpen yang semakin terbatas, sehingga penting untuk dikelola secara bijak, dan implikasinya pada perumusan kebijakan untuk kesejahteraan sosial penting untuk diperjelas. Pelayanan sumberdaya sosial dan ekonomi harus memberi tempat pada penduduk usia muda, hal ini sudah seharusnya menjadi prioritas dalam menyusun program pembangunan kedepan.

Kedua, tentang ketergantungan penduduk terhadap lahan pertanian yang masih tinggi. Lahan pertanian merupakan salah satu faktor produksi yang penting bagi penduduk di Desa Kedungprimpen sebagaimana modal dan tenaga kerja. Lahan pertanian di Desa Kedungprimpen masih terkait erat dengan sumber nafkah penduduknya. Tingginya tingkat ketergantungan penduduk pada tanah pertanian juga terkait erat dengan pandangan masyarakat setempat yang melatarbelakangi diferensiasi sosial tentang orang kaya, cukup, dan miskin. Perbedaan antara lapisan atas dan bawah semakin nyata dalam hal pemilikan lahan pertanian dan sistem perburuhan yang berlaku.

Atas dasar tersebut, pembangunan desa dapat dirumuskan kembali sebagai upaya yang mencakup penyediaan peluang bagi kaum muda, pria, dan wanita miskin di desa untuk menuntut dan mendapatkan lebih banyak manfaat dari program pembanguan. Hal ini dapat didorong salah satunya dengan memanfaatkan BUMDesa sebagai strategi pembangunan terpadu.

Strategi pembangunan terpadu didalam perencanaan pembangunan membutuhkan penekanan yang sama pada pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan komitmen yang sama antara perencana pembangunan dengan masyarakat sebagai subjek pembangunan. BUMDesa sebagai kelembagaan ekonomi desa yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa berdasarkan kebutuhan dan potensi yang tersedia sangat terkait erat dengan realitas masyarakat setempat. Sehingga, dari pada hanya bergantung dan menunggu pada intervensi program-program pembangunan dari pemerintah yang menciptakan lapangan kerja, desain intervensi pada level desa melalui pengembangan BUMDesa untuk meningkatkan kapasitas produktif masyarakat desa lebih mungkin untuk dijalankan.

Strategi ini tidak hanya sejalan dengan realitas sosial lokal yang ada didesa, namun juga sesuai dengan potensi ekonomi yang ada. Dengan demikian, pengembangan BUMDesa untuk meningkatkan kapasitas produktif masyarakat desa telah memenuhi prasyarat, yang oleh Putra, (2015) diterjemahkan kedalam “*Tradisi Berdesa*”, yakni:

1. BUMDesa membutuhkan modal sosial (kerja sama, solidaritas, kepercayaan, dan sejenisnya) untuk pengembangan usaha yang menjangkau jejaring sosial yang lebih inklusif dan lebih luas.
2. BUMDesa berkembang dalam politik inklusif melalui praksis Musyawarah Desa sebagai forum tertinggi untuk pengembangan usaha ekonomi Desa yang digerakkan oleh BUM Desa.
3. BUMDesa merupakan salah satu bentuk usaha ekonomi Desa yang bersifat kolektif antara pemerintah Desa dan masyarakat Desa. Usaha ekonomi Desa kolektif yang dilakukan oleh BUM Desa mengandung unsur bisnis sosial dan bisnis ekonomi.

Tradisi berdesa pada BUMDesa di Desa Kedungprimpen diwujudkan dengan modal sosial didalam pengelolaan unit usaha BUMDesa, yakni pompanisasi. Unsur-unsur kerjasama, solidaritas, dan kepercayaan menjadi hal mutlak yang diperlukan untuk memastikan sistem pompanisasi bekerja dan menjangkau seluruh sawah dari penduduk Desa Kedungprimpen. Kerjasama, menjadi poin pertama, dimana jumlah pengurus BUMDesa yang terbatas untuk melakukan perawatan saluran-saluran air pompanisasi membutuhkan bantuan dari seluruh *stakeholder* untuk melakukan hal tersebut. Kemudian, kerjasama juga dibutuhkan didalam pembagian hasil usaha antara petani dan BUMDesa, kerjasama dan rasa percaya penting untuk dimiliki oleh kedua pihak sehingga pembagian hasil dapat dilakukan. Selanjutnya, pengembangan BUMDesa di Desa Kedungprimpen dapat dilakukan dengan memberikan penekanan pada perencanaan secara inklusif dimana musyawarah desa sebagai forum tertinggi harus dihormati, hal ini sekaligus mendorong partisipasi aktif dari masyarakat desa kedalam pembangunan ekonomi yang selaras dengan pembangunan sosial.

Perkembangan sosial adalah hasil dari organisasi sosial dan sebagai suatu jenis dinamika di dalam organisasi sosial. Lembaga pembangunan merupakan kunci dari perkembangan sosial. Pada tingkat desa, organisasi atau lembaga desa adalah perantara antara lembaga pembangunan tingkat atas dengan masyarakat desa. Disinilah terjadi proses perubahan dari aktivitas kolektif, solidaritas, dan partisipasi kearah aktivitas produktif.

Partisipasi ini akan berarti dalam proses pembangunan jika didukung oleh solidaritas dan kepercayaan dalam pengembangan usaha yang menjangkau jejaring sosial dengan komitmen kuat dari seluruh *stakeholder*, antara

lain pemerintah desa, BPD, direksi BUMDesa, pengurus unit Pompanisasi Srisedani, pekerja lapangan, dan masyarakat Desa Kedungprimpen secara keseluruhan.

Didalam perekonomian penduduk Desa Kedungprimpen, BUMDesa memiliki peran penting didalam pengelolaan irigasi, yang artinya BUMDesa bertanggungjawab penuh untuk melakukan pendistribusian air kesetiap lahan pertanian penduduk Desa Kedungprimpen. Pada tahap ini, BUMDesa tidak saja penting untuk menekankan pada partisipasi penduduk secara aktif, tetapi juga harus memberikan prioritas pada kebijakan yang mendukung penuh usaha ekonomi penduduk, yang dalam hal ini adalah pertanian. Atas unit usaha ini, BUMDesa melalui Pompanisasi Srisedani mendapatkan sepetujuh bagian dari total luasan panen di Desa Kedungprimpen pada setiap musim tanam. Disini pengelolaan BUMDesa patut untuk mendapatkan perhatian.

Pada sistem pembagian hasil usaha Pompanisasi Srisedani penting untuk dilakukan penataan ulang. Hal ini merupakan bentuk strategi menjaga komitmen BUMDesa sebagai unit usaha ekonomi desa yang bersifat kolektif antara pemerintah desa dan masyarakat desa, dimana usaha ekonomi dilakukan mengandung unsur bisnis sosial dan bisnis ekonomi.

Penataan ulang pembagian hasil usaha diantaranya adalah pada alokasi untuk kesejahteraan desa. Berdasarkan hasil penelitian, alokasi kesejahteraan desa baru diperuntukan untuk aparat pemerintahan desa, sehingga belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat terbawah. Saat ini, alokasi untuk lapisan masyarakat terbawah baru dari zakat sebesar 2,5 persen dari hasil usaha, dan belum dialokasikan secara khusus sebagai bagian dari bagi hasil usaha. Sehingga perencanaan kebijakan BUMDesa yang dapat menjangkau

seluruh elemen masyarakat terkhusus lapisan terbawah adalah dengan penataan ulang sistem pembagian hasil usaha disertai dengan perubahan pada proporsi alokasi untuk kesejahteraan desa. Hal ini penting untuk diperhatikan sebagai bentuk strategi untuk menyelaraskan pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial.

Kemudian, terkait alokasi pembagian hasil usaha untuk kepemudaan yang dalam hal ini karang taruna, penting diingat bahwa dalam aspek pembangunan kepemudaan selain dibutuhkan sumber dana, juga diperlukan pembinaan minat bakat pada penduduk usia muda. Sehingga, partisipasi aktif dari penduduk usia muda penting untuk diberikan ruang didalam perumusan arah kebijakan BUMDesa.

Selanjutnya, terkait dengan kebutuhan penduduk Desa Kedungprimen atas lahan pertanian, BUMDesa memiliki potensi yang dapat dikelola. Potensi ini adalah berupa tanah kas desa yang dilelang untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa (PADes). Luas keseluruhan tanah kas desa yang dilelang adalah 16,635 Ha, dengan jumlah pendapatan asli desa (PADes) yang dapat dihimpun dari pelelangan tanah kas desa pada tahun 2017 adalah senilai Rp. 500.540.000.

Pengelolaan ini dapat dilakukan oleh BUMDesa dengan komitmen untuk melakukan distribusi sumber nafkah pada lapisan terbawah penduduk di Desa Kedungprimen dengan biaya sewa terjangkau. Hal ini sekaligus merupakan strategi dalam peningkatan kualitas ekonomi penduduk Desa Kedungprimen.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa, BUMDesa sebagai unit usaha ekonomi desa bersifat kolektif antara pemerintah desa dan masyarakat desa, dimana

usaha ekonomi yang dilakukan mengandung unsur bisnis ekonomi dan bisnis sosial.

Didalam perekonomian penduduk Desa Kedungprimen, BUMDesa memiliki peran penting didalam pengelolaan irigasi, dan bertanggungjawab penuh untuk melakukan pendistribusian air ke setiap lahan pertanian penduduk Desa Kedungprimen di dalam proses produksi pertanian. Pada aspek sosial, BUMDesa memiliki tanggungjawab didalam pembagian hasil usaha pengelolaan irigasi kepada seluruh lapisan penduduk di Desa Kedungprimen, secara khusus lapisan terbawah.

BUMDesa di Desa Kedungprimen memiliki potensi mengembangkan unit usaha yang dapat dikelola berupa tanah kas desa. Pengelolaan tanah kas desa oleh BUMDesa dapat digunakan sebagai strategi peningkatan kualitas ekonomi penduduk sekaligus mengurangi ketimpangan. Hal ini dapat dilakukan dengan adanya komitmen kuat antara seluruh *stakeholder* untuk mendistribusikan tanah kas desa kepada golongan lapisan terbawah penduduk dengan biaya sewa terjangkau. Upaya tersebut perlu terus dikembangkan dengan meningkatkan status kelembagaan, sumberdaya manusia, sarana prasarana, dan otoritas dari BUMDesa.

SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang selaras dengan pembangunan sosial diperlukan intervensi kebijakan pada tingkat desa yang mengakomodir semua pihak, yang dapat dicapai dengan:

1. Kemauan dan komitmen kuat dari seluruh *stakeholder* didalam pengelolaan BUMDesa untuk melakukan penataan ulang alokasi pembagian hasil usaha. Termasuk pada

- penguatan status kelembagaan BUMDesa.
2. Peningkatan kapasitas SDM didalam manajerial unit usaha BUMDesa. Hal ini dapat diajukan kepada instansi terkait yang lebih tinggi dalam bentuk pelatihan atau pendampingan.
 3. Pengawasan kinerja BUMDesa oleh seluruh masyarakat desa sebagai bentuk partisipasi aktif dalam pembangunan.
 4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendukung unit usaha BUMDesa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada seluruh masyarakat Desa Kedungprimpen yang sangat terbuka dalam memberikan informasi dan inspirasi kepada peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I. R. (2013). *Intervensi Komunitas & Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat* (1 ed.). Jakarta: Rajawali Press.
- Adi, I. R. (2015). *Kesejahteraan Sosial: Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Badan Pusat Statistik. (2017). *Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi 2007-2017*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Budiono, P. (2015). Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Bojonegoro (Studi di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor). *Jurnal Politik Muda*, Vol. 4, No. 01, 116-125.
- Chambers, R. (1987). *Pembangunan Desa: Mulai dari Belakang*. Jakarta: LP3ES.
- Creswell, J. W. (2014). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (4th ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ife, J. (2013). *Community Development in An Uncertain World Vision, Analysis and Practice*. New York: Cambridge University Press.
- Kementerian Dalam Negeri. (2010). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2015). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUM Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- Midgley, J. (2005). *Pembangunan Sosial Perspektif Pembangunan dalam Kesejahteraan Sosial*. (D. Setiawan, & S. Abbas, Trans.) Jakarta: Ditperta Depag RI.
- Muhtar, & Purwanto, A. B. (2016). Peran Unit Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Anak Nagari dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus di Kota Payakumbuh). *Sosio Konsepsia*, Vol. 5, No. 03, 205-2016.
- Nainggolan, T., & Susantyo, B. (2017). *Upaya Percepatan Penanggulangan*

- Kemiskinan Melalui Pogram Keluarga Harapan: Studi di Empat Daerah di Indonesia. *Sosio Konsepsia*, Vol. 7, No. 01, 31-46.
- Prasetyo, R. A. (2016). Peranan BUMDES dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. *Dialektika*, Vol. XI, No.01, 86-100.
- Putra, A. S. (2015). *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2005). Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Jakarta: Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: Republik Indonesia.
- Ridlwan, Z. (2013). Payung Hukum Pembentukan BUMDes. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 03, 355-370.
- Setiawan, H. H. (2017). Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pusat Kesejahteraan Sosial. *Sosio Informa*, Vol. 3, No. 03, 273-286.
- Sofianto, A. (2017). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan Melalui Kelompok Usaha. *Sosio Informa*, Vol. 3, No. 03, 2013-215.
- Sumarti, T. (2007). Kemiskinan Petani dan Strategi Nafkah Ganda. *Jurnal Sodality*, Vol. 1, No. 02, 217-232.

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN SOSIAL NON TUNAI DI INDONESIA

IMPLEMENTATION OF NON-CASH SOCIAL ASSISTANCE PROGRAM IN INDONESIA

Risnandar dan Aditya Wisnu Broto

Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin
Kementerian Sosial Republik Indonesia
Jl. Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat
E-mail: risnandar@kemsos.go.id

Diterima: 14 Maret 2018; Direvisi: 27 Juli 2018; Disetujui: 8 Agustus 2018

Abstrak

Studi lapangan ini bertujuan untuk menggali informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui e-Warong. Adapun yang melatarbelakangi studi ini adalah keingintahuan terhadap tingkat kepuasan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program BPNT yang disalurkan melalui e-Warong, menentukan kesenjangan antara harapan KPM dengan kinerja Program BPNT untuk setiap atribut kepuasan, serta kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan e-Warong. Penentuan responden dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi menggunakan *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, artinya dalam studi ini setiap subjek yang diambil dari populasi dipilih berdasarkan pertimbangan potensi persoalan kemiskinan serta keterwakilan wilayah penyaluran BPNT. Jumlah sampel dalam studi ini dipilih sebanyak 57 responden yang meliputi penerima manfaat, pengelola e-Warong dan Dinas Sosial di 7 Provinsi dan 12 Kota. Hasil analisis menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan yang terjadi antara kinerja yang dihasilkan dengan harapan yang seharusnya diperoleh penerima manfaat, seperti: 1) ketersediaan bahan pangan di e-Warong ($X_3 = -0.37$), 2) antrian pencairan bantuan pangan di e-Warong ($X_{17} = -0.32$), 3) proses transaksi di e-Warong yang perlu diperhatikan kembali ($X_{27} = -0.30$), 4) proses penyetoran, sarana dan prasarana e-Warong ($X_4 = -0.24$), serta 5) proses pendampingan pelaksanaan e-Warong yang perlu dilakukan secara kontinu ($X_{28} = -0.16$). Kesimpulan dari kegiatan ini bahwa secara umum program penyaluran BPNT melalui e-Warong sudah cukup progresif, efektif dan efisien serta sangat potensial dalam memberdayakan keluarga penerima manfaat secara berkelanjutan, namun masih ada hal-hal yang harus diperbaiki seperti: pemantapan proses bisnis secara komprehensif, pendampingan program secara intensif berkelanjutan, dan pembangunan jejaring kerja.

Kata Kunci: bantuan pangan non tunai, elektronik warung gotong royong (e-warong), analisis kinerja.

Abstract

This study aims to explore all the information related to the implementation of the distribution of Non-Cash Food Assistance Program through e-Warong. Point of interest in this study is to know the satisfaction level of Beneficiary Family in Non-Cash Food Assistance Program which is channeled through e-Warong, to determine the gap between beneficiary families' expectation and the performance of Non-Cash Food Program for each satisfaction attribute, and also the problem's solution which is in the process of implementing e-Warong. Determination of respondents in monitoring and evaluation activity using *purposive sampling*, that is sample determination technique with certain consideration, meaning in this study every subject taken from population is chosen based on consideration of potency of poverty problem and representation of area of distribution of BPNT. The number of samples in this study was selected as many as 57 respondents covering beneficiaries, managers of e-Warong and Social Services in 7 Provinces and 12 Cities. The analysis results indicates that there is still a deficiency between the program performance

and the expected benefits for beneficiaries, such as: 1) foodstocks in e-Warong ($X3 = -0.37$), 2) food aid disbursement queue in e-Warong ($X17 = -0.32$), 3) transaction processing in e-Warong requiring memory ($X27 = -0.30$), 4) e-Warong's stocking process, facilities and infrastructure ($X4 = -0.24$), and 5) e-Warong assistancy which needs to be done continuously ($X28 = -0.16$). Adjustment of this study in general that the program of Non-Cash Food Submission through e-Warong is quite progressive, effective and efficient and very potential in empowering families of beneficiaries on a sustainable basis, but there are still things to choose from: intensified business process comprehensively, intensive program assistance, and networking development.

Keywords: non-cash food assistance program, e-warong, importance performance analysis.

PENDAHULUAN

Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu prioritas pembangunan yang senantiasa diupayakan pemerintah. Pada akhir periode RPJMN 2015-2019, tingkat kemiskinan ditargetkan pada kisaran 7,00-8,00 persen di tahun 2019. Angka kemiskinan mengalami penurunan dalam 10 tahun terakhir, tercatat menurut data BPS pada September 2017 sebesar 10,64%, mengalami penurunan 5,94% dari tahun 2007. Hal tersebut senada dengan kondisi ketimpangan pada tahun 2017 sebesar 0,397, berkurang 0,004 point pada tahun 2016. Selain jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga diarahkan untuk mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selama periode 2010-2017, tingkat kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan sedikit mengalami penurunan dalam setahun terakhir. Data Susenas menunjukkan tingkat kedalaman tahun 2017 sebesar 1,79, berkurang 0,42 dari tahun 2010. Kondisi tersebut berbanding lurus terhadap tingkat keparahan pada tahun 2017 sebesar 0,46 mengalami penurunan sebesar 0,12. Penurunan nilai tingkat kedalaman mengindikasikan bahwa ada peningkatan pengeluaran penduduk miskin yang semakin mendekati garis kemiskinan. Sedangkan, tingkat keparahan memberikan gambaran penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin di Indonesia mengecil dan lebih merata.

Kebijakan penanggulangan kemiskinan ditujukan untuk mengurangi beban penduduk miskin dan upaya peningkatan pendapatan masyarakat kurang mampu (40 persen masyarakat berpenghasilan terbawah). Dengan fokus ini, pertumbuhan yang inklusif akan dapat tercapai, sehingga hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh penduduk termasuk masyarakat kurang mampu.

Upaya pengurangan kemiskinan pada tahun 2017 diperkuat, antara lain penyaluran bantuan sosial secara nontunai dan penataan basis data terpadu. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/e-warong yang bekerjasama dengan bank. Mekanisme penggunaan satu kartu melalui perbankan dapat meningkatkan ketepatan sasaran dan efektivitas bantuan, serta meningkatkan akses masyarakat kurang mampu terhadap layanan keuangan formal.

Sesuai arahan Presiden RI, bahwa setiap bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara non-tunai dan menggunakan sistem perbankan untuk kemudahan mengontrol, memantau, dan mengurangi penyimpangan. Penggunaan sistem perbankan tersebut dengan memanfaatkan keuangan digital yang dimaksudkan untuk mendukung perilaku produktif dan memperluas inklusi keuangan. Kelompok masyarakat

miskin akan mendapatkan *electronic voucher* (*e-voucher*) dalam bentuk kartu, dan dapat membeli beras sesuai dengan kualitas yang diinginkan dan dapat dikombinasikan untuk pembelian bahan pangan lainnya. Oleh karena itu, pada tahun 2017 transformasi Program Rastra menjadi Program Bantuan Pangan Non Tunai mulai dilaksanakan di 44 kota terpilih, sedangkan kabupaten/kota lainnya masih melaksanakan Program Rastra.

Dalam mendukung penyaluran bantuan pangan non tunai secara luas maka dipandang perlu melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan konsepnya.

Penurunan tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan pada periode tahun 2011-2014 lebih cepat dibanding perkotaan. Namun dalam dua tahun terakhir, penurunan tingkat kemiskinan di perdesaan jauh lebih lambat daripada penurunan kemiskinan di perkotaan. Permasalahan yang menjadi faktor penyebab antara lain (1) pelaksanaan berbagai bantuan yang dilaksanakan secara parsial dan ketidaktepatan sasaran penerima program sehingga berdampak pada bantuan kurang efektif dalam meringankan beban masyarakat miskin dan rentan (2) belum optimalnya sosialisasi kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sehingga berpengaruh terhadap kesiapan KPM dalam pelaksanaan program BPNT serta (3) kurangnya dukungan dari Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan penyaluran program BPNT melalui e-Warong.

Dalam studi ini mendalami permasalahan yang berkaitan dengan penilaian tingkat kepuasan KPM terhadap program BPNT. Tingkat kepuasan KPM dinilai dari perbandingan kinerja pelaksanaan penyaluran BPNT selama ini dengan harapan mereka terhadap BPNT. Diantara nilai kinerja dan

harapan tersebut diperoleh informasi yang memiliki kemungkinan terjadinya kesenjangan penilaian (*gap*). Nilai kesenjangan ini dapat menggambarkan terhadap pelaksanaan program secara menyeluruh. Disamping tingkat kepuasan KPM, pendalaman analisis faktor lain seperti Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola e-Warong, sarana dan prasarana (*sarpras*), regulasi, kemampuan manajerial e-Warong, kemitraan (BULOG dan distributor lain), peran Dinas Sosial serta pendamping dalam penyaluran BPNT melalui e-Warong dibahas secara mendalam dalam laporan evaluasi.

Pemilihan lokasi sampel dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling* dengan pertimbangan potensi persoalan kemiskinan serta keterwakilan wilayah penyaluran BPNT. Pertimbangan lain dalam pemilihan lokasi sampel yakni, kesiapan infrastruktur pembayaran dan jaringan telekomunikasi, kesiapan pasokan bahan pangan dan usaha eceran dan dukungan pemerintah daerah. Adapun jumlah sampel responden sebanyak 57 responden penerima manfaat, 57 responden pengelola e-Warong dan 12 responden dari Dinas Sosial Kota. Lokasi sampel sebanyak 12 Kota di 7 Provinsi, yaitu: Kota Pekanbaru (Provinsi Riau), Kota Jambi (Provinsi Jambi), Kota Bandar Lampung (Provinsi Lampung), Kota Serang (Provinsi Banten), Kota Tasikmalaya, Bandung, Cimahi dan Cirebon (Provinsi Jawa Barat), Kota Tegal, Salatiga, Solo (Provinsi Jawa Tengah) dan Kota Makassar (Provinsi Sulawesi Selatan).

Dalam gambar kerangka pikir dibawah ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan studi lapangan ini terbagi menjadi 3 (tiga) sasaran responden yaitu: Kelompok Penerima Manfaat (KPM) Program BPNT, Pengelola e-Warong dan Dinas Sosial. Tingkat kepuasan KPM dapat dilihat dari 5 (lima) dimensi yaitu *Tangibles*,

Reliability, Responsiveness, Assurance, dan Empaty. Untuk melihat nilai tingkatan kepuasan KPM, dilakukan analisis GAP untuk melihat kesenjangan diantara variabel indikator. Kesenjangan terjadi apabila proporsi harapan KPM lebih besar dari kinerja yang dilakukan oleh para pelaksana program. Analisis pengelola e-Warong, menggunakan klasifikasi permasalahan yang meliputi variabel sarana dan prasarana, manajerial e-Warong, kemitraan (BULOG, KMIS dan distributor lainnya) dan pendamping program. Sedangkan klasifikasi permasalahan untuk Dinas Sosial meliputi sosialisasi dan proses pembinaan. Diharapkan hasil analisis tersebut dapat memberi masukan bagi peningkatan efektivitas program BPNT melalui berbagai strategi prioritas dalam upaya meningkatkan kepuasan terhadap KPM.

Berdasarkan batasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kepuasan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara umum terhadap pelaksanaan program BPNT melalui e-Warong?
2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan Program e-Warong yang sudah dilaksanakan selama ini?
3. Seberapa penting peran pendamping dalam pelaksanaan penyaluran BPNT melalui Program e-Warong?
4. Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala pelaksanaan BPNT melalui Program e-Warong?

METODE IMPORTANCE PERFORMANCE ANALYSIS (IPA)

Importance Performance Analysis (IPA) adalah teknik sederhana dan berguna untuk mengidentifikasi atribut-atribut dari sebuah produk atau jasa yang notabene memerlukan

peningkatan atau jika memungkinkan untuk menghemat biaya produksi tanpa merusak kualitas secara keseluruhan (Huang, Kuo dan Xu, 2009). *Importance-Performance Analysis* pertama kali diperkenalkan oleh Martilla dan James pada 1977. Menurut Parasuraman dan Rangkuti (2006) konsep ini berasal dari konsep SERVQUAL, intinya tingkat kepentingan pelanggan (*customer expectation*) diukur dalam kaitannya dengan apa yang seharusnya dikerjakan oleh perusahaan agar menghasilkan produk atau jasa berkualitas tinggi.

Setelah diketahui tingkat kepentingan dan kinerja setiap variabel untuk seluruh responden, maka langkah selanjutnya adalah memetakan hasil perhitungan yang telah didapatkan ke dalam diagram kartesius. Untuk menyederhanakan angka dalam diagram dapat dilakukan dengan cara membagi masing-masing total kepentingan dan total kinerja dengan jumlah responden menggunakan rumus di bawah ini:

$$\bar{X} = \frac{\sum x_i}{n}$$

$$\bar{Y} = \frac{\sum y_i}{n}$$

dimana,

$\bar{X}$ = rata-rata *importance*

$\bar{Y}$ = rata-rata *performance*

$\sum x_i$ = total skor untuk setiap *i* pada variabel *importance*

$\sum y_i$ = total skor untuk setiap *i* pada variabel *performance*

n = total responden

Tahap terakhir adalah menjabarkan tiap atribut dalam diagram kartesius yang dibagi menjadi empat bagian. Titik (X,Y) di mana sumbu X merupakan rata-rata *performance* seluruh faktor atribut, sedangkan sumbu Y merupakan rata-rata *importance* seluruh faktor atribut.



Gambar 1. Importance Performance Analysis (IPA)

Berikut ini keterangan mengenai kuadran-kuadran yang menjelaskan mengenai *importance* dan *performance* masing-masing atribut:

1. Kuadran I (*concentrate here*) dimana atribut yang masuk ke dalam kuadran ini diperlukan perhatian terhadap variabel yang lemah. Faktor-faktor yang belum memuaskan merupakan prioritas untuk ditingkatkan kinerjanya.
2. Kuadran II (*keep up the good work*) dimana atribut yang masuk ke dalam kuadran ini merupakan faktor penting yang menunjang kepuasan konsumen.
3. Kuadran III (*low priority*) dimana atribut yang masuk ke dalam kuadran ini merupakan faktor-faktor yang dianggap tidak penting sehingga tidak perlu diperhatikan/ditingkatkan kinerjanya karena pengaruhnya sangat kecil.
4. Kuadran IV (*possible overkill*) dimana atribut yang masuk ke dalam kuadran ini penggunaan sumber daya yang berlebih, atribut-atribut pada kuadran ini tidak terlalu penting/diharapkan sehingga sumber daya yang ada perlu dialokasikan pada faktor lain yang memerlukan prioritas tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas Instrumen

Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara langsung kepada responden.

Instrumen dibagi menjadi 3 tipe yaitu Instrumen A ditujukan untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Instrumen B untuk Pengelola e-Warong dan Instrumen C ditujukan untuk Dinas Sosial. Dari masing-masing instrumen tersebut dianalisis sesuai dengan peruntukannya, untuk instrumen A menggunakan Analisis diskriptif (GAP) sedangkan instrumen B dan C menggunakan Analisis deskriptif (Klasifikasi permasalahan).

Instrumen A menggunakan indikator sebanyak 34, indikator tersebut dikelompokkan menjadi 5 dimensi yaitu dimensi tangibles, dimensi reliability, dimensi responsiveness, dimensi assurance dan dimensi empathy. Untuk mengetahui harapan dan penilaian kinerja, kepada responden diajukan pertanyaan (indikator) disetiap dimensinya.

Setiap dimensi diukur melalui indikator pertanyaan dan di dalam indikator pertanyaan dibuatkan skala 1-5 untuk jawabannya. Instrumen B dikelompokkan menjadi 3 besaran pertanyaan yaitu kriteria e-Warong, Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola e-Warong dan Kemitraan e-Warong. Sedangkan untuk instrumen C digunakan untuk menganalisa seberapa besar dukungan Dinas Sosial terhadap pelaksanaan e-Warong.

Khusus Instrumen A untuk membahas analisis tingkat kepuasan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terhadap fungsi e-Warong terdapat 2 variabel yang diukur yaitu variabel kinerja dan variabel harapan sehingga diketahui kesenjangan yang terjadi. Semakin kecil perbedaan nilai (kesenjangan), semakin efektif pelaksanaan program dan sebaliknya. Dalam setiap indikator diberikan skala nilai, mulai 1= tidak setuju, 2 = kurang setuju, 3 = cukup setuju, 4 = setuju, dan 5 = sangat setuju. KPM diminta untuk memberikan nilai antara

1-5 setiap indikator yang diajukan. Adapun tahapan analisisnya adalah menguji instrumen dengan (1) uji validitas dan reliabilitas dan (2) GAP (rata-rata persepsi terhadap pelayanan dikurangi dengan rata-rata ekspektasi/ harapan terhadap pelayanan).

Teknik pengujian yang digunakan untuk uji validitas pada instrumen tipe A untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah menggunakan korelasi *Bivariate Pearson*. Analisis ini dengan caramengkorelasikan masing-masing skor indikator dimensi dengan skor total.

Skor total adalah penjumlahan dari keseluruhan indikator. Indikator dalam bentuk pertanyaan yang berkorelasi signifikan dengan skor total menunjukkan indikator tersebut mampu memberikan dukungan yang valid. Jika $r \text{ hitung} \geq r \text{ tabel}$ (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau indikator pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid). Hasil pengujian uji validitas dengan menggunakan SPSS dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Dimensi Tangibles

Dari output terlihat bahwa masing-masing indikator pada Dimensi Tangibles yang terdiri dari 14 indikator yaitu X1 (Lokasi e-Warong di kelurahan atau tempat yang telah disepakati), X2 (Lokasi e-Warong mudah untuk diakses dan dijangkau oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM)), X3 (Bahan pokok yang tersedia di e-Warong bervariasi (Beras, Telur, Tepung Terigu, Minyak Goreng dst)), X4 (Stok bahan pokok selalu tersedia di e-Warong), X5 (Ruang penyimpanan bahan pokok di e-Warong cukup memadai), X6 (Jumlah petugas yang melayani e-Warong cukup), X7 (Jumlah bantuan yang diterima sudah sesuai dengan kebutuhan KPM), X8 (Petugas e-Warong mengecek kualitas bahan pokok yang dijual di kios e-Warong), X9 (Bangunan yang dijadikan kios e-Warong

sudah layak dan memadai), X10 (Jumlah alat transaksi non tunai EDC cukup, hal tersebut untuk mengurangi antrian saat transaksi), X11 (Jaringan internet di lokasi e-Warong sangat mendukung dalam hal transaksi non tunai melalui EDC), X12 (Papan nama e-Warong sudah layak), X13 (Lebih mudah transaksi non tunai daripada menggunakan uang cash saat transaksi) dan X14 (Kartu kombo memudahkan dalam transaksi di e-Warong), dapat disimpulkan bahwa $r \text{ hitung} (X1 \dots X14) \geq r \text{ hitung} (N=57)$ yaitu 0,2609 artinya, semua indikator dalam dimensi tangible tersebut dinyatakan valid.

Dimensi Reliability

Dari output terlihat bahwa masing-masing indikator pada Dimensi Reliability yang terdiri dari 6 indikator yaitu X15 (Pelayanan yang diberikan petugas e-Warong sudah sesuai dengan keinginan Keluarga Penerima Manfaat (KPM)), X16 (Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) telah melalui musyawarah yang melibatkan semua pihak termasuk orang miskin), X17 (KPM dapat mencairkan bantuannya kapan saja dibutuhkan dan tidak perlu mengantri lagi), X18 (Dinas Sosial Kabupaten/kota ikut memantau jalannya e-Warong), X19 (Dinas Sosial Kabupaten/kota membantu dalam penyelesaian masalah e-Warong KUBe) dan X20 (Pengurus e-Warong mengenal Keluarga Penerima Manfaat (KPM)), dapat disimpulkan bahwa $r \text{ hitung} (X15, X16, X17, X18, X19 \text{ dan } X20) \geq r \text{ hitung} (N=57)$ yaitu 0,2609 artinya semua indikator dalam dimensi reliability tersebut dinyatakan valid.

Dimensi Responsiveness

Dari output terlihat bahwa masing-masing indikator pada Dimensi Responsiveness yang terdiri dari 5 indikator yaitu X21 (Petugas memberi pemahaman tentang e-Warong kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), X22 (Petugas selalu bersedia memberikan informasi

kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) apabila diperlukan), X23 (Petugas menanggapi keluhan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan masyarakat), X24 (Petugas menerima saran dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan masyarakat) dan X25 (Petugas siap mengganti apabila bahan pokok berkualitas jelek) dapat disimpulkan bahwa r hitung (X21, X22, X23, X24, dan X25) $\geq r$ hitung (N=57) yaitu 0,2609 artinya semua indikator dalam dimensi responsiveness tersebut dinyatakan valid.

Dimensi Assurance

Dari output terlihat bahwa masing-masing indikator pada Dimensi Assurance yang terdiri dari 5 indikator yaitu X26 (Petugas memastikan harga bahan pokok yang dijual di e-Warong lebih murah dibandingkan dengan Warung tradisional atau minimarket yang ada disekitar e-Warong). X27 (Petugas menjamin kelancaran transaksi di e-Warong), X28 (KPM yakin keamanan transaksi di e-Warong telah dijamin oleh petugas), X29 (KPM yakin telah terdaftar sebagai penerima bantuan sosial yang sah) dan X30 (KPM yakin Pemerintah selalu menyediakan bantuan sosial setiap tahunnya) dapat disimpulkan bahwa r hitung (X26, X27, X28, X29, dan X30) $\geq r$ hitung (N=57) yaitu 0,2609 artinya semua indikator dalam dimensi assurance tersebut dinyatakan valid.

Dimensi Emphaty

Dari output terlihat bahwa masing-masing indikator pada Dimensi Emphaty yang terdiri dari 4 indikator yaitu X31 (Petugas telah melaksanakan tugas sesuai dengan SOP), X32 (Petugas melibatkan pendamping sosial dalam pelaksanaan pendistribusian kartu kombo), X33 (Petugas telah memahami keinginan KPM) dan X34 (Tokoh masyarakat telah dilibatkan dalam program bantuan pangan non tunai melalui e-Warong) dapat disimpulkan bahwa r hitung (X31, X32, X33, dan X34) $\geq$

r hitung (N=57) yaitu 0,2609 artinya semua indikator dalam dimensi emphaty tersebut dinyatakan valid.

Reliabilitas Instrumen

Untuk melakukan perhitungan uji reliabilitas dapat menggunakan bantuan software pengolah data. Dari Output software tersebut menghasilkan cronbach's alpha untuk ke-5 dimensi (Dimensi Tangible, Dimensi Reliability, Dimensi Responsiveness, Dimensi Assurance dan Dimensi Emphaty) yang lebih besar dari 0.6 hasil ini disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan sudah cukup reliable untuk mengukur tingkat kepuasan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terhadap fungsi e-Warong sebagai titik distribusi bantuan sosial non tunai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 6.

Analisis Gap

Responden umumnya berada pada usia 30-55 tahun, didominasi oleh responden yang berjenis kelamin perempuan umumnya kaum perempuan ini sebagai ibu rumah tangga atau bekerja serabutan sehingga masih dapat mengurus kegiatan rumah tangganya. Secara umum tingkat kepuasan KPM terhadap fungsi e-Warong sebagai titik distribusi penyaluran bantuan sosial non tunai serta komponen penghidupan masyarakat miskin secara berkelanjutan telah memiliki tingkat kepuasan yang tinggi yaitu 81,37%, sebagian besar KPM menganggap sasaran penerima program sudah tepat, harga sembako di e-Warong lebih rendah daripada harga pasar karena pasokan barangnya langsung dari distributor (Bulog), meskipun kualitas berasnya masih dibawah yang dijual di pasar umum namun masih dapat diterima untuk dikonsumsi. Selain itu, dengan adanya e-Warong KPM dapat mencairkan bantuannya kapan saja dibutuhkan.

Hasil pengolahan data instrumen A (KPM) menunjukkan bahwa masih terdapat indikator yang masih berada di bawah harapan KPM. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai gap yang

bernilai negative (-). Namun demikian, terdapat 12 indikator yang bernilai positif dan 3 indikator bernilai nol (0). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel Hasil Analisis Gap

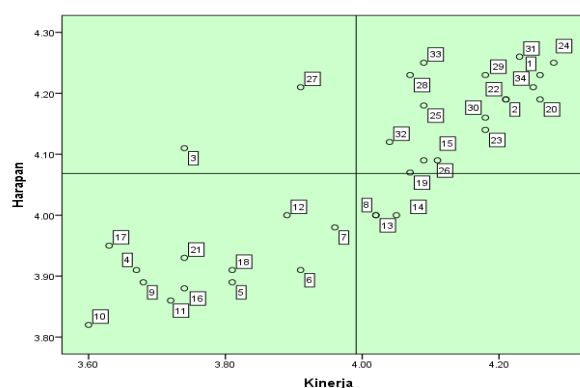
Dimensi	Indikator		Kinerja	Harapan	GAP
Dimensi Tangible	Lokasi e-Warong di kelurahan atau tempat yang telah disepakati	X1	4.26	4.23	0.03
	Lokasi e-Warong mudah untuk diakses dan dijangkau oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	X2	4.21	4.19	0.02
	Bahan pokok yang tersedia di e-Warong bervariasi (Beras, Telur, Tepung Terigu, Minyak Goreng dst)	X3	3.74	4.11	-0.37
	Stok bahan pokok selalu tersedia di e-Warong	X4	3.67	3.91	-0.24
	Ruang penyimpanan bahan pokok di e-Warong cukup memadai	X5	3.81	3.89	-0.08
	Jumlah petugas yang melayani e-Warong cukup	X6	3.91	3.91	0
	Jumlah bantuan yang diterima sudah sesuai dengan kebutuhan KPM	X7	3.96	3.98	-0.02
	Petugas e-Warong mengecek kualitas bahan pokok yang dijual di kios e-Warong	X8	4.02	4	0.02
	Bangunan yang dijadikan kios e-Warong sudah layak dan memadai	X9	3.68	3.89	-0.21
	Jumlah alat transaksi non tunai EDC cukup, hal tersebut untuk mengurangi antrian saat transaksi	X10	3.6	3.82	-0.22
	Jaringan internet di lokasi e-Warong sangat mendukung dalam hal transaksi non tunai melalui EDC	X11	3.72	3.86	-0.14
	Papan nama e-Warong sudah layak	X12	3.89	4	-0.11
	Lebih mudah transaksi non tunai daripada menggunakan uang cash saat transaksi	X13	4.02	4	0.02
	Kartu kombo memudahkan dalam transaksi di e-Warong	X14	4.05	4	0.05
Dimensi Reliability	Pelayanan yang diberikan petugas e-Warong sudah sesuai dengan keinginan Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	X15	4.11	4.09	0.02
	Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) telah melalui musyawarah yang melibatkan semua pihak termasuk orang miskin	X16	3.74	3.88	-0.14
	KPM dapat mencairkan bantuannya kapan saja dibutuhkan dan tidak perlu mengantri lagi	X17	3.63	3.95	-0.32
	Dinas Sosial Kabupaten/kota ikut memantau jalannya e-Warong	X18	3.81	3.91	-0.10
	Dinas Sosial Kabupaten/kota membantu dalam penyelesaian masalah e-Warong KUBe	X19	4.07	4.07	0
	Pengurus e-Warong mengenal Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	X20	4.26	4.19	0.07
Dimensi Responsiveness	Petugas memberi pemahaman tentang e-Warong kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	X21	3.74	3.93	-0.19

Dimensi	Indikator		Kinerja	Harapan	GAP
	Petugas selalu bersedia memberikan informasi kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) apabila diperlukan	X22	4.21	4.19	0.02
	Petugas menanggapi keluhan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan masyarakat	X23	4.18	4.14	0.04
	Petugas menerima saran dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan masyarakat	X24	4.28	4.25	0.03
	Petugas siap mengganti bahan pokok apabila berkualitas jelek	X25	4.09	4.18	-0.09
Dimensi Assurance	Petugas memastikan harga bahan pokok yang dijual di e-Warong lebih murah dibandingkan dengan Warung tradisional atau minimarket yang ada disekitar e-Warong	X26	4.09	4.09	0
	Petugas menjamin kelancaran transaksi di e-Warong	X27	3.91	4.21	-0.30
	KPM yakin keamanan transaksi di e-Warong telah dijamin oleh petugas	X28	4.07	4.23	-0.16
	KPM yakin telah terdaftar sebagai penerima bantuan sosial yang sah	X29	4.18	4.23	-0.05
	KPM yakin Pemerintah selalu menyediakan bantuan sosial setiap tahunnya	X30	4.18	4.16	0.02
Dimensi Emphaty	Petugas telah melaksanakan tugas sesuai dengan SOP	X31	4.23	4.26	-0.03
	Petugas melibatkan pendamping sosial dalam pelaksanaan pendistribusian kartu combo	X32	4.04	4.12	-0.08
	Petugas telah memahami keinginan KPM	X33	4.09	4.25	-0.16
	Tokoh masyarakat telah dilibatkan dalam program bantuan pangan non tunai melalui e-Warong	X34	4.25	4.21	0.04

Hasil analisis kesenjangan antara kinerja dengan harapan diurutkan dari nilai kesenjangan terbesar untuk mendapatkan penilaian terhadap kinerja pelaksanaan fungsi e-Warong. Nilai kesenjangan terbesar adalah X3 (Bahan pokok yang tersedia di e-Warong) sebesar -0.37, X17 (Mencairkan bantuannya kapan saja dibutuhkan dan tidak perlu mengantri lagi) sebesar -0.32, X27 (Kelancaran transaksi di e-Warong) sebesar -0.30, X4 (Stok bahan pokok yang tersedia di e-Warong) sebesar -0.24, dan X10 (alat transaksi non tunai EDC). Kelima indikator tersebut masuk pada dimensi Tangible, Reliability dan Assurance.

Untuk melihat penempatan indikator kinerja dibanding dengan harapan dilakukan dalam bentuk diagram kartesius. Sumbu mendatar (X)

menunjukkan tingkat kinerja, sedangkan sumbu tegak (Y) merupakan nilai harapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terhadap pelaksanaan fungsi e-Warong. Penempatan posisi tersebut digunakan untuk melihat konsep prioritas, yang digunakan sebagai dasar perbaikan program. Diagram kartesius dapat dilihat dibawah ini.



Gambar 2. Diagram Kartesius

Dari hasil pengolahan instrumen tipe A untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah sebagai berikut:

- 1) Strategi peningkatan pelayanan bantuan pangan non tunai kepada pihak pengelola E Warong untuk dimensi tengibel adalah perlunya sosialisasi e-Warong secara komprehensif kepada seluruh pemangku kepentingan. Kendala dilapangan adalah pemahaman dan pelaksanaan teknis E Warong bervariasi salah satunya dalam pemilihan komoditas pangan. Selain itu disarankan keaktifan petugas dalam pengecekan kualitas bahan pangan yang akan disediakan hal tersebut dimaksudkan sebagai kontrol ketepatan mutu. Rata-rata e-Warong yang menjadi sampel pelaksanaan monev hanya menyediakan 2 bahan pokok yaitu: beras dan gula. Analisa pada dimensi tangible pada indikator ke tiga (3) tentang variasi komoditas bahan pangan pokok yang tersedia di e-Warong, menggunakan metode GAP terdapat kesenjangan sebesar (-0.37) nilai tersebut menandakan bahwa indikator tersebut berada pada kuadran (A) yang menjadi prioritas utama (*underact*).

Pernyataan KPM dari Cirebon bahwa “Beras yang dibagikan (dari Bulog) memiliki kualitas yang kurang bagus, berasnya bau dan berketu. Sebagian beras dari hasil pembagian tersebut saya gunakan untuk pakan ternak (ayam). Sebaliknya kalau kualitasnya berasnya bagus, saya makan sehari-hari”

Pernyataan KPM dari Solo bahwa “Harapan saya kedepannya dapat mencairkan dana bantuan dengan jenis barang lain seperti minyak goreng, mie instan dan tepung.”

Pernyataan KPM dari Salatiga bahwa “Kalau bisa variasi komoditasnya tidak hanya beras dan telur akan tetapi bisa

ditambah dengan variasi yang lain misalnya minyak goreng.”

Dapat disimpulkan bahwa KPM umumnya memahami nilai dan jenis bantuan, namun masih sedikit yang memahami mengenai kebebasan menentukan kuantitas dan kualitas bahan pangan yang sesuai dengan kebutuhan.

Permasalahan lain pada dimensi ini adalah keberlanjutan restock persediaan bahan pangan belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Bahan pangan tersebut tersedia ketika bantuan sosial tersebut cair. Setelah bantuan tersebut selesai disalurkan maka stock bahan pangan di e-Warong tersebut kosong (stock terhenti), praktis kegiatan di e-Warong juga terhenti dengan sendirinya. Sehingga diperlukan upaya nyata dari KMIS dalam manajemen pasokan barang, selama ini pasokan barang pangan hanya terbatas pada pasokan dari Bulog (beras dan gula), belum terhubung dengan KUBe produksi.

- 2) Pada dimensi responsiveness, Kementerian Sosial perlu memberikan pendampingan/ pelatihan/ edukasi kepada pengelola e-Warong dan KPM untuk meningkatkan kapasitasnya sehingga keberadaan e-Warong mampu mendorong mereka untuk menolong diri sendiri dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya. Salah satu kendala dilapangan antara lain pemahaman Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tentang transaksi non tunai masih rendah mengingat sebagian besar KPM memiliki background pendidikan yang homogeny yaitu pendidikan tingkat 1 (SD) dan tingkat 2 (SMP) sehingga perlu pemahaman yang lebih intensif oleh pemangku pelaksana program. Akan tetapi rasa keingintahuan dan kesiapan KPM tentang transaksi non tunai sangat signifikan.

- 3) Pada dimensi reliability, dalam pelaksanaan e-Warong perlu dikawal dengan sistem monitoring dan evaluasi secara rutin terjadwal agar berbagai permasalahan di lapangan mudah terdeteksi dan ditemukan solusinya. Kendala teknis yang dihadapi oleh e-Warong adalah mesin EDC rusak/ macet, ketika EDC macet, pengelola menjalankan transaksi secara tunai dan dicatat sebagai utang yang akan dibayar setelah EDC diperbaiki. Kerusakan EDC ini berakibat pada terganggunya proses transaksi sehingga menimbulkan antrian KPM saat pencairan bantuan.
- 4) Pada dimensi assurance, perlu dampingan petugas pengelola e-Warong terkait dengan kerahasiaan PIN KPM saat bertransaksi. Disamping itu petugas pengelola perlu dibekali sistem complaint and handling yang mudah, cepat, dan responsif. Adapun kendala di lapangan rata-rata responden menuliskan nomor PIN di balik kartu KKS ataupun lupa nomor PIN nya, hal tersebut mengakibatkan terganggunya proses transaksi di e-Warong.
- 5) Pada dimensi empathy, perlu adanya panduan yang ringkas dan tepat kepada petugas pengelola e-Warong. Dengan panduan tersebut diharapkan petugas mampu memainkan tugas dan fungsinya sebagai pengelola e-Warong.
- 6) Secara umum tingkat kepuasan pelaksanaan BPNT di beberapa titik (lokasi sampel) menurut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) cukup tinggi yaitu sebesar 81.37% artinya, sebagian besar responden KPM menyatakan kesiapan mereka untuk menerima perubahan tersebut (non tunai). Kondisi demikian tentu berbeda dengan mekanisme sebelumnya yang mengharuskan mereka untuk mencairkan bansos sekaligus sehingga memberi peluang membelanjakannya pada saat itu juga. “Dana tunai cenderung cepat ludes” tutur KPM di lokasi Makassar.

Dari hasil pengolahan instrumen tipe B untuk Pengelola e-Warong adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan sosialisasi e-Warong yang mencakup semua pemangku kepentingan belum komprehensif. Hal tersebut selain untuk menyeragamkan pemahaman, hal ini juga penting untuk mendapatkan dukungan yang nyata dari mereka sehingga fungsi e-Warong dapat berjalan dengan baik.
- 2) Koperasi perlu memberikan pendampingan/ pelatihan/edukasi kepada pengelola e-Warong, Hal tersebut bertujuan dalam (a) manajemen keberlanjutan restock bahan pangan (*purchase order*) serta (b) pengembangan usaha e-Warong, termasuk bagaimana mereka mengelola margin keuntungan penjualan.
- 3) Rata-rata waktu persiapan pendirian e-Warong sangat singkat antara 1–2 minggu dan pembangunan kios E-Warongnya sendiri berlangsung 2–5 hari sehingga dipandang perlu dalam penyusunan SOP terkait dengan persiapan pendirian e-Warong
- 4) Tidak adanya konsistensi antara Pemensos 25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha (BPSU) pada pasal 3 *fungsi e-Warong menjual bahan pangan murah berkualitas dan bahan kebutuhan pokok rumah tangga*, sedangkan pada pedoman pelaksanaan BPNT hanya dua (2) bahan pokok yaitu beras dan telur, hal tersebut berakibat terhadap variasinya kebutuhan bahan pangan yang disediakan di masing-masing e-Warong.
- 5) Koperasi perlu merumuskan mekanisme pengadaan barang yang mudah dan cepat dari pemasok (non-Bulog) ke e-Warong dengan berbasis on line.
- 6) Pelayanan dalam penyaluran e-Warong dapat dikembangkan dengan layanan antar bagi KPM lanjut usia, disabilitas dan KPM yang akses lokasi tempat tinggalnya sulit dijangkau (jauh).

- 7) Perlu membuat mekanisme/SOP untuk pencatatan transaksi yang menggunakan sistem offline.
- 8) Program subsidi listrik agar dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam pengelolaan e-Warong dengan demikian mampu menekan pengeluaran untuk modal kerja sehingga dapat dialihkan untuk menambah modal usaha.
- 9) Diperlukan surat edaran/perdirjen dari Kementerian Sosial dalam hal penunjukan distributor bahan pangan selain bulog.
- 10) Dalam hal verifikasi data KPM yang dilakukan oleh pendamping Program BPNT (TKSK), pelaksanaannya mampu memaksimalkan peran relawan sosial yang ada, hal tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas performa kinerjanya. Dalam koordinasi ke atas (kabupaten) perlu melakukan rekrutment Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS).

Dari hasil pengolahan instrumen tipe C untuk Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya koordinasi antarpemangku kepentingan di tingkat daerah atau informasi lebih lanjut mengenai kelanjutan operasional e-Warong.
- 2) Dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program BPNT, Dinas Sosial perlu melaksanakan pembinaan secara intensif terhadap relawan sosial yang ada di wilayahnya dalam hal ini pelaksanaan verifikasi data KPM bersama TKSK. Dalam praktiknya jumlah "RASIO" TKSK tidak seimbang dengan jumlah KPM Penerima Bantuan BPNT, Dilihat "kedudukan" nya TKSK di lingkup Kecamatan sedangkan KPM berada di lingkup lingkungan terkecil RT/RW. Sehingga dalam pelaksanaannya perlu didukung dengan memaksimalkan peran relawan sosial yang ada. Sesuai amanat UU 23/2014 bahwa kewenangan Dinas Kabupaten/Kota adalah pengembangan

potensi sumber kesejahteraan sosial (relawan sosial termasuk didalamnya)

- 3) Memaksimalkan peran kelembagaan di tingkat kabupaten/kota (SLRT) dan kelembagaan di tingkat kelurahan/desa (PUSKESSOS) dalam mendukung pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas dan Efisiensi Program
 - a. Dari aspek sasaran penerima manfaat dapat disimpulkan, bahwa secara umum tingkat kepuasan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program BPNT terhadap fungsi e-Warong sudah tinggi (81,37%), tetapi dalam hal musyawarah penentuan KPM pengganti belum melibatkan seluruh pihak.
 - b. Dari aspek bahan dapat disimpulkan, bahwa fungsi e-Warong masih belum optimal dalam pengelolaan persediaan komoditi bahan pangan (beras dan telur).
 - c. Dari aspek sarana dan prasarana dapat disimpulkan, bahwa sarana dan prasarana e-Warong, seperti: 1) jumlah EDC yang masih minim per warung, sehingga berakibat terjadinya antrian cukup panjang; 2) jaringan internet masih belum optimal; 3) Lemari pendingin belum berfungsi maksimal; 4) Bangunan yang dijadikan kios belum memadai, sehingga berakibat terbatasnya ruang penyimpanan bahan pangan; 5) papan nama yang belum sesuai ekspektasi.
 - d. Dari aspek metode bisnis proses pelaksanaan e-Warong dapat disimpulkan, bahwa baik KPM, pengelola E-Warong, pendamping, maupun pembina (Dinas Sosial Kabupaten/Kota) belum memahami

- proses bisnis dan SOP penyaluran BPNT melalui e-Warong secara komprehensif.
- e. Dari aspek besarnya bantuan yang diterima KPM dapat disimpulkan, bahwa KPM merasa puas karena dapat membeli bahan pangan dengan kualitas yang cukup untuk dikonsumsi, umumnya KPM sudah memahami nilai dan jenis bantuan, namun masih sedikit yang memahami mengenai kebebasan menentukan kuantitas dan kualitas bahan pangan yang sesuai dengan kebutuhan.
 - f. Dari aspek pemasaran dapat disimpulkan, bahwa dikarenakan pemahaman bisnis proses dan *market analysis* yang belum komprehensif baik dari pengelola e-Warong, pendamping maupun Dinas Sosial, maka *market share* masih terbatas di lingkungan KPM, tetapi masih potensial untuk diperluas.
2. Bisnis Proses program e-Warong dalam penyaluran BPNT 2017
- a. Kesiapan dan keingintahuan KPM tentang transaksi non tunai sangat signifikan, tetapi pemahaman dan informasi yang didapat oleh KPM masih rendah terhadap konsep transaksi non tunai serta pengelolaan e-Warong secara komprehensif.
 - b. KPM pengelola e-Warong, masih memerlukan sosialisasi dan edukasi terhadap pengelolaannya, terutama pengelolaan modal usaha, purchase order, dan hal operasional e-Warong lainnya.
 - c. Ketersediaan bahan pangan ada pada saat bantuan sosial disalurkan, tetapi setelah selesai penyaluran maka kegiatan transaksi di mayoritas lokasi pemantauan dan evaluasi e-Warong pun praktis berhenti.
 - d. Bahan pangan yang ditransaksikan secara non tunai pada e-Warong masih belum konsisten dengan pedoman pelaksanaan, serta pengelola e-Warong belum siap dalam penjaminan kualitas bahan pangan.
3. Pendampingan Program e-Warong
- a. Dinas Sosial belum memantau pelaksanaan program e-Warong secara komprehensif, tetapi peran Dinas Sosial secara umum sudah baik dalam proses penyelesaian masalah administratif e-Warong.
 - b. Dinas Sosial belum memberikan pemahaman yang cukup kepada KPM tentang e-Warong.
4. Faktor-Faktor Kendala Program e-Warong
- a. Kemitraan (jejaring kerja) yang belum terbangun secara baik khususnya distributor bahan pangan, sehingga apabila *dropping* bahan pangan yang ternyata kualitasnya kurang baik, belum dapat diatasi oleh pengelola e-Warong.
 - b. Pemahaman dan informasi yang masih rendah terhadap konsep program e-Warong secara komprehensif.
 - c. Struktur Organisasi Pengelola e-Warong yang belum berjalan dengan baik.
 - d. Pengelola e-Warong belum memahami mekanisme pengaduan saldo nol, lupa PIN, kartu kombo hilang, kartu rusak dan hal-hal terkait operasional lainnya.
- Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan umum bahwa, program e-Warong sudah cukup progresif, cukup efektif, efisien dan potensial dalam memberdayakan Keluarga Penerima Manfaat (*beneficiaries*) secara berkelanjutan.
- SARAN**
- Berdasarkan hasil di atas, dapat diberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:
1. Rekomendasi Kebijakan
 - a. Konsistensi dan komitmen antara Pemensos No.25 Tahun 2016 tentang

BPSU dengan pedoman pelaksanaan BPNT terkait penyediaan komoditas bahan pangan murah berkualitas dan kebutuhan pokok rumah tangga yang ditransaksikan.

- b. Terkait lokasi pemilihan e-Warong, sesuai aturannya, apabila lokasi pendirian e-Warong didirikan di rumah bukan milik KPM, maka penanggungjawab program harus memastikan Surat Pernyataan bermaterai cukup dibuat oleh pemilik rumah yang dijadikan lokasi e-Warong.
- c. Peran koperasi yang belum optimal, maka disarankan untuk membuat SOP dalam proses *Purchase Order*(PO) agar menjamin keberlangsungan ketersediaan stok bahan pangan di E-Warong.
- d. Perlu adanya SOP tentang mekanisme penggantian KPM, serta mekanisme *complain handling*.
- e. Mengingat rasio TKSK yang belum efektif sebagai pendamping KPM BPNT Non PKH, maka disarankan untuk memaksimalkan peran relawan sosial yang ada di wilayah desa dibawah koordinasi TKSK, serta TKSK tersebut terkoordinasi oleh koordinator TKS di wilayah kabupaten/kota.
- f. Perlu adanya monitoring dan evaluasi secara konsisten periodik dari berbagai unsur yang berkepentingan dalam pelaksanaan penyaluran program BPNT melalui e-Warong, sehingga dapat dipastikan pelaksanaan program berjalan dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku.
- g. Perlu melakukan edukasi dan sosialisasi secara intensif terhadap mekanisme pelaksanaan e-Warong dan penyaluran BPNT dalam e-Warong kepada KPM dan mitra kerja, sehingga meminimalisir terjadinya hambatan penyaluran dan perputaran modal dalam e-Warong.
- h. Perlu memberikan pendampingan

kepada para pengelola dan penyelia Program e-Warong dalam mekanisme pelaksanaan program secara komprehensif.

- i. Perlu dibentuk beberapa Tim Ahli Program seperti: Tim *Complain Handling*, Tim Pemantauan dan Evaluasi, Tim Manajemen Pengelolaan Data Program e-Warong di level Kementerian Sosial, guna memfasilitasi dan memperbaiki seluruh permasalahan pelaksanaan program secara lengkap.

2. Rekomendasi Operasional

- a. Guna menunjang efisiensi dan komplementaritas program, maka direkomendasikan agar alokasi pembelian modal kerja berupa instalasi listrik 900 Watt dapat diintegrasikan dengan program subsidi listrik Kementerian ESDM, mengingat sasaran subsidi listrik adalah 40% masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah, sehingga alokasi dana bansos untuk instalasi listrik dapat dialokasikan untuk modal kerja lain yang diperlukan dan atau menambah modal usaha e-Warong.
- b. Dalam hal proses transaksi, pendamping BPNT perlu proaktif dalam pengawasan (pencatatan/pembukuan transaksi), serta harus memberikan pengetahuan cukup kepada KPM yang berkaitan dengan rekening KPM seperti: PIN dan saldo bantuan.
- c. Jaringan internet masih menjadi kendala yang mengakibatkan terganggunya proses transaksi pada mesin EDC berbasis android, sehingga keberadaan EDC offline sangat dibutuhkan.
- d. Perlu memberikan pelatihan guna meningkatkan kapasitas pengelola E Warong, dikarenakan masih minimnya kemampuan dan pengetahuan mayoritas pengelola e-Warong dalam penggunaan mesin EDC, pengelola hanya mengetahui

proses penggesekan kartu di mesin EDC tapi tidak memahami proses pencatatan transaksi dan SOP *troubleshooting* mesin EDC.

- e. Pengadaan modal kerja E-Warongsesuai prioritas atas dasar urgensi kebutuhannya. Pada beberapa titik lokasi e-Warong yang dijadikan sampel pada kegiatan pemantauan dan evaluasi, modal kerja seperti lemari pendingin dan printer bluetooth belum difungsikan. Pembelian lemari pendingin belum difungsikan karena adanya *inconcistency* antara modal kerja yang dibeli dengan bahan pangan yang disediakan. *Printer bluetooth* belum dimanfaatkan karena minimnya edukasi proses penggunaannya.
- f. Perlu pemahaman tentang penerapan modal kerja yang diatur dalam Permensos No.25 Tahun 2016 tentang BPSU mengingat masih terdapat fasilitas listrik di beberapa lokasi e-Warong yang masih menumpang kepada pemilik rumah.
- g. Secara organisasional sudah terbentuk strukturnya, akan tetapi belum ada pembagian tugas dan fungsi untuk masing-masing petugas pengelola e-Warong. Sehingga kedepan diperlukan pemahaman terkait dengan pembagian keuntungan, kepengurusan pertemuan, pembagian sistem kerja, piket serta jam buka e-Warong.
- h. Perlu menjalin kemitraan antara pengelola E Warong dengan distributor pangan selain BULOG.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada tim pemantauan dan evaluasi Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, Biro Perencanaan Kemensos serta Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan

Sosial yang telah membantu menelaah naskah penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*, edisi revisi 2010. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azwar, S. (1986). *Reliabilitas dan validitas Interpretasi dan Komputasi*. Yogyakarta: Liberty.
- Cochran, W, G. (1977). *Sampling Technique Third Edition*. United States of America: John Wiley & Sons Inc.
- Field, A. (2006). *Discovering Statistics using SPSS, Second Edition*. California: SAGE Publication.
- Fraenkel, J. & W, N. (1993). *How to Design and evaluate research in education Second Edition*. New York: McGraw-Hill Inc.
- Gay, L, R. dan Diehl, P.L. (1992), *Research Methods for Business and. Management*. New York: MacMillan Publishing Company.
- Hadi, S. (1984). *Metodologi Research*. Yogyakarta: Penerbit Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada.
- Hair, J.F., W.C. Black, B.J. Babin, R.E. Anderson, R.L.Tatham, (2006). *Multivariate Data Analysis, The Sixth Edition*. New Jersey: Prentice Hall.
- Hasibuan, M, S.P. (1994). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Midas Surya Grafindo.
- Karlingger, F, N. (1987). *Asas-Asas Penelitian Behavioral*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada

- Kementerian Sosial RI. (2016). Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan. Jakarta: Kementerian Sosial.
- Lohr, S, L. (1999). Sampling: Design and Analysis. California: Duxbury Press.
- M. Sulton Mawardi, Ruhmaniyati, Tamyis, A.R., Usman, S, Kurniawan, A., Budiani (2017). Kajian Awal Pelaksanaan Program e-Warong Kube-PKH. Jakarta, Indonesia: The SMERU Research Institute bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK).
- Nazir.(1990). Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Parasuraman, A Zeithaml, Valerie A dan L Berry. (1990). Delivering Quality Service: Balancing Customer Perception and Expectations. New York: The Free Press A Division of Mac Millan inc.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia.(2015). Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta.
- Tim BPNT Pusat. (2017). Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2017.
- Uyanto, Stanislaus S. (2009). Pedoman Analisis Data Dengan SPSS. Yogyakarta: Griya Ilmu.

**KEBERFUNGSIAN SOSIAL LANJUT USIA
DI PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA MINAULA DI KOTA KENDARI**

***SOCIAL FUNCTIONING OF OLDER PEOPLE
AT PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA MINAULA IN KENDARI CITY***

Syamsuddin

Panti Sosial Tresna Werdha Minaula Kendari
Jl. Poros Bandara Haluoleo, Ranomeeto, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Indonesia
Email: syamsuddindingido@yahoo.co.id

Kanya Eka Santi

Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI
Jl. Salemba Raya No 28, Jakarta Pusat, Indonesia

La Alimuddin

Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fisipol, Universitas Cendrawasih Jayapura
RDHA Minaul Jl. Camp Walker, Yabansai Waena, Jayapura, Papua, Indonesia

Diterima: 18 April 2018; Direvisi: 5 Juli 2018; Disetujui: 8 Agustus 2018

Abstrak

Populasi lansia di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini adalah hasil dari pembangunan bidang kesehatan. Sayangnya, Sebagian lansia dengan kondisi miskin dan terlantar mengalami hambatan dalam melaksanakan keberfungsian sosialnya. Intervensi psikososial oleh pekerja sosial pada lanjut usia (lansia) yang mendapatkan rehabilitasi sosial di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Minaula Kendari diharapkan dapat mengembangkan keberfungsian sosial para lansia. Kajian ini bertujuan untuk mendokumentasikan implementasi perspektif kekuatan dalam upaya meningkatkan keberfungsian sosial lansia di PSTW Minaula Kendari. Kajian deksriptif kualitatif ini melibatkan 11 orang informan lansia penerima manfaat PSTW Minaula kendari serta dua pekerja sosial dan satu pembimbing keterampilan. Data dikumpulkan menggunakan metode wawancara mendalam, pengamatan berpartisipasi dan studi dokumentasi. Data dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa dengan menerapkan perspektif kekuatan kepada lansia, terdapat beberapa bentuk keberfungsian sosial pada lansia di PSTW Minaula yakni keberfungsian dalam aspek pelestarian budaya, transfer pengetahuan (pendidik), spiritual dan keberfungsian dalam aspek transfer nilai-nilai moral kehidupan kepada generasi muda. Peran-peran yang dijalankan oleh lansia ini memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dalam rangka mencerdaskan generasi muda bukan saja secara intelektual tapi juga sosial sebagai satu tujuan berbangsa dan bernegara. Para lansia juga telah berkontribusi untuk melestarikan nilai-nilai luhur dalam satu masyarakat khususnya masyarakat Kendari.

Kata Kunci: *keberfungsian sosial, lansia, pekerja sosial.*

Abstract

The Indonesian's older people population continues to growth every year. This rising is a direct result of success in health.. Unfortunately, some poor and neglected older persons have difficulty to do their social functioning. Psychosocial intervention provided by social worker for older people as beneficiaries of Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) or Retirement home "Minaula" Kendari is expected to enable improvements their social functioning. This study aims to documenting the enhancement of older people's social functioning. This descriptive qualitative study involved 11 informants as beneficiaries of PSTW Minaula Kendari, two informants as social workers, and one informant as vocational guidance. Data was collected using in-depth

interview, participant observation, and study of documentation. Then, data was analyzed using qualitative analysis. The findings show, by implementing of strength perspective, there are several social functioning achievements by older people in PSTW Minaula Kendari regarding maintenance of culture, transfer of knowledge, spiritual role, and transferring of moral values to youth. The roles performed by the elderly have contributed positively to society in order to educate the young generation not only intellectually but also socially as one of the goals of nation and state. The elderly have also contributed to preserve the noble values of society, especially the people of Kendari.

Keywords: *older people, social functioning, social worker.*

PENDAHULUAN

Komposisi penduduk lanjut usia (lansia) meningkat dengan pesat baik di negara maju maupun negara berkembang. Secara global populasi lansia diprediksi terus mengalami peningkatan. Badan Pusat Statistik mencatat populasi lansia tahun 2010 sebesar 18,1 juta dan mengalami peningkatan di tahun 2015, menjadi 22.041.000 jiwa serta diprediksi jumlah penduduk lansia tahun 2030 adalah 40,95 juta dan tahun 2035 sebesar 48,19 juta jiwa. Sejak tahun 2015, Asia dan Indonesia sudah memasuki era penduduk menua (*ageing population*) karena jumlah penduduk yang berusia 60 tahun ke atas melebihi angka tujuh persen.

Secara umum situasi tersebut terjadi akibat penurunan angka kelahiran (*fertility*) dan kematian (*mortality*), serta peningkatan angka harapan hidup (*life expectancy*), yang mengubah struktur penduduk secara keseluruhan. Proses terjadinya peningkatan angka harapan hidup juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti peningkatan gizi, perbaikan sanitasi, pelayanan kesehatan yang lebih aksesibel, hingga kemajuan tingkat pendidikan dan sosial ekonomi yang semakin baik (Pusat Data dan Informasi, Kementerian Kesehatan, 2017)

Sisi tersebut menunjukkan keberhasilan pembangunan terutama pembangunan bidang kesehatan. Disisi lain, tanpa dukungan kebijakan pemerintah yang memihak lansia, perhatian keluarga dan lingkungan sosial yang ramah

lansia maka tingginya populasi lansia dapat menimbulkan masalah-masalah baik lansia itu sendiri maupun keluarga dan masyarakat. Jika lansia menurun kualitas kesehatannya tentu akan berdampak pada peningkatan biaya perawatan, penurunan pendapatan/penghasilan dan resiko disabilitas. Jika lansia banyak yang disfungsi sosial maka bertambah berat beban keluarga (Sale, 2003). Pada tahun 2015, rasio ketergantungan lansia Indonesia yakni 13,28. Hal ini bermakna bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung sekitar 14 orang lansia (Pusat Data dan Informasi, Kementerian Kesehatan, 2017).

Beberapa masalah yang dialami lansia pada umumnya adalah penurunan fungsi kognitif, penurunan kemampuan fungsional dan kemandirian (ketergantungan untuk rawat diri; seperti mandi, toilet, makan, berpakaian, berpindah tempat, buang air besar dan kecil) dan tergantung secara instrumental (seperti, berbelanja, memasak, membersihkan rumah, transportasi, komunikasi, dan lain-lain), disabilitas, kekerasan, depresi, dimensia, gangguan konsep diri, rasa kesepian dan kesendirian serta masalah pada tingkat yang lebih makro yakni kemiskinan, keterlantaran (Tamhaer & Noorkasiani, 2008).

Masalah-masalah tersebut kedepan menjadi semakin kompleks karena beberapa faktor seperti 1) perubahan struktur keluarga dari keluarga besar menjadi keluarga inti, 2) melemahnya sistem kekerabatan sosial, dan 3) pergeseran

peran gender, dimana peran perempuan ke sektor publik berdampak pada berkurangnya bahkan hilangnya peran keperawatan di dalam rumah terutama pada lansia. Faktor-faktor tersebut semakin menurunkan tanggungjawab keluarga dan masyarakat dalam memberikan perawatan dan perlindungan kepada lansia. Kondisinya akan semakin parah bagi para lansia yang sudah tidak memiliki keluarga atau kerabat yang dapat memberikan perawatan (Suheli, 2016).

Data Susenas tahun 2015 menunjukkan bahwa dari 22,04 juta lansia Indonesia, 9,59% atau sekitar 2,1 juta masuk kategori terlantar dan 23,01% dengan kategori hampir telantar (Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial & Badan Pusat Statistik, 2016). Kemiskinan dan keterlantaran adalah aspek yang membuat lansia tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya secara optimal (Direktorat Pelayanan Sosial Lanjut Usia, Kementerian Sosial, 2011). Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial No. 8 Tahun 2012, lansia dengan kondisi tersebut dikategorikan sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan berhak mendapatkan dukungan agar dapat berfungsi sosial kembali.

Dukungan Kementerian Sosial dilakukan melalui program rehabilitasi sosial baik berbasis keluarga dan komunitas maupun berbasis instutusi. Tujuan dari rehabilitasi sosial lansia adalah untuk memulihkan dan mengembangkan keberfungsian sosial mereka. Berbagai pendekatan dilakukan untuk program rehabilitasi sosial agar lansia tersebut dapat menjalankan peran-peran sosialnya dan dapat berkontribusi dalam masyarakat (Kementerian Sosial, 2015).

Meskipun sistem panti merupakan alternatif terakhir untuk membantu lansia guna mengembalikan keberfungsian sosial lansia

yang masuk kategori miskin dan terlantar, namun, masih banyak lansia terlantar yang akhirnya terpaksa harus mendapatkan pelayanan di panti karena ketiadaan keluarga (Crawford & Walker, 2008). Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Minaula Kendari, merupakan panti rehabilitasi sosial yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengembalikan dan meningkatkan fungsi sosial lansia. Proses rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di PSTW Minaula Kendari tercermin dalam berbagai program seperti bimbingan psikososial, bimbingan spiritual, bimbingan fisik dan kesehatan serta bimbingan keterampilan.

Tamhaer dan Noorkasiani (2008) menjelaskan, banyak lansia dapat hidup penuh makna dan mandiri namun pada saat yang sama ada juga yang mengalami keterlantaran. Bahkan beberapa diantaranya mengalami gangguan dan kendala secara psikomotorik dan kognitif sehingga membutuhkan program rehabilitasi guna mengatasi masalah terkait pelaksanaan aktivitas harian. Shah dan Tank (2008), menyebut rehabilitasi buat lansia lebih difokuskan kepada peningkatan kualitas hidup dan bukan selalu berarti untuk mengembalikan kemampuan seperti semula karena adanya faktor degeneratif yang terjadi secara alamiah.

Beberapa studi menjelaskan tentang buruknya sistem pelayanan panti serta minimnya upaya untuk pengembangan potensi dan keberfungsian sosial lansia. Rohmah, Purwaningsih dan Bariyah (2012) dalam sebuah kajiannya menemukan bahwa rendahnya kualitas hidup lansia yang tinggal di panti werdha salah satunya karena kurangnya aktivtias sosial yang diberikan kepada mereka. Kajian lain yang dijalankan oleh Julianti (2013) menjelaskan bagaimana panti menciptakan eksklusi sosial dengan membatasi lansia dalam akses pelayanan kesehatan, dan hambatan mobilisasi yang membuat hak

korespondensi atau komunikasi lansia dengan pihak di luar menjadi terkendala. Termasuk hambatan bagi lansia dalam berpartisipasi secara ekonomi bahkan sampai pada tindakan perlakuan salah, stereotipe, diskriminasi dan kekerasan pada lansia. Bahkan sebuah kajian di Amerika Serikat yang dilakukan oleh Degenholtz, Resnick, Bulger dan Chia (2014) menemukan bahwa para lansia warga rumah perawatan (*nursing home*) memandang rendah kualitas hidup mereka, dengan indikasi bahwa mereka merasa tidak pernah diberikan kemudahan untuk membangun persahabatan sebagai satu aspek keberfungsian sosial lansia.

Oleh karena itu PSTW Minaula Kendari mengembangkan pendekatan yang dapat meningkatkan sistem pelayanan institusi yang memberikan perhatian pada potensi dan kekuatan penerima manfaatnya. Panti dengan segala fasilitas dan sumber daya manusia seperti pekerja sosial, perawat, psikolog memungkinkan para lansia untuk menggali dan mengembangkan potensi dan minat yang dimiliki untuk meningkatkan keberfungsian sosialnya. Ditambah dengan kemampuan pekerja sosial dan semua unsur pelayanan mengimplementasikan perspektif kekuatan, Minaula bekerja untuk mengedepankan kepentingan terbaik lansia terlantar dalam mencapai keberfungsian sosialnya.

Menurut Barker (1987) keberfungsian sosial dipandang sebagai kemampuan seseorang dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Oleh karena itu tugas pekerja sosial terhadap lansia adalah meningkatkan kemampuan mereka untuk menjalankan fungsi sosialnya melalui penggalan sumber, meningkatkan harmoni sosial dan menciptakan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang bagi klien (Dubois & Miley, 1992). Pekerja sosial menggunakan perspektif kekuatan untuk bekerja

bersama individu lansia dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip bahwa individu memiliki kompetensi; sumber-sumber; mampu mempelajari keterampilan baru dan menangani masalah terkait dirinya, dapat menggunakan kompetensinya untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah mereka sendiri dan dapat terlibat dalam proses *healing* atau *self-healing* (Ponnuswami, Francis, Udhayakumar, 2018).

Meskipun lansia telah mengalami kemunduran dari berbagai aspek, bukan berarti mereka kehilangan kesempatan dan kemampuan untuk menjalankan peran dan fungsi sosialnya. Sebagai warga senior mereka memiliki pengalaman hidup, ilmu dan keterampilan serta nilai-nilai kebajikan yang dapat disumbangkan kepada masyarakat terutama generasi penerus. Demikian pula saat mereka tinggal di panti, para lansia dapat mengisi kesempatan hidup mereka dengan hal-hal yang produktif. Sepanjang paradigma dan pola pelayanan panti mendukung pengembangan aspek positif lansia. Apabila panti tersebut menganut pemahaman profesional, memahami hak dan kebutuhan lansia secara komprehensif serta menerapkan prinsip, metode dan nilai-nilai pekerjaan sosial profesional maka lansia akan mendapatkan kesempatan luas untuk berkembang dan berkontribusi terhadap masyarakat (Crawford & Walker, 2008).

Penelitian tentang keberfungsian sosial lansia di panti, khususnya dalam kaitannya dengan perspektif kekuatan belum banyak ditulis para peneliti Indonesia. Muthia, Krisnani dan Meilany (2016) mengkaji tentang peranan pekerja sosial dalam meningkatkan keberfungsian sosial di PSTW Budi Darma Bekasi. Kajian ini lebih fokus pada peranan dan metode pekerja sosial dalam meningkatkan keberfungsian sosial lansia di panti.

Jariatun (2015) meneliti tentang aspek-

aspek yang membuat lansia tidak dapat menjalankan keberfungsian sosialnya di PSTW Budhi Darma Yogyakarta. Jariatun melihat masalah keberfungsian sosial lansia dari sembilan aspek yakni kesibukan lansia, sumber keuangan, kegiatan lansia, pandangan lansia terhadap panti, hubungan lansia dengan orang lain, hubungan lansia dengan keluarga, ketergantungan lansia, hobi lansia dan kondisi fisiknya.

Sementara kajian lintas negara yang membahas tentang keberfungsian sosial lansia dilakukan diantaranya oleh Graham, Arthur, dan Howard (2002). Ini adalah studi kuantitatif, dengan menggunakan skala *Mini Mental State Examination* (MMSE) dan skala keberfungsian sosial mencoba membandingkan tiga kelompok lansia, masing-masing kelompok lansia yang tidak memiliki morbiditas psikiatrik, kelompok lansia yang mengalami depresi dan kelompok lansia dengan skizofrenia. Ketiga kelompok lansia tersebut tinggal dalam komunitas dan bukan dalam panti. Hasilnya menunjukkan bahwa lansia yang tanpa gangguan psikiatrik kurang mengalami isolasi dari masyarakat, memiliki banyak aktivitas pengisian waktu luang dan kurang melakukan kontak dengan pelayanan komunitas profesional. Sementara lansia dengan skizoprenia lebih terisolasi dan kurang memiliki aktivitas pengisian waktu luang dibandingkan dengan lansia yang didiagnosa depresi.

Berat, Neškoviü-Konstantinoviü, Nedoviü, Rapaiü, dan Marinkoviü, (2015), melakukan kajian tentang keberfungsian sosial pada lansia yang menderita penyakit kronis atau penyakit parah. Mereka melakukan kajiannya menggunakan angket sosio-demografik dan wawancara kepada dua kelompok lansia yakni 49 lansia yang yang menjalani perawatan kemoterapi paska operasi dengan lansia yang mengidap kanker stadium lanjut dan menjalani

perawatan kemoterapi sistematis. Kajian ini menemukan bahwa kelompok lansia dengan kondisi lebih sehat hidup bersama dalam satu rumah, sementara kelompok lansia dengan kondisi sakit parah kebanyakan hidup terpisah dengan keluarganya. Meskipun demikian, kedua kelompok lansia tersebut kebanyakan diasuh oleh anak-anaknya. Kedua kelompok pasien pada fase awal pengobatan lebih sering dikunjungi oleh kerabatnya dibandingkan dengan lansia yang lebih sehat.

Sebuah kajian literatur dilakukan Meesters, Stek, Comijs, Haan, Patterson, Eikelenboom dan Beekman (2010), mengenai keberfungsian sosial lansia dengan skizofrenia yang tinggal secara mandiri di komunitas. Sebanyak 36 artikel dikaji untuk menemukan bukti-bukti mengenai keberfungsian sosial pada lansia dengan skizofrenia. Keberfungsian sosialnya fokus pada peran sosial, dukungan sosial, dan keterampilan sosial. Hasilnya menunjukkan bahwa lansia dengan skizofrenia benar-benar mengalami kemunduran kesehatan dikaitkan dengan keberfungsian sosial. Ada persamaan kondisi diantara pasien dan kemampuan kognitif adalah hal yang paling berpengaruh pada keberfungsian sosial mereka.

Ponnuswami, Francis dan Udhayakumar (2012), menulis tentang pendekatan kekuatan untuk praktik pekerjaan sosial dengan lansia. Tulisannya menegaskan bahwa saat bekerja dengan lansia, pendekatan kekuatan sangat berguna dengan memandang bahwa kebanyakan lansia memiliki pengetahuan, kebijaksanaan dan serangkaian keterampilan. Karenanya, pendekatan ini dapat menggeser pendekatan profesional yang hanya bertumpu pada pandangan lansia sebagai beban dan selalu tergantung. Para pekerja sosial diharapkan akan lebih efektif saat bekerja menggunakan pendekatan kekuatan dari pada model penanganan yang paternalistik.

Keterbatasan penelitian serta tulisan tentang pendekatan kekuatan untuk bekerja dengan lansia, serta keterlibatan penulis dalam seluruh kegiatan lansia di Minaula, menginspirasi penulis untuk melakukan kajian ini. Jika kajian-kajian sebelumnya fokus pada aspek-aspek seperti peranan pekerja sosial dalam keberfungsian sosial, aspek aspek yang menyebabkan lansia tidak dapat menjalankan keberfungsian sosialnya dan kaitan lansia dengan kondisi mentalnya. Maka kajian ini lebih menekankan pada keberfungsian sosial lansia yang tinggal di dalam panti dan bagaimana keberfungsian tersebut menguat karena para pekerja sosial dan seluruh komponen yang bertugas menerapkan perspektif kekuatan. Kajian ini menjelaskan tentang kehidupan lansia yang tinggal di dalam panti dengan menggunakan pespektif kekuatan. Sekalipun lansia itu telah mengalami kemunduran baik fisik, sosial maupun intelektual akan tetapi jika difasilitasi, mereka masih mampu mengembangkan dan memaksimalkan potensi mereka untuk berkontribusi bagi masyarakat.

Oleh karena itu kajian ini bertujuan mendokumentasikan penerapan perspektif kekuatan dan keberfungsian sosial lansia di PSTW Minaula Kendari. Keberfungsian sosial tersebut secara lebih spesifik difokuskan kepada kemampuan lansia dalam menjalankan peran-peran sosial dan kontribusi positif kepada masyarakat.

METODE

Kajian ini adalah kajian deskriptif kualitatif dengan melibatkan 11 informan yang merupakan lansia penerima manfaat (PM) PSTW Minaula Kendari. Dengan kriteria umur minimal 60 tahun, tinggal di PSTW, dapat berkomunikasi secara verbal dan bersedia menjadi informan. Selain informan lansia, data juga diperoleh dari para pekerja sosial dan

pembimbing keterampilan. Data dikumpulkan dengan metode wawancara, observasi partisipasi dan studi dokumentasi. Pertanyaan yang diajukan dalam wawancara terkait dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh PM di panti yang menunjukkan kemampuan mereka menjalankan keberfungsian sosialnya. Sementara data dokumentasi yang digali adalah seperti data usia, lama tinggal dan catatan-catatan perkembangan informan sebagai PM. Hasil wawancara yang dalam bentuk audio kemudian ditranskrip dalam bentuk teks. Lalu dianalisis secara sistematis yang kemudian memunculkan tema-tema yang sesuai dengan tujuan penelitian (Robert, 2011)

Penelitian ini melibatkan 11 orang lansia yang berumur antara 62-75 tahun, lima laki laki dan lima perempuan, dengan lama tinggal di panti berkisar antara tiga bulan hingga 10 tahun. Adapun alasan mereka masuk panti umumnya karena faktor kemiskinan dan keterlantaran, sementara faktor lain karena eksploitasi dan kekerasan ekonomi. Selain melibatkan lansia sebagai penerima manfaat program reguler PSTW Minaula juga melibatkan tiga orang pekerja sosial dan satu orang pembimbing keterampilan.

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

PSTW Minaula Kendari adalah salah satu unit Pelaksanan Teknis yang berada dibawah naungan Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, Kementerian Sosial RI. Panti ini berlokasi di Jalan Bandara Haluoleo, Ranomeeto, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. PSTW Minaula Kendari berdiri sejak tahun 1981. Panti ini melayani sekitar 420 PM dengan jangkauan pelayanan meliputi enam Provinsi masing-masing, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku utara dan Papua Barat.

Terdapat enam program atau model rehabilitasi sosial lansia yang diselenggarakan oleh PSTW Minaula Kendari. Program tersebut meliputi, program reguler (95 PM), program *day care* (50 PM), Program kedaruratan lansia (50 PM), Program *Home care* (50 PM), Program *family support* (25 PM) dan Program usaha ekonomi produktif lansia (150 PM). Sehingga dalam setiap tahunnya PSTW Minaula Kendari memberikan rehabilitasi sosial kepada 420 lansia setiap tahunnya. Jika PM reguler mendapatkan pelayanan sepanjang hidup jika tidak diambil oleh keluarganya, maka PM penerima program lainnya mendapatkan pelayanan bersifat tahunan.

PSTW Minaula Kendari didukung dengan sarana dan prasarana penunjang yang cukup memadai seperti Aula, ruang keterampilan, mesjid, ruang terapi dan konseling, klinik serta kendaraan operasional. Terdapat tenaga-tenaga profesional yang mendukung pelayanan seperti pekerja sosial delapan orang ditambah profesi lain seperti perawat, penyuluh sosial, dan psikolog, pembimbing keterampilan dan psikososial dan tenaga lainnya. Program-program bimbingan dirancang secara rutin dan disesuaikan dengan kebutuhan dan minat PM. PSTW memegang prinsip “kebahagian lansia, dedikasi kami”. Mereka menjadwalkan program bimbingan (agama, psikososial, keterampilan) sebagai ruh dari rehabilitasi sosial lanjut usia.

HASIL PENELITIAN

Hasil kajian penunjukkan bahwa program intervensi sosial dengan menggunakan perspektif kekuatan yang dilakukan oleh PSTW Minaula Kendari telah berhasil mengembalikan keberfungsian sosial lansia. Keberfungsian sosial tersebut bukan saja bermanfaat bagi diri klien tapi juga untuk masyarakat. Para pekerja sosial di PSTW Minaula Kendari memandang bahwa perspektif kekuatan sangat efektif untuk menolong lansia dalam

memulihkan keberfungsian sosial mereka. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh koordinator pekerja sosial, JS (43 tahun), yang telah bekerja dengan lansia sejak 2016;

“Saya memandang bahwa perspektif kekuatan ini sangat positif, biasanya orang akan meningkat harga dirinya jika diberi kesempatan untuk mengaktualisasikan potensinya. Begitu pula lansia jika diberi peluang untuk berekspresi dan difasilitasi maka akan meningkat semangat hidup, harga diri dan kepercayaan dirinya juga bisa pulih. Jangan memandang lansia hanya dari kelemahan atau kemundurannya saja. Pengalaman saya waktu ada lomba karaoke antar PM, banyak lansia yang dengan percaya diri ingin ikut lomba karaoke dan ingin membuktikan bahwa mereka masih mampu berbuat”

Hal Senada dikemukakan oleh AMT (22 tahun), pekerja sosial terampil sejak 2015, yang mengemukakan pengalamannya bekerja dengan lansia bahwa kekuatan lansia bisa digali dari hobi dan minat ketika masih muda.

“Pengalaman saya ketika menangani kasus kakek MHD yang dulu suka murung dan cenderung pendiam, tapi setelah saya gali potensinya ternyata dulu waktu mudanya suka menyanyi dan ketika diberikan kesempatan berekspresi dia semangat kembali. Selain itu mereka juga masih memiliki motivasi berprestasi dan memberikan manfaat bagi orang lain. Karena itu kami sebagai pekerja sosial harus menggali potensi dan minat lansia agar mereka dapat mengisi hari tuanya dengan hal-hal positif yang dapat membantu mereka untuk tetap bahagia di hari tua”.

Keberfungsian sosial pada lansia di PSTW Minaula, dikaji dari beberapa aspek yakni, keberfungsian sosial dalam aspek kebudayaan (pelestarian budaya lulo, pelestarian tikar adat), keberfungsian sosial

dalam aspek transfer pengetahuan (mengajar mengaji, mengajar bahasa inggris, les mata pelajaran umum), keberfungsian dalam aspek spiritual (menyelenggarakan aktivitas mesjid, mengumandangkan adzan, memimpin pembacaan surat yasin, memimpin doa keselamatan bagi para tamu anjangsana), dan keberfungsian dalam mengajarkan nilai-nilai kehidupan.

Keberfungsian Sosial dalam Pelestarian Budaya

Manusia adalah makhluk kebudayaan. Mereka menciptakan kebudayaan sebagai satu kebutuhan asas manusia. Kebudayaan positif akan terus dipelihara sebagai satu identitas kebangsaan. Lansia di PSTW Minaula Kendari dapat dipandang sebagai agen pelestari kebudayaan. Keberfungsian sosial lansia dalam pelestarian budaya ditunjukkan dengan peran mereka dalam menjaga keaslian dan nilai-nilai tari *Lulo* dan tikar adat Suku *Tolaki*.

Menjaga Keaslian dan Nilai-nilai Tarian Lulo

Tari *Lulo* ini telah wujud sejak lama dan sampai sekarang tetap eksis sebagai tari pergaulan dan ungkapan syukur masyarakat tolaki yang berdiam disekitar wilayah kendari dan sekitarnya. Umumnya lansia di PSTW minaula kendari, terutama yang berasal dari etnis tolaki, aktif memainkan tari lulo minimal sekali seminggu. Bahkan jika ada tamu-tamu dan kunjungan mereka sering tampil dan mempersembahkan tarian tersebut. Para lansia umumnya telah menguasai tarian lulo sejak mereka muda, sebagian lagi belajar tari lulo setelah di dalam panti yang diajarkan oleh sesama lansia tapi kegiatannya difasilitasi oleh para pekerja sosial.

Para lansia di Minaula, bukan saja melakoni tarian kolosal ini, tapi juga merawat norma dan nilai-nilai yang terkandung

di dalamnya. Tarian ini sejatinya sarat dengan aturan-aturan guna menjaga martabat dan kehormatan para penarinya baik laki-laki maupun perempuan. Diantara aturan yang harus diindahkan oleh para penari, seperti jika ingin bergabung tidak boleh masuk dari belakang tapi harus masuk dalam lingkaran dahulu kemudian dengan sopan meminta untuk bergabung dalam lingkaran. Jika terdapat penari yang berbeda jenis kelamin, maka tangan penari laki-laki tidak boleh berada di atas tangan perempuan dan berbagai aturan lainnya. Sayangnya, nilai-nilai ini telah banyak dilupakan terutama generasi muda. Karena itulah lansia di PSTW berusaha mempertahankan tradisi lulo dengan norma-norma yang melekat padanya. Hal ini seperti dijelaskan oleh Kakek HSN (PM-Usia 75 tahun),

“Orangtua disini menjaga aturan-aturan tari Lulo, kalau anak muda sekarang bikin lulo sekedar gaya-gaya, kadang tidak memahami aturannya, asal senang-senang saja, padahal tari ini dulunya adalah tarian persembahan sebagai wujud rasa syukur pada Tuhan atas rezeki yang diberikan. Tarian ini mengajarkan nilai harmoni dan persahabatan. Karena itu, disini kami mencoba melestarikan budaya ini. Kebetulan disini ada program siswa peduli lansia, jadi kami diberikan kesempatan untuk menjelaskan kepada generasi muda terkait sejarah, makna filosofi serta aturan main yang terkandung dalam tari lulo”.

Melestarikan Tikar Adat

Selain tarian, salah satu hasil kebudayaan yang dilestarikan oleh lansia di PSTW minaula adalah tikar adat suku Tolaki. Tikar ini merupakan salah satu instrumen penting dalam setiap upacara adat seperti upacara perkawinan. Sayangnya, pembuat tikar ini sudah mulai langka, karena generasi muda sudah tidak berminat untuk menekuni keterampilan ini.

“Terus terang jika bukan bantuan dari panti saya sudah lama tidak membuat tikar. Bikin tikar ini bukan cuma sulit dan butuh kesabaran tapi sekarang bahan bakunya juga sudah langka. Daun agel untuk buat tikar ini didatangkan dari jauh, dari pulau Waoni. Alhamdulillah panti dapat menyediakan bahannya. Hasil kerajinan kami sebagian kami jual ke pasar sebagian dibantu pegawai dipasarkan lewat tamu-tamu anjongsana atau pameran. Hal terpenting bahwa tikar ini adalah tikar adat yang sudah mulai langka keberadaanya sehingga perlu dilestarikan.” (SHY, PM-Usia 70 tahun)

Pentingnya peranan lansia dalam menjaga tikar adat ini terbukti ketika PSTW Minaula Kendari mengikuti pameran pembangunan hari ulang tahun ke-58 kabupaten Konawe Maret 2018. Saat itu, Panti memamerkan beberapa hasil kerajinan lansia dan salah satunya adalah tikar adat. Banyak pengunjung yang berminat dan membelinya. Mereka mengakui bahwa tikar tersebut sudah langka dijual di pasar padahal keberadaanya sangat diperlukan dalam setiap acara adat. Hal Ini seperti pengalaman HRT (PM-Usia 72 tahun), selaku pembimbing keterampilan.

“Waktu kami mengikuti pameran dalam rangka HUT kabupaten konawe maret 2018 tikar adat buatan PM PSTW minaula habis diborong oleh warga konawe. Mereka sangat tertarik dan berminat. Tikar tersebut sangat mereka perlukan untuk upacara adat sementara sudah langka yang menjualnya untung ada lansia di panti yang terus melestarikan”

Keberfungsian Sosial dalam Transfer Pengetahuan

Peningkatan keberfungsian sosial lansia adalah hasil dari program intervensi yang dilakukan oleh para pekerja sosial dan pejabat

fungsional lainnya. Para pekerja sosial berhasil menggali potensi PM, memfasilitasi serta mengakses sumber yang tersedia. Hal ini seperti dikemukakan oleh NN (PM- Usia 70 tahun),

“Beberapa hari setelah saya tinggal di panti, saya sering ditanya-tanya, apa minatnya, apa kesukaan, dan keterampilan yang dimiliki. Saya selalu bilang saya suka mengajar dan mau mengajar sesuai bidang saya yakni Bahasa Inggris. Lalu bapak itu menawarkan bagaimana kalau mengajar anak-anak sekitar panti. Saya bilang saya bersedia dan sangat senang, saya ingin berbagi dan beribadah dengan ilmu saya. Lalu pihak panti mendaftar anak-anak yang mau ikut kursus. Sekarang ini ada juga seorang ayah meminta saya memberikan les Bahasa Inggris di rumahnya setiap hari. Saya semakin sibuk dengan kegiatan mengajar, tapi saya nikmati.”

Keberfungsian sosial dari Informan NN ditunjukkan dengan mengajar bahasa Inggris kepada anak-anak sekitar panti. Jadwalnya tiga kali seminggu di panti yakni Selasa, Kamis dan Sabtu. Dia juga diminta mengajar privat di luar panti yakni hari Senin, Rabu dan Jumat. Meskipun kegiatan ini bersifat sukarela tapi NN merasa kegiatan ini sangat menyenangkan. Dia berterima kasih kepada pekerja sosial yang telah memberikan kesempatan untuk berbagi dengan generasi muda. Selain berbagi pengetahuan, dia juga bahagia dengan berbagai aktivitas pelayanan dan bimbingan yang didapatkan di Panti. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh NN ketika diwawancarai ,

“Saya bahagia tinggal di panti, di sini suasananya nyaman, banyak teman, pegawainya ramah dan baik, mesjid dekat, kami mudah beribadah, aktivitas setiap hari ada sebagai hiburan, dari Senin sampai Jumat ada bimbingan agama, keterampilan, sosial, senam dua kali seminggu, Rabu dan Jumat.”

Hal yang sama dilakukan oleh kakek STJ (PM-Usia 75 tahun), salah seorang Penerima manfaat, menjelaskan kegiatannya dalam berbagi pengetahuan dengan generasi muda. Dia aktif memberikan les pelajaran umum seperti bahasa Indonesia dan Matematika,

“Di panti ini saya diberikan kesempatan, dengan pengetahuan dan pengalaman yang saya miliki, untuk berbagi dengan orang lain. Saya bisa mengajar anak-anak sekitar panti pelajaran matematika dan Bahasa Indonesia. Saya juga memotivasi mereka untuk rajin belajar agar cita-citanya dapat tercapai. Mereka saya himbau agar jangan terlalu banyak menghabiskan waktunya bermain. Harus seimbang dengan pelajaran. Saya sendiri merasa di panti ini punya banyak waktu yang harus saya isi dengan kegiatan positif dan menantang salah satunya dengan mengajar. Karena dengan mengajar otomatis saya juga harus belajar; membaca buku, mengisi TTS dan mempersiapkan bahan ajar adalah bagian hari hari saya di panti yang membuat saya merasa berguna”.

Keberfungsian sosial dalam transfer pengetahuan juga dilakukan oleh kakek, MRS (PM-Usia 62 tahun). Dia memberikan les mengaji kepada anak-anak sekitar panti. Kegiatan ini rutin dilakukan setiap hari sehabis sholat magrib hingga masuk sholat Isya. Di usia mudanya kakek MRS adalah seorang aktivis dakwah yang terbiasa hidup mengembara dari satu kampung ke kampung lain. Di usia tuanya dia habiskan di panti dan tetap ingin berkontribusi dalam membentuk generasi muda yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT,

“Saya ingin di usia tua saya ini bisa tetap berguna bagi masyarakat dan bangsa. Sebagai rasa syukur saya telah ditampung di Panti adalah saya ingin mengajar anak-anak agar mereka bisa membaca Al-quran. Setiap habis magrib saya mengajar mereka

walaupun tidak banyak tetapi mereka rutin hadir setiap hari. Saya bahagia dan hal ini memberikan saya semangat hidup” (MRS, PM-Usia 62 tahun)

Keberfungsian Sosial dalam Pelayanan Spiritual

Keberfungsian sosial dalam bidang spiritual diperankan oleh para lansia di PSTW minaula Kendari dalam berbagai aktivitas seperti menjadi pengurus masjid panti. Mereka secara rutin mengumandangkan adzan, menyetel kaset pembacaan ayat-ayat suci Al-quran menjelang waktu sholat, menjadi imam sholat lima waktu, memimpin pembacaan surat yasin setiap malam jumat atau pembacaan surat yasin jika ada kematian. Para lansia juga sering diminta oleh tamu anjungsana untuk memimpin doa keselamatan.

Kakek MRS yang berusia 62 tahun meskipun penyandang disabilitas dan memakai kursi roda namun dia secara rutin dan aktif menyetel ayat-ayat suci Al-quran dan mengumandangkan adzan menjelang waktu sholat lima waktu. Dia merasa sangat senang dan bangga diberikan kesempatan untuk menjalankan peran-peran tersebut. Hal ini seperti dikemukakan olehnya,

“Saya senang dan bangga karena saya diberikan kepercayaan untuk mengurus mesjid, saya secara rutin ke mesjid walaupun memakai kursi roda tapi saya masih melaksanakan secara mandiri. Mulai dari menyetel ayat-ayat suci Al-quran dilanjutkan dengan mengumandangkan adzan. Ini kesempatan buat saya untuk beribadah kepada Allah dan mengajak semua warga untuk datang ke mesjid sholat berjamaah” (MRS, PM-Usia 62 tahun).

Sementara itu Kakek MNW (72 tahun) secara aktif dan rutin memimpin sholat lima waktu termasuk sholat jumat. Dia merasa masih berguna dengan peran-peran yang

dijalankannya. Selain itu dia juga sering diminta oleh tamu yang mendatangi panti untuk memimpin doa keselamatan buat tamu yang bersangkutan,

“Diusia tua kakek ini yang membuat rasa berguna kepada Allah dan kepada sesama, bahwa kakek masih bisa memimpin sholat berjamaah bahkan sesekali mengisi khotbah jumat. Selain itu, kakek sering diminta untuk membacakan doa buat tamu-tamu yang datang ke panti. Semua itu tentu karena kita dipercaya dan diberikan kesempatan oleh para pekerja sosial” (MNW, PM-Usia 72 tahun).

Keberfungsian dalam Transfer Nilai-nilai Moral dan Kebijaksanaan Hidup

Para lansia di PSTW Minaula Kendari telah menjalankan peran ini dengan baik yang diwujudkan dalam bentuk pemberian nasehat kepada generasi muda yang melakukan anjangan ke Panti ataupun kepada para siswa peserta program siswa peduli lansia (Prosa Lansia). Menurut Kakek HRT (72 tahun), Minaula sering menerima kedatangan tamu beragam seperti politikus, pengusaha, birokrat, mahasiswa dan pelajar atau masyarakat biasa. Dalam kesempatan tersebut, Kakek HRT seringkali menyampaikan beberapa nasehat tentang moral dan nilai-nilai kehidupan. Untuk generasi muda pesan yang disampaikan adalah,

“Menjaga pergaulan, belajar yang giat. Menggunakan waktu untuk hal-hal yang positif, jangan pernah menyentuh tindakan tindakan negatif. Apalagi sekarang narkoba merajalela. Kami juga menyampaikan untuk senantiasa hormat pada orang tua, sebab tidak ada kesuksesan tanpa restu orangtua. Kami sebagai orangtua tentu lebih paham kehidupan. kami telah melewati semua fase dari anak, remaja, dewasa dan sekarang tua jadi itulah kami mengajarkan generasi muda untuk betul-betul menjalani

kehidupannya dengan baik, serius, disiplin dan kerja keras.” (HRT, PM-Usia 72 tahun).

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lansia di PSTW Minaula menjalankan berbagai aktivitas yang menunjukkan keberfungsian sosialnya. Keberfungsian sosial tersebut diimplementasikan dalam bidang kebudayaan, pengetahuan dan keterampilan, spiritual dan nilai-nilai moral kehidupan kepada generasi muda. Hal ini menegaskan bahwa lansia penerima manfaat PSTW Minaula meskipun berasal dari keluarga miskin, terlanjur bahkan banyak yang tidak memiliki keluarga, namun memiliki potensi dan kekuatan serta berkontribusi positif kepada masyarakat. Hal ini dapat dijelaskan melalui perspektif berbasis kekuatan.

Perspektif berbasis kekuatan atau *“the strengths-based perspective”* mulai diterapkan paska tahun 1970an. Perspektif ini melihat klien pada sisi kekuatannya dan bukan dari masalah atau kekurangannya semata. Beberapa pendekatan yang sangat mirip dengan perspektif berbasis kekuatan, seperti *“development resilience”*, *“healing and wellness”*, *“solution focused therapy”*, *“asset-based community development”* (Saleebey, 1996). Perspektif ini memandang bahwa setiap lansia memiliki daya dan kapasitas yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan kehidupan mereka. Oleh karena itu, dalam intervensinya, Pekerja Sosial fokus pada kekuatan klien, bukan kepada masalah, kekurangan, dan hal-hal yang bersifat patologis semata. Pekerja sosial mengembangkan intervensi berdasarkan hasil asesmen dengan mendayagunakan kekuatan-kekuatan klien dan bukan sekedar mengatasi masalahnya. Perspektif ini juga meyakini bahwa setiap orang, termasuk lansia, memiliki potensi internal dan eksternal,

kompetensi, serta sumber daya (Saleebey, 2000). Lansia membutuhkan kesempatan untuk mengaplikasikan keterampilan, pengetahuan dan tenaga mereka untuk memperbaiki keadaan serta berbuat baik bagi masyarakat. Mereka adalah orang-orang yang selalu mencoba berusaha untuk memperoleh sesuatu guna membuat hidup mereka bermakna dan berguna. Hanya saja, terkadang mereka tidak diberikan kesempatan, dianggap orang-orang yang tidak berdaya dan hanya menunggu bantuan atau tindakan amal orang lain.

Sekalipun perspektif kekuatan ini memandang masalah klien dari kekuatannya, bukan berarti perspektif ini menyangkal masalah klien. Saleebey (2006) mengemukakan bahwa perspektif kekuatan bukan berarti meninggalkan sama sekali model medik atau patologis. Perspektif berbasis kekuatan tidak menolak kenyataan bahwa orang mengalami kemiskinan dan keterlantaran. Perspektif ini hanya melihat sisi atau dimensi lain dari penyandang masalah bahwa mereka memiliki potensi. Dengan pandangan positifnya, perspektif ini melihat bahwa upaya membantu klien lebih efektif dengan mengembangkan kekuatan dan potensinya daripada sekedar mengatasi masalahnya.

Pendekatan kekuatan memberi garis-garis panduan tentang kemungkinan pertumbuhan klien. Pekerja sosial perlu mengembangkan kekuatan klien untuk membantu mereka menyesuaikan diri dan menjadi bermakna hidupnya berdasarkan pengalaman. Pekerja sosial perlu memahami keadaan yang dialami oleh klien supaya dapat membantu mereka membangun kekuatan, semangat, daya tahan dan strategi tindak untuk keluar dari realitas kehidupan yang sulit. Dalam konteks ini, Pekerja sosial hadir bukan sekadar untuk menjelaskan fenomena yang terjadi tetapi pekerja sosial harus mengenal atau memahami

kebutuhan individu secara spesifik, bagaimana keperluan tersebut dapat dipenuhi dengan baik melalui kekuatan atau potensi individu itu sendiri, dan melibatkan lingkungan sebagai elemen dukungan sosial atau sistem sumber-sumber yang memberikan kesempatan individu yang bermasalah dapat berdaya menolong dirinya sendiri. Hal ini seperti disarankan oleh Mitchell dan Kemp (2000) bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas hidup lansia yang tinggal dalam panti maka perlu dilakukan beberapa hal seperti membangun kohesivitas lingkungan sosial, mendorong partisipasi sosial dan pelibatan keluarga.

Hal ini sebagaimana dilakukan oleh para pekerja sosial di PSTW Minaula yang dalam menolong lansia bukan semata fokus pada masalah klien yang mungkin bersifat patologis tapi juga menggali potensi dan membantu untuk mengaktualisasikannya. Para lansia difasilitasi dan diberikan kesempatan untuk berkarya dan menjadi berguna bagi orang lain dan masyarakat. Pekerja sosial menyediakan tempat, sarana dan alat-alat yang dibutuhkan untuk para lansia sehingga dapat mengaktualisasikan kekuatannya. Selain itu, para pekerja sosial juga menghubungkan dengan sumber-sumber yang ada seperti sekolah, lingkungan sekitar, pasar dan bahkan media massa yang membuat lansia dapat semakin memiliki nilai dan merasa berguna dalam kehidupan mereka. Partisipasi keluarga, lingkungan sekitar dan masyarakat dalam meningkatkan keberfungsian sosial lansia kaitannya dengan penerapan perspektif kekuatan juga diakui oleh Suheli, Kahar dan Kasmawati (2015) bahwa perlu di dorong partisipasi komunitas baik yang bersifat material maupun non material dalam memberikan dukungan kepada lansia untuk mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lansia di PSTW Minaula Kendari melaksanakan keberfungsian sosial melalui bidang kebudayaan, pengetahuan dan keterampilan serta spiritual dan nilai-nilai moral kehidupan. Peran-peran yang dijalankan oleh lansia ini memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dalam rangka mencerdaskan generasi muda bukan saja secara intelektual tapi juga sosial sebagai satu tujuan berbangsa dan bernegara. Melalui aktivitas ini pula dapat disimpulkan bahwa mereka telah berkontribusi untuk melestarikan nilai-nilai luhur dalam satu masyarakat khususnya masyarakat Kendari.

Hal ini tidak lepas dari peranan pekerja sosial dalam menggali dan memfasilitasi potensi, minat dan hobi lansia untuk disalurkan kedalam aktivitas yang bermakna dan meningkatkan harkat, martabat, serta citra diri positif lansia. Pekerja sosial berhasil menghubungkan antara kebutuhan lansia dengan sistem sumber yang tersedia. Anak-anak sekitar panti yang mengikuti aktivitas belajar dapat dipandang sebagai peserta didik sekaligus sumber dukungan sosial bagi lansia. Kehadiran dan kesediaan anak-anak tersebut memberikan kesempatan pada lansia untuk merasa bermakna dan berguna bagi orang lain.

Penelitian ini telah menyumbangkan satu konsep terkait keberfungsian sosial dengan memberikan penjelasan terkait klasifikasi keberfungsian sosial yang dapat dilihat dari bidang-bidang kehidupan seperti keberfungsian sosial dalam bidang kebudayaan, keberfungsian sosial dalam bidang pengetahuan keberfungsian sosial dalam bidang spiritual. Konsep keberfungsian sosial dalam bidang-bidang kehidupan ini dapat teruji dan dikembangkan berdasarkan kajian-kajian lapangan. Konsep ini tentu dapat diterapkan bukan saja pada lansia tapi juga pada penyandang masalah sosial yang lain.

Penelitian juga telah memberikan sumbangan soal keterkaitan antara aspek keberfungsian sosial dengan perspektif kekuatan. Ungkapan para informan lansia menyatakan dengan jelas apabila mereka mendapatkan kesempatan untuk mengeksplorasi potensi dan kekuatannya, maka mereka akan semakin positif memandang kehidupannya. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa para pekerja sosial menyadari betul masalah-masalah yang dialami para lansia seperti kemiskinan, keterlantaran dan masalah-masalah sosial psikologis lainnya. Namun demikian, pendekatan asesmen berbasis kekuatan lebih memfokuskan pada potensi lanjut usia sehingga dapat meningkatkan harga diri dan lebih memberdayakan lansia.

SARAN

Adapun saran untuk peningkatan peran lansia di masyarakat adalah perspektif berbasis kekuatan menjadi salah satu pilihan untuk mengembangkan berbagai program dan kegiatan lansia. Para pekerja sosial dan profesional lainnya, baik yang bekerja di panti ataupun luar panti perlu mengkombinasikan asesmen terhadap lansia antara potensi, kekuatan, kesempatan yang dimiliki lansia dengan masalah-masalah yang mereka hadapi. Seperti yang terlihat dari hasil penelitian, kekuatan, potensi dan kesempatan lansia untuk berkontribusi dalam kehidupan masyarakat dapat mengatasi perasaan kesepian mereka, bahkan menjadi jembatan antara generasi senior dengan generasi junior. Kegiatan untuk melestarikan tari dan tika pandan juga memberikan contoh kepada anak-anak muda tentang kuatnya tradisi yang sejatinya dapat mereka teruskan. Bila saja pendekatan yang telah dilakukan di PSTW Minaula ini dapat diterapkan pula pada panti-panti untuk lansia lainnya, maka sebagai alternatif terakhir, panti dapat menjadi tempat yang tetap menjaga harapan lansia sebagai warga senior yang perlu

mendapat penghormatan, tidak peduli apakah mereka miskin atau tidak, terlantar atau tidak atau Penyandang masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) atau bukan. Untuk penelitian selanjutnya disarankan agar ada penelitian lanjutan tentang jenis-jenis pendekatan pelayanan lansia yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, sebagai pihak yang mendapatkan amanah untuk melaksanakan Standar Pelayanan Minimal bagi lansia terlantar dengan sistem panti.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dan Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, Kementerian Sosial atas segala dorongan dan motivasi untuk melakukan kajian dan publikasi terhadap program-program rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh panti, agar dapat menjadi rujukan bagi panti-panti lain baik milik pemda maupun masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Barker, R., L. (1987). *The social work dictionary*. Silver Spring, MD. National Social Work Association Inc.
- Berat, V., Neškovič-Konstantinovič, Z., Nedovič, G., Rapaič, D., & Marinkovič, D. (2015). Social functioning of elderly persons with malignant diseases. *Vojnosanitetski preglad. Military-medical and pharmaceutical review* 72(1):33-39. Retrieved from <http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0042-8450/2015/0042-84501501033B.pdf>
- Degenholtz, H., B., Resnick, A., L., Bulger, N., & Chia, L. (2014). Improving quality of life in nursing homes: The structured resident interview approach. *Journal of Aging Research*, 2014;1-8. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.1155/2014/892679>
- Direktorat Pelayanan Sosial Lanjut Usia. (2011). *Pelayanan Sosial Lanjut Usia*. Kementerian Sosial.
- Dubois, B., & Miley, K., K. (1992). *Social work: An empowering profession*. Allyn And Bacon. Boston.
- Graham C, Arthur A, Howard R. (2002). The social functioning of older adults with schizophrenia. *Aging and Mental Health* 6 (2) 149-52 . Retrieved from <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12028883>
- Jariatun, H. (2015). Problem keberfungsian sosial lansia di Panti Wreda Budhi Darma Yogyakarta. *Skripsi*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Retrieved from <http://digilib.uin-suka.ac.id/15678/1/BAB%20I%2C%20IV%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>
- Julianti, S. (2013). Kekerasan struktural terhadap orang lanjut usia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 9 (1) 67-79. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/109520-ID-kekerasan-struktural-terhadap-orang-lanj.pdf>
- Meesters, P., D., Stek, M., L., Comijs, H., C., Haan, Ld., Patterson, T., L., Eikelenboom, P., & Beekman, A., T., F. (2010). Social functioning among older community-dwelling patients with schizophrenia: A Review. *The American Journal Geriatric Psychiatry*, 18 (10) 862-878.
- Mitchell, J., M. & Kemp, B., J. (2000). Quality of life in assisted living homes: A multidimensional analysis. *The*

- Journals of Gerontology: Series B*, 55 (2) 117-127. Retrieved from <https://doi.org/10.1093/geronb/55.2.P117>
- Muthia, G., Krisnani, H., & Meilani, L. (2016). Peran pekerja sosial dalam peningkatan keberfungsian sosial lansia di PSTW Budi Darma Bekasi. *Prosiding KS. Riset & PKM* (3) 292-428. Retrived from <http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/13776/6579>.
- Ponnuswami, I., Francis, A., & Udhayakumar, P. (2012). *Strengths-based approach to social work practice with older persons*. In: Pulla, Venkat, Chenoweth, Lesley, Francis, Abraham, and Bakaj, Stefan, (eds.) *Papers in Strengths Based Practice*. Allied Publishers, New Delhi, India, pp. 150-161. Retrieved from <https://researchonline.jcu.edu.au/25554/>
- Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial & Badan Pusat Statistik. (2016). *Profil penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Indonesia: Berdasarkan data Susenas tahun 2015*.
- Kementerian Sosial. (2015) *Rencanan Strategis Kementerian Sosial 2015-2019*.
- Robert, K. Y. (2011). *Qualitative research: from start to finish*. New York: The Guilford Press.
- Rohmah, A., I., N., Purwaningsih & Bariyah, K. (2012). Kualitas hidup lansia. *Jurnal keperawatan*, 3 (2) 120-132. Retrieved from <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/keperawatan/article/viewFile/2589/3234>
- Sale, E. (2003). Family burden and quality of life. *Quality of Life Research*, 12, 33-41
- Saleebey, D. (1996). *Strengths perspective in social work practice: Extentons and cautions*. National Association of Social Works Inc.
- Saleebey, D. (2000). Power in The People: Strengths and Hope. *Advances in SocialWork*, 1 (2)127-136. Retrieved from <http://journals.iupui.edu/index.php/advancesinsocialwork/article/view/18/14>
- Shah, Nilesh & Tank, Parul. (2018). *Rehabilitation and residential care needs of the elderly: clinical practice guidelines*. Retrieved from http://www.indianjpsychiatry.org/cpg/cpg2007/CPG-GtiPsy_16.pdf
- Suheli, U., Kahar, F., Kasmawati, A. (2015). Public social services At Panti Sosial Tresna Werdha “Gau Mabaji”, district of Gowa, province of South Sulawesi, Indonesia. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 211 () 390-398. Retrieved from <https://www.sciencedirect.com/journal/procedia-social-and-behavioral-sciences/vol/211>
- Suheli, U. (2016). Pelayanan publik bidang sosial lanjut usia pada Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten 1 Propinsi Sulawesi Selatan. *Desertasi*. Program Pascasarjana Administrasi Publik, Universitas Negeri Makassar.
- Tamher, S., & Noorkasiani. (2008). *Kesehatan usia lanjut dengan pendekatan asuhan keperawatan*. Salemba Medika. Jakarta.

PEDOMAN BAGI PENULIS

Redaksi menerima kiriman artikel dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Artikel berupa hasil penelitian lapangan, bidang kesejahteraan sosial maksimal 3 tahun terakhir, dan belum pernah dipublikasikan oleh media lain.
2. Naskah diketik dengan huruf Times New Roman 12 poin, 1,5 spasi, 15 - 25 halaman (A4), dan diserahkan dalam bentuk *soft copy* ke www.ejournal.kemsos.go.id
3. Sistematika artikel disusun tanpa penomoran sub judul (lihat *journal template*), dengan urutan sebagai berikut:
 - a). Judul (huruf besar) dan nama penulis (tanpa gelar akademik dan ditempatkan di bawah judul artikel), disertai lembaga, alamat dan email penulis. Jika penulis terdiri dari 4 orang atau lebih, yang dicantumkan adalah nama penulis utama, nama penulis-penulis lainnya dicantumkan pada catatan kaki halaman pertama naskah (dengan melampirkan identitas penulis);
 - b). Abstrak terdiri dari 150 - 200 kata, huruf Times New Roman dalam 1 (satu) paragraf berisi latar belakang (1-2 kalimat), tujuan, metode, hasil penelitian, dan kata kunci (*keywords*) maksimal 3 kata.
 - c). Pendahuluan (huruf besar); berisi narasi tentang latar belakang, tinjauan daftar pustaka, tujuan penelitian, dan metode;
 - d). Hasil dan Pembahasan (huruf besar);
 - e). Kesimpulan;
 - f). Saran;
 - g). Ucapan Terima Kasih;
 - h). Daftar Pustaka (huruf besar): Berasal dari Jurnal (diutamakan Jurnal Kesejahteraan Sosial/Pekerja Sosial), hasil-hasil penelitian, dan buku.
4. Judul, abstrak dan kata kunci ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris
5. Kutipan yang langsung dan panjang (lebih dari tiga baris) diketik dengan jarak baris satu dengan bentuk indented style (bentuk berinden). Semua kutipan dan rujukan yang digunakan oleh penulis harus tercantum dalam daftar pustaka.
6. Penggunaan singkatan, harus dituliskan secara lengkap pada saat pertama kali disebutkan lalu dibubuhkan singkatannya dalam kurung. Istilah/kata asing atau daerah ditulis dengan *Italic* (dimiringkan). Simbol/lambang ditulis dengan jelas dan dapat dibedakan, seperti penggunaan angka 1 dan huruf I (juga angka 0 dan huruf O).
7. Tabel dan gambar dan judul tabel dan gambar ditulis dengan Times New Roman berukuran 10. Penomoran tabel menggunakan angka Arab (ikuti format APA). Tabel/gambar maksimal 3.
8. Penulisan daftar pustaka mengikuti format APA (*American Psychological Association*). Daftar pustaka sedapat mungkin menggunakan sumber primer (buku atau jurnal), diurutkan secara alfabetis berdasarkan nama keluarga/penulis. Minimal 80% rujukan berasal dari sumber yang up to date (diterbitkan tidak lebih dari 10 tahun terakhir). Rujukan dari internet mencantumkan tanggal diakses.
 - a) Bila daftar pustaka dirujuk dari buku dengan pengarang tunggal:
Arikunto, S. (2005). Manajemen Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.
 - b) Bila daftar pustaka dirujuk dari buku dengan 2 pengarang:
Wijaya, C. & Rusyan, T. (1992). Kemampuan Dasar Guru dalam Proses Belajar Mengajar. Bandung: Remaja Rosdakarya.
 - c) Bila daftar pustaka dirujuk dari buku lebih dari 2 pengarang:
Suharto, E., Suradi, Luhpuri, D., Sudrajat, A., Koswara, A., Marbun, J., Masngudin & Sabeni. (2003). Kemiskinan dan Keberfungsian Sosial, Studi Kasus Rumah Tangga Miskin Indonesia. Bandung: STKS Bandung Press.
 - d) Bila daftar pustaka dirujuk dari jurnal:
Mujiyadi, B & Gunawan, (2000). Pemberdayaan Masyarakat Miskin: Suatu Kajian terhadap Masyarakat di Sekitar Kawasan Industri, Informasi Vol.5 No. 1, Januari 2000. Jakarta: Balitbang Depsos RI,
 - e) Bila daftar pustaka dirujuk dari website:
Hamidah, (2000). Dampak Pelecehan Seksual, <http://Viking-Trisna.Blogspot.com/2010/04/Dampak-Pelecehan-seksual.html>, diakses 23 Juli 2012
 - f) Bila daftar daftar pustaka dirujuk dari Lembaga:
Kementerian Sosial RI. (2000). Pedoman Panti Sosial Bina Remaja, Jakarta: Direktorat Rehsos
 - g) Bila daftar pustaka dirujuk dari media massa:
Surbakti R. (2012). Otonomi daerah dari Presiden, Kompas 31 Juli 2012:6
 - h) Bila daftar daftar pustaka dirujuk dari Undang-Undang:
Republik Indonesia, (2002). Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Jakarta: Kementerian Sosial

